

**Krisis ekonomi pada masa
Mangkunegara v
(1881 – 1896)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
guna Melengkapi Gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

**Disusun Oleh
Aminudin aris s
C.0504007**

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspansi kekuasaan kolonial pada abad ke-19 merupakan gerakan kolonialisme yang paling besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara yang mengalami penjajahan. Penetrasi kekuasaan politik dan ekonomi Barat telah mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial serta modern.¹ Salah satu akibatnya yaitu pemerintah kolonial Belanda mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah nusantara, terutama rempah-rempah yang bernilai tinggi dalam pasar dunia. Penjualan barang-barang rempah dalam pasar dunia terutama di wilayah Eropa sangat menguntungkan negara Belanda dan terjadi kenaikan kas negara yang sangat tinggi.

Semua keuntungan tersebut menjadi hancur saat kekalahan Belanda atas Belgia dan kerugian yang diderita akibat perlawanan-perlawanan yang terjadi di pulau Jawa terutama perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) menyebabkan perekonomian negara Belanda turun samapai titik terendah. Ekonomi negara Belanda porak poranda, ditunjukkan dengan kekosongan kas negara yang dulunya terjadi surplus.

Akibat dari kekosongan kas negara Belanda tersebut, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa di mana sebagai pencetusnya ialah van den Bosch. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ini

¹ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991, *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, hal. 5

dalam tahun 1830 di Jawa mulai dijalankan sistem tanam paksa, yang dalam beberapa hal merupakan suatu reaksi terhadap sistem tanah yang terdahulu. Sistem tanam paksa tersebut dilaksanakan di daerah jajahan terutama di Jawa. Hal itu karena di Jawa banyak terdapat kerajaan-kerajaan yang masih menerapkan sistem feodal dalam masyarakat. Kekuasaan feodal sangat berpengaruh dan harus dihormati, karena orang-orang Eropa tidak akan dapat mencapai apa-apa jika mereka tidak mempergunakan dan memanfaatkan sistem feodal tersebut. Pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut dilakukan untuk memperbaiki ekonomi negara Belanda.

Pelaksanaan tanam paksa tidak dilakukan di daerah *vostenlanden*, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kelangsungan kerajaan. Kolonialisme telah merubah kekuasaan para bangsawan kerajaan atas tanah dan kekayaan yang tersimpan di dalamnya, walaupun pemerintah kolonial juga memanfaatkan keadaan birokrasi tradisional untuk kepentingan eksplotasi. Kekuasaan seorang raja yang begitu besar pada awalnya semakin berkurang karena terjadi penetrasi dari pihak asing, lebih-lebih raja menyerahkan hak-haknya atas tanah kepada kerabat atau pegawainya untuk sementara waktu, yang disebut *apanage*². Berdasarkan teori milik raja (*vorstendomein*) dari Rouffaer, raja adalah pemilik tanah dari seluruh kerajaan dan dalam pemerintahannya ia dibantu oleh para birokrat yang terdiri dari sentana dan narapraja.³ Dengan masuknya campur tangan pemerintah

² Sediono Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Gramedia, hal. 1

³ Suhartono, 1991, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Jakarta: Tiara Wacana, hal. 27

kolonial Belanda dalam kerajaan, maka secara tidak langsung sudah merubah teori tersebut.

Di wilayah kerajaan Surakarta yang merupakan wilayah yang tidak secara langsung terbebani dengan pelaksanaan sistem tanam paksa, akan tetapi juga menerima dampak dari sistem ini. Hal ini jelas karena wilayah kerajaan Surakarta telah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan harus tunduk terhadap kebijakannya. Salah satunya yaitu Praja Mangkunegaran, di mana Praja Mangkunegaran termasuk dalam kerajaan Kasunanan Surakarta yang kekuasaannya di bawah Sunan.

Sebagai bagian dari wilayah kerajaan Kasunanan yang berdiri sendiri, Praja Mangkunegaran pada awalnya menggunakan tanah-tanah *apanage* sebagai sumber pendapatan sekaligus sebagai gaji para kerabat Mangkunegaran dan para nara prajanya. Sistem *apanage* itu mulai diterapkan di Praja Mangkunegaran pada perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Tanah-tanah *apanage* itu sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha pertanian secara tradisional yang menghasilkan bahan makanan pokok seperti padi dan palawija. Setelah masa tanam paksa, banyak tanah-tanah *apanage* disewakan kepada pihak swasta untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, kina, dsb. Pihak Praja Mangkunegaran hanya menerima pajak tanah baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi dari para pemegang *apanage* tersebut.⁴

Dalam perkembangannya Praja Mangkunegaran mengalami perubahan dalam bidang politik dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan Mangkunegara I yang mempunyai kesempatan untuk merebut tahta kerajaan. Masa Mangkunegara I

⁴ Abdul Karim Pringgodigdo, 1987, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustoko, hal. 26

dasar-dasar kerajaan Mangkunegara sudah diletakkan berkat keberaniannya, ketegasannya dan daya tahannya. Selain itu pada masa Mangkunegara I tidak menitikberatkan mengenai ekonomi Praja Mangkunegaran karena pada masa itu Mangkunegara I lebih menitikberatkan pada masalah kekuasaan wilayah Praja Mangkunegaran.

Pada masa Mangkunegara II kekuasaan dan luas wilayah Praja Mangkunegaran menjadi dua kali lipat dari awal berdirinya. Perluasan tersebut merupakan hadiah dari pemerintah Hindia Belanda karena pihak Praja Mangkunegaran telah membantu pemerintah Hindia Belanda dalam perang Jawa. Pada masa ini kondisi ekonomi Praja Mangkunegaran tidak begitu menonjol dan tidak terlalu berkembang karena Mangkunegara II lebih menitik beratkan pada ketataprajaan terutama mengenai masalah keamanan yaitu dengan dibentuknya sebuah legiun Mangkunegaran. Selain itu karena Mangkunegara II telah banyak membantu pemerintah Hindia Belanda, maka ia diberi gelar oleh pemerintah kolonial dengan *Ridder in de Militaire Willems Orde*.

Awal masa Mangkunegara III, ekonomi Praja Mangkunegaran sudah mulai mendapat perhatian. Hal ini terbukti pada awal pemerintahannya dibuka lahan perkebunan kopi secara besar-besaran. Meskipun dibuka perkebunan kopi secara besar-besaran tetapi hasilnya masih belum memuaskan karena mengalami kesukaran dalam hal pemeliharaannya. Meskipun pada masa ini bidang ekonomi sudah mendapat perhatian melalui penanaman kopi tetapi Mangkunegara III tidak berhasil meningkatkan ekonomi Praja Mangkunegaran, terbukti sewaktu beliau meninggal mempunyai hutang-hutang yang banyak.

Masa keemasan terjadi pada pemerintahan Mangkunegara IV terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pada masa ini ekonomi Mangkunegaran berada pada titik tertinggi dengan terjadi surplus kas Mangkunegaran. Hal itu disebabkan karena Mangkunegaran IV merupakan pencetus adanya perkebunan di wilayah Mangkunegaran. Dibukanya perkebunan di Praja Mangkunegaran oleh Mangkunegara IV, sehingga menjadikannya terkenal. Pembukaan perkebunan tersebut membawa pengaruh yang besar sekali, tidak saja pada keuangan Praja Mangkunegaran yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada hubungan antara penguasa pemerintahan kerajaan dengan pemerintah kolonial Belanda.

Rupa-rupanya sistem tanam paksa di tanah-tanah pemerintah kolonial dan sistem sewa tanah di daerah-daerah kerajaan mendatangkan banyak laba, sehingga membawa Mangkunegara IV sebagai penguasa dengan pengalaman yang matang, kepada perluasan yang sudah ada dan pembukaan kepentingan tanam perkebunan yang baru.⁵ Tanaman-tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman-tanaman yang mempunyai nilai tinggi di pasaran dunia terutama di wilayah Eropa. Tanaman perkebunan tersebut yaitu antara lain kopi, gula, nila, tembakau, dan lain sebagainya.

Sejak perluasan perkebunan pada pertengahan abad XIX, banyak diperlukan tenaga kerja baik laki-laki, wanita maupun anak-anak. Wanita dan anak-anak dipekerjakan di gudang-gudang, kebun kopi dan tembakau, sedangkan laki-laki di pabrik dan kebun tebu. Upah yang mereka terima tergantung dari berat ringannya pekerjaan. Upah harian mengalami kenaikan beberapa sen, yaitu 10 sen

⁵ Abdul Karim Pringgodigdo, 2000, *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran*, Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko, hal. 2

pada tahun 1832 menjadi 12,5 sen pada tahun 1864 di tambah makan sekali. Pada tahun 1865 upah itu naik menjadi antara 20-50 sen. Di pabrik gula upah berkisar antara 20-35 sen, sedangkan upah pada malam hari antara 22-40 sen, dan untuk pekerjaan berat dibayar 50 sen.⁶

Pada waktu pemerintahan Mangkunegaran IV berkuasa maka kopi, tebu, dan nila merupakan hasil terpenting dari tanah Mangkunegaran, di samping padi dan sebagian besar dari tanah ada di tangan keluarganya. Hal itu sebagai akibat dari kebiasaan para pendahulunya untuk memberi *lungguh* kepada keluarga dan abdi dalem. Sebenarnya sistem *lungguh* banyak kerugiannya, tetapi tidak langsung dihapuskan pada saat Mangkunegara IV naik tahta, karena pemerintah Belanda masih mempunyai kekuasaan atas tanah-tanah di daerah swapraja.

Di tahun 1862 Mangkunegara IV menarik kembali tanah *apanage* dan dikuasai sepenuhnya oleh Praja Mangkunegaran secara langsung. Mulai saat itu pemegang tanah *apanage* digaji sesuai dengan luas lebar kecilnya tanah *apanage* tersebut. Selain itu juga dengan dikuasainya kembali tanah-tanah *apanage* tersebut oleh Praja Mangkunegaran, terjadi perubahan sistem gaji yang berupa tanah *lungguh* menjadi berupa uang.⁷ Selain itu juga dengan ditariknya tanah *apanage* tersebut dapat digunakan untuk menanam tanaman kopi secara besar-besaran yang hasilnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masa kekuasaan Mangkunegara IV juga melakukan suatu loncatan ekonomi yang sangat luar biasa, yaitu memasukkan hasil dari perkebunan tebu dan kopi ke pasar internasional di Eropa. Hal itu disebabkan karena pada masa Mangkunegara IV mengembangkan sistem perkebunan dan hasil dari dua

⁶ Suhartono, *op.cit* .hal. 47

⁷ Abdul Karim Pringgodigdo, 2000, *op.cit.*,hal. 4

perkebunan tersebut sangat luar biasa serta mempunyai nilai yang sangat tinggi di pasar internasional. Perubahan ruang lingkup penjualan yang mulanya hanya di daerah-daerah sendiri menjadi penjualan yang memiliki ruang lingkup yang luas yaitu di pasaran dunia atau wilayah Eropa merupakan suatu hal yang sangat luar biasa mengingat Praja Mangkunegaran hanyalah merupakan sebuah kerajaan kecil yang merupakan pecahan dari Kasultanan Surakarta.

Meskipun di satu sisi perekonomian Praja Mangkunegaran terutama dalam hal perkebunan tebu dan kopi dapat menembus ekonomi dunia dan ikut serta dalam pasar internasional, tetapi di sisi lain dengan mengikutsertakan hasil perkebunan tebu dan kopi dalam perekonomian internasional, maka secara tidak langsung hasil dari perkebunan tebu dan kopi tergantung pada tinggi rendahnya harga gula dan kopi di pasar internasional. Dengan demikian Praja Mangkunegaran tidak dapat menentukan harga dari kedua hasil perkebunan tersebut, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada ekonomi Praja Mangkunegaran. Ia memegang saham terbesar dari Java-Bank dan ia telah meletakkan dasar agar semua milik Mangkunegaran dijadikan Dana/Foundy Mangkunegaran.⁸

Daerah Praja Mangkunegaran sebagai salah satu daerah swapraja, tidak lepas dari proses kapitalisme perkebunan sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Dengan didirikannya berbagai perusahaan perkebunan di daerah, misalnya pabrik gula di Colomadu dan Tasikmadu, kopi di Kerjo Gadungan, kapas di Wonogiri, indigo di Mojoretno dan polokarto, serta bungkil di Polokarto.⁹ Semua

⁸ Abdul Karim Pringgodigdo, 1986, *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran*, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko, hal. 51

⁹ *Ibid*, hal 42

perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut di mulai pada masa Mangkunegara IV yang kemudian diteruskan oleh pengganti-penggantinya dan menjadi berkembang ada masa Mangkunegara VII.

Meskipun pada masa Mangkunegara IV merupakan puncak keemasan dari Praja Mangkunegaran, tetapi pada akhir masa jabatannya terjadi krisis dunia. Krisis tersebut akibat dari menurunnya nilai jual kopi dan gula di pasar internasional sehingga terjadi penumpukan hasil kopi dan gula di Praja Mangkunegaran. Hal itu terjadi karena Mangkunegara IV sudah memutuskan untuk membawa hasil perkebunan kopi dan tebu ke pasar internasional seperti di terangkan di atas. Turunnya nilai jual kopi dan gula di pasar internasional juga disebabkan oleh hama daun kopi yang sejak tahun 1878 menyerang *Java Koffie/Kopi Jawa* (suatu varietas dari *coffea arabica*) yang ditanam terbanyak pada waktu itu dan juga hama Sere yang menyerang kebun-kebun tebu di Jawa. Adanya proteksi terhadap industri gula di Eropa bertambah banyak sekali, sehingga harga gula menjadi tertekan dan akhirnya hasil penjualan gula tebu tidak dapat menutupi biaya penanamannya.¹⁰

Meskipun terjadi krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya harga kopi dan gula di pasar internasional, ekonomi di Praja Mangkunegaran tidak terlalu merosot karena pada waktu itu kas Praja Mangkunegaran masih mampu untuk masalah tersebut. Setelah Mangkunegara IV wafat, kemudian digantikan Prangwodono yang bergelar Mangkunegara V. Pada masa Mangkunegara V inilah kondisi ekonomi di Praja Mangkunegaran semakin terpuruk bahkan sampai mempunyai hutang yang sangat banyak. Hal itu disebabkan karena Mangkunegara

¹⁰ Abdul Karim Pringgodigdo, 1987, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustoko, hal. 1

V tidak pandai dalam manajemen keuangan Praja Mangkunegaran. Ia hanya memikirkan kesenangannya saja dan hanya meneruskan apa yang sudah dibangun oleh ayahnya yaitu Mangkunegara IV.

Selain itu terjadinya krisis di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V disebabkan oleh orang-orang dalam yang merupakan keluarga dan kerabat dari Mangkunegara V sendiri yang selalu memperkaya diri. Akibat itu semua banyak hutang di mana-mana, sampai-sampai tidak dapat membayar gaji para pegawai dan abdi dalem. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mangkunegara V meminta bantuan kepada pemerintah kolonial melalui residen di Surakarta yang berupa hutang. Sebenarnya permintaan tersebut disetujui oleh pemerintah kolonial tetapi dengan syarat dibentuk suatu komisi keuangan yang diberi nama *Raad van Toezicht belast met de regeling van de financieele aangelegenheden van de Mangkoenagorosche landen en bezittingen* (Dewan Pengawas yang bertugas mengatur urusan keuangan tanah dan barang-barang milik Mangkunegaran).

Mangkunegara V menolak syarat tersebut karena jika diterima syarat tersebut, maka keuangan Mangkunegaran diawasi dan diatur oleh pemerintah kolonial. Karena tidak mendapatkan pinjaman, maka Mangkunegara V meminta bantuan kepada pihak swasta dan akhirnya mendapat pinjaman dari AEL Huygen de Raet dari Semarang, tetapi dengan menggadaikan barang-barang milik kekuasaan Praja Mangkunegaran. Meskipun sudah mendapatkan pinjaman untuk keperluan ekonomi Praja Mangkunegaran supaya keluar dari krisis ekonomi tersebut, tetapi kenyataannya pinjaman tersebut hanya bertahan selama setahun saja dan ekonomi Praja Mangkunegaran tetap dalam keadaan terpuruk.

Akhirnya Mangkunegara V meminjam kepada pemerintah kolonial Belanda lagi dan menyetujui syarat tersebut. Berawal dari keputusan tersebut, pemerintah kolonial Belanda ikut campur dalam masalah keuangan sekaligus ekonomi Praja Mangkunegaran. Pemerintah kolonial Belanda memerintahkan kepada beberapa orang residennya untuk mengembangkan dan memperbaiki perekonomian di Praja Mangkunegaran. Dimulai dengan mengembangkan dan memperbaiki potensi-potensi yang telah ada seperti pekerbunan dan pabrik-pabrik.

Kebijakan-kebijakan tersebut lebih banyak dari residen yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial daripada Mangkunegara V sendiri. Tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun pemerintah kolonial Belanda sudah ikut campur dalam memperbaiki perekonomian Praja Mangkunegaran, tetapi hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan. Perekonomian semakin terpuruk hutang-hutang semakin banyak yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintahan Mangkunegara V merupakan masa yang sangat sulit bagi perkembangan Praja Mangkunegaran. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain disebabkan oleh buruknya manajemen keuangan oleh Mangkunegara V, gaya hidup mewah yang diterapkan oleh Mangkunegara V, para keluarga dan kerabat Mangkunegara V yang memperkaya diri dari kekayaan Praja Mangkunegaran, serta ikut campurnya pemerintah kolonial Belanda dalam urusan keuangan dan perekonomian Praja Mangkunegaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi perekonomian masa Mangkunegara V ?
2. Bagaimana campur tangan Belanda dalam kebijakan-kebijakan ekonomi masa Mangkunegara V ?
3. Bagaimana dampak dari kemunduran perekonomian masa Mangkunegara V ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui kondisi perekonomian pada masa Mangkunegara V.
2. Mengetahui campur tangan Belanda dalam kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Mangkunegara V.
3. Mengetahui dampak dari kemunduran perekonomian pada masa Mangkunegara V.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Serta diharapkan mampu menjawab masalah yang berhubungan dengan masalah krisis ekonomi yang terjadi di Praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara V.

E. Kajian Pustaka

Kajian-kajian yang mengupas mengenai Praja Mangkunegaran sudah banyak ditulis antara lain karya Abdul Karim Pringgodigdo yang berjudul *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, 1987, terjemahan Moehammad Hoesodo Pringgokoesoemo, merupakan pustaka yang sangat membantu untuk mengungkapkan kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan ekonomi Mangkunegara IV samapi VII, di mana di dalamnya juga terdapat kepemimpinan dan kebijakan politik dan ekonomi dari Mangkunegara V. Bagian pertama dari buku tersebut menguraikan tentang pertumbuhan Praja Mangkunegaran. Pada bagian yang kedua membahas secara garis besar tentang Onderneming atau perkebunan milik Praja Mangkunegaran dari pertengahan abad XIX hingga awal abad XX. Pada bagian ketiga membahas mengenai krisis ekonomi dan kemunduran Praja Mangkunegaran.

Selain buku tersebut, juga ada buku lain yang membahas mengenai Praja Mangkunegaran yaitu buku yang berjudul *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran*, 1986, yang masih merupakan karya Abdul Karim Pringgodigdo. Isi buku ini dalam bagian pertamanya membahas mengenai awal kemajuan perekonomian Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV. Bagian kedua menerangkan merangkan mengenai awal terjadinya krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V serta kebijakan-kebijakannya. Sedangkan pada bagian ke tiga, buku ini membahas mengenai mulai ikut campurnya pemerintah Kolonial Belanda dalam menentukan kebijakan ekonomi di Mangkunegaran.

Karya yang membahas tentang sejarah perkebunan di Indonesia yaitu karya Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo yang berjudul *Sejarah Perkebunan*

Indonesia (Suatu Kajian Sosial Ekonomi), berusaha untuk mengungkap dan memaparkan permasalahan seputar perkebunan di Indonesia terutama perkebunan rakyat dengan berbagai pemecahannya. Dimulai dari periode awal pertumbuhan perkebunan (1660-1870) pada bagian pertama, dan perkembangan perkebunan (1870-1950) sampai pada periode 1956-1980-an pada bagian kedua, sehingga mempermudah untuk memahami perkembangan perkebunan di Indonesia, termasuk perkebunan di wilayah Praja mangkunegaran pada khususnya.

Kapitalisme Bumi Putra; Perubahan Masyarakat mangkunegaran, karangan Wasino. Buku ini memaparkan mengenai kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Praja Mangkunegaran yang berupa tanah, perusahaan, pabrik dan perkebunan sehingga Praja Mangkunegaran mencapai kesuksesan dalam bidang perekonomian. Buku ini lebih menitik beratkan mengenai perkebunan tebu atau pabrik gula sebagai salah satu bagian dari kesuksesan perekonomian Praja Mangkunegaran. Di samping itu juga membicarakan mengenai krisis dan kemunduran ekonomi di Praja Mangkunegaran. Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus sebagai penunjang penelitian ini, karena dengan buku ini sedikit banyak dapat diketahui seberapa besar penurunan perekonomian Praja Mangkunegaran pada saat terjadinya krisis ekonomi di Praja mangkunegaran masa Mangkunegaran V.

Buku karangan Sigit Wahyudi, yang berjudul *Dampak Agro Industri di Daerah Persawahan di Jawa*, memaparkan mengenai awal pertumbuhan perkebunan sebagai agro industri di Indonesia dan juga sistem kolonialisme dan kapitalisme yang ditarapkan oleh pemerintah Belanda. Akibat dari sistem kolonialisme dan kapitalisme tersebut menjadikan rakyat sengsara terutama pada

golongan rakyat kelas bawah. Selain itu terjadi perubahan penanaman dalam tanah-tanah masyarakat, yang pada awalnya ditanami dengan tanaman-tanaman bahan pangan seperti padi dan palawija berubah menjadi tempat penanaman tanaman perkebunan seperti tebu dan kopi. Akibatnya masyarakat petani tidak dapat menanam tanaman pangan lagi secara maksimal di sawahnya karena tanah mereka digunakan sebagai tempat tanam tanaman perkebunan, sehingga menyebabkan masyarakat menderita kelaparan karena kekurangan bahan pangan.

Selain itu dalam buku ini juga memaparkan mengenai kebijakan dan politik kolonial Belanda dalam bidang perkebunan rakyat serta hubungan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitarnya. Hal itu karena dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat di sekitar wilayah perkebunan dan pabrik, maka pemerintah kolonial akan lebih mudah mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga pemerintah kolonial Belanda melakukan perbaikan hubungan terhadap masyarakat di sekitar daerah perkebunan dan pabrik.

Dari karya-karya di atas, maka penulis mencoba untuk mengungkap lebih lengkap lagi mengenai terjadinya krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran V, yang mengakibatkan ekonomi di Praja Mangkunegaran mencapai titik terendah sepanjang sejarah dari Praja Mangkunegaran. Sudah banyak penelitian mengenai Praja Mangkunegaran, tetapi hanya sedikit yang mengkaji mengenai masa Mangkunegara V. Salah satu penelitian mengenai masa Mangkunegara V adalah yang berjudul *Mangkunegara V 1881-1896, Seniman Besar Penampil Peran Penari Wanita dalam Teater Tradisional Wayang Orang*. Sedangkan mengenai ekonomi Praja Mangkunegaran terdapat penelitian yang berjudul *Pertumbuhan Perekonomian Mangkunega IV*.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah perlu didukung dengan metode, karena peranan sebuah metode dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting, karena berhasil atau tidaknya tujuan yang dicapai, tergantung dari metode yang digunakan. Di dalam hal ini, suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan obyek yang diteliti. Terkait dengan hal itu, Koentjoroningrat mengungkapkan bahwa, dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (dalam bahasa Yunani *methodos*) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹¹

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka metode yang digunakan adalah metode historis. Menurut Louis Gottschalk yang dimaksud metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dari pengalaman masa lampau.¹² Metode historis ini terdiri dari 4 tahap yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertama, adalah Heuristik yaitu suatu proses pengumpulan bahan atau sumber-sumber sejarah. Dalam proses ini penulis mengumpulkan bahan di perpustakaan Rekso Pustoko, karena di tempat tersebut banyak terdapat sumber-sumber primer yang sangat membantu dalam penulisan penelitian ini. Proses kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk mencari keaslian sumber yang diperoleh melalui kritik intern dan ekstern.¹³ Kritik intern

¹¹ Koentjaraningrat, 1983, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 7

¹² Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, edisi terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, hal. 32

¹³ Dudung Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, hal.58.

bertujuan untuk mencari keaslian isi sumber atau data, sedang kritik ekstern bertujuan untuk mencari keaslian sumber.

Proses ketiga adalah interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang dimunculkan dari data yang sudah terseleksi. Tujuan dari interpretasi adalah menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber atau data sejarah dan bersama teori disusunlah fakta tersebut ke dalam interpretasi yang menyeluruh.¹⁴ Proses terakhir dari metode sejarah adalah historiografi, yaitu menyajikan hasil penelitian berupa penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesa kisah yang bulat sehingga harus disusun menurut teknik penulisan sejarah.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer antara lain meliputi *Stadsblad* dan juga laporan-laporan yang berupa arsip pada masa Mangkunegara V. Sumber sekunder meliputi buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data atau sumber berupa studi dokumen dan studi pustaka.

1. Studi Dokumen

Dalam studi ini karena focus penelitian adalah peristiwa yang sudah lampau, maka salah satu sumber yang digunakan adalah sumber dokumen. Dokumen dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumen dalam arti sempit dan dokumen dalam arti luas. Menurut Sartono Kartodirdjo, dokumen dalam arti sempit adalah kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan seperti surat kabar,

¹⁴ *Ibid*, hal. 64.

catatan harian, laporan dan lain-lain.¹⁵ Di satu sisi dokumen dalam arti luas meliputi artefak, foto-foto, dan sebagainya. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen dalam arti sempit. Studi dokumen mempunyai arti metodologis yang sangat penting, sebab selain bahan dokumen menyimpan sejumlah besar fakta dan data sejarah, bahan ini juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, apa, kapan dan mengapa.¹⁶ Studi tentang dokumen bertujuan untuk menguji dan memberi gambaran tentang teori sehingga memberi fakta dalam mendapat pengertian historis tentang fenomena yang unik.¹⁷

Dokumen yang digunakan seperti surat keputusan, laporan-laporan, yang menggunakan bahasa Belanda dengan bertuliskan huruf latin, antara lain *Indisch Genootscap* mengenai rapat tahun 1886, dan dokumen lainnya. Dokumen lain yang berbahasa Jawa dan dokumen yang bertuliskan huruf Jawa kuna seperti laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran, Babad, Serat-serat mengenai Mangkunegara V.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai bahan pelengkap dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber pustaka yang digunakan hanya yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk menambah pemahaman teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian. Sumber pustaka yang digunakan antar lain : buku, majalah, surat kabar, artikel dan sumber lain yang memberikan informasi tentang tema yang diteliti.

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 98

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, 1982, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 97-122

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, 1983, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen "Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 47.

Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan di perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, perpustakaan Pusat Universita Sebelas Maret dan perpustakaan umum daerah Surakarta dan perpustakaan Monumen Pes Surakarta.

H. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis. Deskripsi analitis artinya menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-cirinya yang terdapat dalam fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Setelah itu dari sumber bahan dokumen dan studi kepustakaan, tahap selanjutnya adalah diadakan analitis, diinterpretasikan, dan ditafsirkan isinya. Data-data yang telah diseleksi dan diuji kebenarannya itu adalah fakta-fakta yang akan diuraikan dan dihubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis, berupa kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁸

Selain itu teknik yang digunakan untuk menganalisa data penelitian ini adalah analisa historis. Yaitu analisa untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomena historis pada ruang dan waktu tertentu. Tujuan dari teknik ini adalah agar penelitian ini tidak hanya menjawab apa, kapan, dan di mana peristiwa ini terjadi namun juga menjelaskan gejala sejarah sebagai kausalitas. Analisa ini kemudian disajikan dalam bentuk penulisan diskriptif.

¹⁸ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: yayasan Indayu, hal. 36

I. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran terperinci, skripsi ini disusun bab demi bab. Penyusunan ini dilandasi keinginan agar skripsi ini dapat menyajikan gambaran yang menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang beruntun.

Bab I : bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika skripsi.

Bab II : bab ini berisi tentang keadaan perekonomian pada masa akhir Mangkunegara IV, keadaan ekonomi pada awal masa pemerintahan Mangkunegara V sampai terjadinya krisis

Bab III: bab ini berisi tentang sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran, usaha-usaha untuk memperbaiki perekonomian Praja Mangkunegaran, campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam Praja mangkunegaran, kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang ekonomi di Praja Mangkunegaran.

Bab IV: bab ini berisi tentang dampak krisis ekonomi pada masa Mangkunegara V serta dampak dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Mangkunegara V beserta pemerintah kolonial Belanda bagi rakyat dan Praja Mangkunegaran.

Bab V : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PEREKONOMIAN PADA MASA AKHIR

MANGKUNEGARA IV SAMPAI AWAL MANGKUNEGARA V

Mangkunegaran merupakan kawasan *Vorstenlanden* dengan karakteristik yang cukup menarik. Praja Mangkunegaran terbentuk sejak terjadinya Perjanjian Salatiga yang menyepakati adanya kekuasaan khusus yang diberikan kepada RM Said pada tahun 1756, Praja Mangkunegaran menjadi wilayah setingkat kabupaten di bawah Kasunanan. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Mangkunegaran memperoleh tanah seluas 4000 karya yang berhak untuk dikelola, yang meliputi Keduwang, Laroh, Matesih, dan Gunung Kidul.¹⁹

Kekuasaan Praja Mangkunegaran terhadap wilayah-wilayah bawahannya sangat besar. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan struktur pemerintahan dari pusat sampai ke bawah. Meskipun demikian Praja Mangkunegaran tetap harus tunduk di bawah kekuasaan tertinggi yaitu Belanda dan Kasunanan. Akhirnya Praja Mangkunegaran dapat lepas dari kekuasaan Kasunanan pada masa Mangkunegara VI. Campur tangan pemerintah Belanda terhadap Praja Mangkunegaran dimulai sejak berdirinya Praja Mangkunegaran. Secara bertahap kondisi tersebut mulai berubah ketika pada masa Mangkunegara IV (1853-1881), dimana terjadi pembaharuan terutama di bidang perekonomian dan pemerintahan. Pembaharuan yang dilakukan oleh Mangkunegara IV menjadikan Praja Mangkunegaran sebagai daerah setingkat kadipaten yang paling maju dan berkembang pada waktu itu.

¹⁹ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1983, *Swapraja*, Surakarta: Reksopustoko, hal. 6.

A. Keadaan Perekonomian Praja Mangkunegaran pada Masa Akhir Kekuasaan Mangkunegara IV

Mangkunegara IV mulai memerintah Praja Mangkunegaran pada tanggal 25 Maret 1853 ketika beliau berusia 43 tahun. Ia dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1818 sebagai Pangeran Hadiwijoyo I, menikah dengan putri Mangkunegara II dari garwa padmi, dan sebelum diangkat menjadi Mangkunegara IV ia menikah lagi dengan Raden Ayu Dunuk, putri tertua Mangkunegara III dari garwa padmi juga. Tahun 1857, tepatnya pada tanggal 16 September dijadikan Prangwadono, sebelum ia bernama Raden Mas Gondokusumo. Kemudian dia ditetapkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara IV.²⁰

Awal pemerintahannya, Mangkunegara IV sudah mengambil suatu kebijakan yang sangat luar biasa yaitu ingin mengambil kembali tanah-tanah *lungguh* yang disewa oleh bangsa Eropa dan juga sebagai gaji para pangeran dan juga abdi dalem. Akhirnya tindakan tersebut dapat terlaksana meskipun mendapat pertentangan dari pihak keluarga istana. Semua tanah-tanah *lungguh* ditarik kembali dan dikuasai oleh Praja Mangkunegaran sehingga semua kerabat raja dan narapraja, baik sipil maupun *legiun* yang memegang tanah *lungguh* tidak lagi menerima tanah *lungguh* sebagai gaji tetapi diganti dengan uang sebagai gaji tiap bulannya.²¹

Meskipun Mangkunegara IV menghapuskan sistem *lungguh*, tetapi tidak secara langsung menyeluruh sistem tersebut dihapuskan tetapi secara berkala. Bahkan kerabat keluarganya masih mendapatkan tanah *lungguh*nya sebagai akibat

²⁰ Anonim, tanpa tahun, *Lelampahanipun Mangkunegara IV*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hlm 2.

²¹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1986, *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hlm 2.

dari kebiasaan para pendahulunya untuk memberi *lungguh* kepada keluarga dan abdi dalem. Sikap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1857 terhadap persewaan tanah di daerah Swapraja, memberikan dorongan kepada Mangkunegara IV untuk terus menghapuskan sistem *lungguh* di daerah Praja Mangkunegaran. Disebutkan bahwa yang diperbolehkan menyewa tanah hanyalah orang Eropa, sedangkan orang Cina, orang Arab dan orang-orang Asia lainnya jelas dilarang.²²

Seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang pesat terjadi pada masa Mangkunegara IV (1853 – 1881). Hal itu karena Mangkunegara IV mempunyai bakat berorganisasi serta mempunyai pemikiran yang maju terutama dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri. Beberapa tahun setelah memegang tumpuk pemerintahan, Mangkunegara IV membangun basis ekonomi modern, yakni perkebunan dan industri gula. Lahan yang semula disewakan kepada para pengusaha Barat oleh para pemegang *lungguh* untuk industri perkebunan diambil alih dan dikembangkan sendiri sebagai basis ekonomi praja. Industri perkebunan tersebut meliputi perkebunan tebu dan kopi, yang mana pada saat itu kedua tanaman tersebut mempunyai harga yang tinggi di pasaran Eropa.

Perkebunan merupakan sektor yang penting bagi perekonomian di Hindia Belanda terutama sejak masa Tanam Paksa (1830-1870) hingga awal abad XX. Mulai pertengahan abad XIX di daerah *Vorstenlandan* telah tercatat sebanyak 47 perusahaan dan tahun 1890 an melonjak jauh menjadi 102 buah.²³ Pentingnya

²² *Staatsblad* 1857 No. 116

²³ Suhartono, 1991, "Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900", Yogyakarta: *Prisma*, hal 18

sektor perkebunan untuk meningkatkan perekonomian Praja Mangkunegaran, maka awalnya Mangkunegara IV memfokuskan kepada perkebunan kopi sebagai pendapatan yang paling penting. Pengembangan perkebunan kopi tersebut dilakukan dengan mengolah tanah liar, sebagian dengan menebang hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kopi. Akhirnya diperluas dengan cara eksploitasi pada kebun-kebun kopi yang awalnya dikelola oleh orang-orang Eropa karena tidak dapat membayar uang sewa. Hal itu karena pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) banyak kaum kapitalis menyewa tanah dalam jangka waktu yang panjang untuk dijadikan daerah perkebunan, terutama perkebunan kopi.²⁴

Seiring berjalannya waktu, perkembangan kopi di Praja Mangkunegaran mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan karena harga kopi ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri sehingga tidak terdapat ketetapan harga dan juga ketidakadilan dari pemerintah kolonial. Ketidakadilan tersebut karena perusahaan swasta mendapatkan kebebasan untuk menjual hasil kopinya ke pasar dunia secara langsung, sedangkan hasil perkebunan kopi Praja Mangkunegaran tidak boleh dijual secara bebas tetapi harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Usaha Mangkunegara IV untuk menaikkan harga kopi gagal karena terbentur dengan kebijakan pemerintah Belanda. Akibat dari hal tersebut, maka Mangkunegara IV mulai beralih pada tanaman tebu sehingga memperluas daerah penanaman tebu tersebut sebagai daerah perkebunan.

Pembangunan industri perkebunan, terutama perkebunan tebu oleh Mangkunegara IV merupakan pilihan yang rasional karena sejumlah alasan, yaitu:

²⁴ Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, 1991, *Kopi Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, hal, 15

1. Gula merupakan produk ekspor yang pada waktu itu sedang naik daun di pasaran dalam negeri maupun internasional.
2. Tanaman tebu sudah terbiasa ditanam di sejumlah tempat di wilayah Surakarta, termasuk Mangkunegaran yang diusahakan oleh para penyewa tanah bangsa Barat.
3. Sumber-sumber pendapatan praja secara tradisional melalui pajak dan persewaan tanah dirasa tidak mencukupi.²⁵

Selain ketiga faktor tersebut, faktor lain yang mendorong pembangunan industri Gula Mangkunegaran adalah kepentingan pihak trah Mangkunegaran untuk menunjukkan posisinya yang lebih menonjol dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan ketiga Praja Kejawen yaitu Kesunanan, Kesultanan, dan Pakualaman.

Akhirnya pada tahun 1861 tepatnya pada hari minggu tanggal 8 Desember 1861 Mangkunegara IV memerintahkan kepada seorang ahli yang berkebangsaan Jerman yang bernama R.Kamp untuk membangun pabrik gula di Malangjiwan dengan biaya pembangunan f400.000. Biaya tersebut diperoleh dari hasil keuntungan perkebunan kopi di Praja Mangkunegaran. Selain itu mendapat bantuan pinjaman dari Mayor Cina di Semarang Be Biau Tjwan, yang merupakan teman dekat Mangkunegara IV.²⁶ Kemudian pabrik gula tersebut dinamakan Colomadu oleh Mangkunegara IV yang mempunyai arti gunung madu.

Perkembangan perkebunan tebu yang sangat pesat di daerah Praja Mangkunegaran maka Mangkunegara IV kembali mendirikan pabrik gula di daerah Karanganyar, tepatnya di Malangjiwan. Pabrik tersebut bernama pabrik

²⁵ Wasino, 2008, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: LKiS, hal, 47

²⁶ *Ibid.*, hal, 49

gula Tasikmadu yang berarti lautan gula. Pembangunan pabrik gula tersebut juga dipimpin oleh R. Kamp sebagai administrator pabrik gula tersebut. Pembangunan pabrik tersebut dimulai pada tanggal 11 Juni 1871 dan selesai pada tahun 1874. Pabrik kedua ini lebih luas dibandingkan dengan pabrik Colomadu, sehingga kekuatan intinya digerakkan dengan air sedangkan mesin gilingnya menggunakan tenaga uap. Areal tanah perkebunan tebu pada awalnya hanya 140 hektar.²⁷

Selain kedua pabrik gula tersebut, Mangkunegara IV juga telah merintis usaha-usaha untuk menambah pendapatan Praja Mangkunegaran lain seperti:

1. Perusahaan penggilingan padi di desa Boga, yang tidak jauh dari ibu kota Surakarta.
2. Percobaan penanaman tembakau di daerah Wonogiri, tetapi hasilnya kurang memuaskan.
3. Penanaman kina dan teh di daerah kecamatan Tawangmangu, Karanganyar.
4. Pemeliharaan ulat sutra di daerah Tawangmangu juga.
5. Usaha persawahan di Demak.
6. Usaha tambak di Terboyo, Semarang
7. Persewaan rumah di Pindrikan Semarang.²⁸

Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Mangkunegara IV dalam bidang perekonomian, memang menguntungkan bagi Praja Mangkunegaran, tetapi juga mengandung resiko yang cukup fatal bagi kelangsungan perekonomian Praja Mangkunegaran itu sendiri. Pembaharuan

²⁷ Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih, 1993, "Perkebunan Tebu dan Petani di Mangkunegaran pada Masa Belanda", *Laporan Penelitian*, IKIP Veteran Sukoharjo, hal 14

²⁸ Soetono, 2000, *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran*, Surakarta, Rekso pustoko, hal 22-24

tersebut yang paling menonjol dan luar biasa adalah masuknya perekonomian Praja Mangkunegaran di pasaran dunia. Hal itu dilakukan supaya hasil-hasil perkebunan tidak lagi ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti pada perkebunan kopi sebelumnya, tetapi langsung mengikuti harga di pasar dunia.

Keuntungan dari pembaharuan tersebut yaitu ketika hasil produksi melimpah dan harga pasaran produk-produk perusahaan itu tinggi, maka keuangan Praja Mangkunegaran menjadi surplus sehingga dapat digunakan untuk menopang kelangsungan pemerintahannya. Akan tetapi dengan masuknya perekonomian Praja Mangkunegaran pada pasaran dunia, maka apabila keadaan pasar dunia sedang memburuk, secara tidak langsung dampaknya juga berpengaruh terhadap keuangan Praja Mangkunegaran. Kondisi yang demikian akan menjadi bumerang bagi Praja Mangkunegaran apabila pemegang tumpuk pemerintahan tidak dapat memajemen keuangannya secara baik.²⁹

Efek buruk dari diterapkannya perekonomian pasar bagi Praja Mangkunegaran ternyata menjadi kenyataan. Gejala tersebut sudah nampak pada masa akhir pemerintahan Mangkunegara IV. Berhubung persediaan dana masih cukup, maka roda pemerintahan masih tidak mengalami gangguan. Akan tetapi setelah Mangkunegara IV meninggal dan digantikan oleh putranya, Mangkunegara V, maka keuangan Praja Mangkunegaran mengalami defisit. Bahkan mempunyai banyak hutang kepada pemerintahan Belanda yang akhirnya membuat Praja Mangkunegaran di ambang kehancuran.

²⁹ Wasino, 1994, "Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran", *Tesis*, Pascasarjana UGM, hal 152

B. Keadaan Perekonomian Praja Mangkunegaran pada Masa Mangkunegara V

1. Latar Belakang Kehidupan Pemerintahan Mangkunegara V

Mangkunegara V lahir pada jam 24.00 malam, senin Legi 27 Rajab tahun Dal mangsa Dhrestha wuku Mandakungan Windu Kuntoro 1783 atau 16 April 1855 dari pasangan Mangkunegara IV dengan garwa padmi KBR Ay Adipati Mangkunegara IV dengan nama kecilnya RM Sunito.³⁰ Kelahirannya diumumkan dengan bunyi gending kehormatan Monggang dan dentuman meriam sembilan kali. Pada bulan Juli 1869 diangkat menjadi Pangeran Anom dengan Gelar KGPA Prabu Prangwadono, menggantikan kedudukan KGPA Prabu Sudibya (kakaknya) yang meninggal satu tahun sebelumnya. Bersamaan dengan pengangkatan tersebut, ia menerima pangkat Letnan Ajudan I dari pemerintah Belanda.³¹ Pada Tahun 1874 KGPA Prabu Prangwedana dinaikkan pangkatnya oleh Pemerintah Belanda menjadi Mayor Ajudan.

Tahun 1877 ia dinikahkan dengan RA Kusmardinah, putri PA Hadiwijaya III di Surakarta. Sehubungan dengan wafatnya Mangkunegara IV pada tahun 1881, di tahun itu juga KGPA Prabu Prangwedana diangkat menggantikan kedudukan ayahnya dan bergelar KGPA Prabu Prangwedana V. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Belanda melalui Residen Surakarta C.A.L.J. Jekel, ia dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel Komandan Legiun

³⁰ Hilmiyah Darmawan Pontjowolo, 1996, *Peringatan 100 Tahun Wafatnya KGPA Mangkunegara V*, Surakarta: Reksopustoko, hal 1

³¹ *Serat Pemutan Lelampahan Dalem KGPA Mangkunegara V*, Surakarta: Rekso Pustaka, hal 2.

Mangkunegaran.³² Meskipun mendapat gelar tersebut secara resmi KGPA Prangwedana V mendapat gelar KGPA Mangkunegara V hanya selama dua tahun. Hal itu karena untuk kepala yang memerintah pada nama dan gelar ditambah dengan Adipati menjadi Pangeran Adipati Aria Prangwedana, dan jika telah mencapai usia 40 tahun baru dapat diberikan nama dan gelar Pangeran Aria Mangkunegara.³³ Alasan tersebut dihubungkan dengan adat Islam di mana Nabi, baru mendapatkan wahyu yang pertama setelah berumur 40 tahun.³⁴

Sejak berdirinya tahun 1757 di bawah pemerintahan Mangkunegara I (1757-1796) sampai pemerintahan Mangkunegara V, Praja Mangkunegaran masih berstatus vasal dari pemerintah Belanda dan Kasunanan. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pergantian dan pengangkatan penguasa Mangkunegaran harus mendapat persetujuan dari keduanya. Pemerintah Belanda selalu berusaha untuk melepas Praja Mangkunegaran dari vasal Sunan menjadi daerah yang otonom penuh. Sebaliknya, pihak Sunan selalu berusaha untuk mempertahankan Praja Mangkunegaran dari kekuasaannya. Usaha pemerintah Belanda tersebut baru menampakkan hasilnya pada masa pemerintahan Mangkunegara IV. Pada masa pemerintahan Mangkunegara V telah dirasakan dapat menuju kemerdekaan, dan akhirnya benar-benar terlaksana pada tahun 1896, awal dari pemerintahan Mangkunegara VI (1896-1916).³⁵ Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Praja Mangkunegaran tersebut faktor utamanya adalah dari

³² *Ibid.*, hal 1

³³ Husein Djajadiningrat diterjemahkan oleh Sarwanta Wiriasuputra, 1978, *Nama-nama Prangwedana dan Mangkunegara*, Surakarta: Rekso Pustaka, hal 6

³⁴ *Ibid.*, hal 7

³⁵ Abdul Karim Pringgodigdo, 1939, *Doemadosipoen saha Ngrembakanipun Pradja Mangkoenegaran*, Surakarta: Reksopustoko, hal 25-26

faktor ekonomi. Hal itu karena Praja Mangkunegaran sangat maju, di samping hasilnya dapat menambah kas Praja Mangkunegaran juga menambah kas Pemerintah Belanda.³⁶

Sikap Pemerintah Belanda terhadap Praja Mangkunegaran sangat berbeda dengan istana-istana lainnya di daerah *Vorstenlanden*, bahkan mempunyai kedudukan istimewa dari pada yang lainnya. Keistimewaan itu meliputi pemberian kelonggaran-kelonggaran bagi Praja Mangkunegaran, seperti dalam bidang administrasi pemerintahan, peradilan dan wilayah kekuasaan. Meskipun setiap hari Senin dan Kamis Mangkunegara V berkewajiban *seba* (hadir) menghadap Sunan, ia telah mempunyai hak untuk mengatur administrasi pemerintahan sendiri seperti mengangkat *abdi dalem* dan tentara. Mangkunegara V berhak dan mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan para abdi dalemnya, kecuali *abdi dalem* Bupati Patih harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Sunan.

Di bidang keprajuritan, atas perintah Gubernur Jenderal Deandels pada masa pemerintahan Mangkunegara II tahun 1809 dibentuk Legiun Mangkunegaran, dan Mangkunegara sebagai komandannya langsung. Sampai masa pemerintahan Mangkunegara V tercatat ada 1150 prajurit di Legiun Mangkunegaran, yang meliputi 900 orang infantri, 200 orang kavaleri, dan 50 orang artileri berkuda.³⁷ Legiun Mangkunegaran ini pun mendapat subsidi dari pemerintah Belanda karena ide pembentukan legiun ini adalah ide dari Pemerintah Belanda. Kebijakan tentang kemiliteran ini merupakan satu hal

³⁶ Bandung Gunadi, 1992, "Mangkunegara V 1881-1896, Seniman Besar Penampil Peran Penari, Wanita dalam Teater Tradisional Wayang Orang", *Skripsi*, FSSR Universitas Sebelas Maret, hal 27

³⁷ *Ibid.*, hal 21

yang menyebabkan perubahan sikap dan tata upacara yang dilakukan Mangkunegara V terhadap Sunan. Legiun ini nantinya akan banyak melaksanakan tugas membantu Belanda diantaranya dalam penyerangan Yogyakarta tahun 1812, Perang Diponegoro tahun 1825-1830 dan Perang Aceh tahun 1873-1874.³⁸

Bidang pengadilan di Praja Mangkunegaran mempunyai dua pengadilan yaitu pengadilan pradata dan pengadilan surambi. Pengadilan pradata adalah pengadilan yang mengurus masalah kriminal yang dilakukan oleh rakyat, abdi dalem, dan sentana dalem yang bersalah. Sedangkan pengadilan surambi adalah pengadilan yang memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Praja Mangkunegaran dalam memutuskan segala perkara berdasarkan buku hukum *Angger-Anggeran* yang dibentuk tahun 1817, kemudian di tahun 1818 disempurnakan menjadi *Nawala Pradata*. Untuk memutuskan segala perkara dalam pengadilan-pengadilan tersebut dipegang langsung oleh Mangkunegara, bahkan bila perlu dapat bermusyawarah dengan residan.³⁹

Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan pemerintah Belanda tersebut memberikan Praja Mangkunegaran kelonggaran-kelonggaran untuk menentukan sikapnya. Praja Mangkunegaran lebih bersikap terbuka terhadap pengaruh asing dan menjadi pembuka jalan, penunjuk ke jalan-jalan yang lebih baru tanpa mengubah sifat kejawennya. Hal itu ditandai dengan meniadakan hormat keraton, menghilangkan jongkok, dan merubah tata rambut dari pria yang

³⁸ Ricklefs, M.C, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hal 244

³⁹ *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1874*: 209

juga tidak mengurangi pada hakekat Jawa tetapi sebagai pembuka ke arah yang modern.⁴⁰

Akibat keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda terhadap Praja Mangkunegaran tersebut, maka terjadi kemerosotan kewibawaan di kalangan kaum bangsawan. Bahkan pada periode tersebut muncul elit baru yang gaya hidup kesehariannya seperti kaum bangsawan Jawa. Mereka mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsawan Jawa tersebut. Elit baru tersebut merupakan orang-orang Belanda.⁴¹ Selain itu, juga terjadi stratifikasi sosial masyarakat di Hindia Belanda berdasarkan pada ras. Wujud stratifikasi sosial tersebut ialah orang-orang Eropa mempunyai status teratas dalam masyarakat (terutama bangsa Belanda) kemudian disusul oleh orang Indo dan Timur Asing dan status yang paling bawah adalah orang pribumi. Akibat munculnya elit baru dan stratifikasi sosial masyarakat tersebut maka terjadi krisis kekuasaan Jawa, termasuk di dalam Praja Mangkunegaran. Kelas aristokrasi akhirnya secara turun-temurun menjadi pegawai orang biasa.⁴² Akhirnya orang-orang Belanda pun hampir mempunyai kesamaan kewibawaan terhadap para petinggi istana. Bahkan untuk setingkat Gubernur Jenderal dan residen bisa dikatakan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan seorang raja.

Dampak dari stratifikasi sosial tersebut ialah banyak orang-orang Eropa terutama dari kalangan pemerintahan ikut campur dalam hal ketatanegaraan. Hal itu nampak jelas pada waktu Praja Mangkunegaran dipimpin oleh Mangkunegara

⁴⁰ Rinkes, D.A, *Mangkunegaran*, Surakarta: Rekso Pustaka, hal 3

⁴¹ Burger, D.H, 1983, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara, hal 49

⁴² Heather Sutherland, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, hal 7

V. Pada waktu Praja Mangkunegaran terjadi krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian Praja Mangkunegaran. Akibat dari krisis tersebut penguasaan dan pengawasan perekonomian Praja Mangkunegaran berada di tangan *Superintenden*. Mangkunegara V tidak dapat berbuat apa-apa akibat dari krisis ekonomi dan campur tangan pemerintah Belanda sampai-sampai kehidupan pribadi Mangkunegara V pun diatur oleh *Superintenden* tersebut.

2. Keadaan Ekonomi Praja Mangkunegaran Pada Masa Awal Kekuasaan Mangkunegaran V Sampai Terjadinya Krisis Ekonomi

Mangkunegara V sangat menghormati dan menjunjung tinggi ayahnya yaitu Mangkunegara IV. Hal itu terlihat setelah naik tahta menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa di Praja Mangkunegaran, Mangkunegara V hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh ayahnya dahulu. Akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan Praja Mangkunegaran tidak banyak mengalami perkembangan, melainkan justru mengalami suatu kemunduran yang hampir membuat Praja Mangkunegaran ke arah kehancuran. Sebenarnya pada saat Mangkunegara V naik tahta menggantikan ayahnya, merupakan masa yang sulit untuk seorang Mangkunegara untuk memerintah di Praja Mangkunegaran.

Bahkan Residen CALJ Jeekel yang pada saat itu menjadi residen di Surakarta menulis laporan kepada pemerintah Belanda diantara berbunyi "... baginya, raja yang baru, KGPA A Prangwedana V akan dibutuhkan konsentrasi dan kerja keras yang luar biasa untuk dapat menapak tilasi langkah-langkah dari ayahnya di segala bidang ia sangat menyadari itu dan kesungguh-sungguhan untuk melaksanakannya sehingga saya berharap ia akan berfungsi dan berhasil

menjadi pemimpin dari kerabat dan Praja Mangkunegaran dan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang akan menyulitkan pemerintah.”⁴³

Kesulitan dalam memerintah Praja Mangkunegaran tersebut dikarenakan oleh terjadinya krisis ekonomi pada masa pemerintahan akhir Mangkunegara IV. Selain itu pengangkatan Prangwedana untuk memimpin Praja Mangkunegaran relatif masih muda. Umurnya yang masih muda cenderung mempunyai sikap dan gaya hidup yang masih suka berfoya-foya, masih mementingkan kesenangan pribadinya seperti kesenangan dalam berburu di hutan Kethu di daerah Wonogiri. Akibat dari kesenangan-kesenangan pribadinya tersebut maka Mangkunegara V tidak mengurus masalah Praja Mangkunegaran secara langsung terutama dalam bidang administrasi keuangan. Urusan istananya diserahkan kepada patih dan keluarganya sehingga banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang dekat Mangkunegara V tanpa sepengetahuan beliau.

Meskipun begitu, pada awal pemerintahan Mangkunegara V penghasilan Praja Mangkunegaran masih cukup baik meskipun telah terjadi krisis global. Hal itu karena kas Praja Mangkunegaran sepeninggalan Mangkunegara IV sangat besar. Kas tersebut diperoleh dari dua pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu serta pabrik-pabrik yang lainnya. Akan tetapi penghasilan dan kas Praja Mangkunegaran itu kurang dimanfaatkan secara efisien oleh Mangkunegara V. Hal itu karena terbawa usia Mangkunegara V yang masih muda maka ia masih banyak menuruti kehendak pribadinya. Di bawah ini tabel penerimaan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran pada tahun 1882 dan tahun 1883.

⁴³ Hilmiyah Darmawan Pontjowolo, *Op.Cit.*, hal 6

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Praja Mangkunegaran Tahun 1882⁴⁴

Keterangan	Gulden (f)			
	Penerimaan		Pengeluaran	
Jumlah uang tahun 1881	60.977	81½		
Penerimaan dari Kasunanan Surakarta dalam pembayaran panen tahun 1881	357.900			
Penerimaan dari Kasunanan Surakarta dalam pembayaran panen tahun 1882	1.000.000			
Penerimaan dari pabrik gula	300.000			
Penerimaan macam-macam dari bulan Januari sampai September 1882	235.338	78		
Pembayaran kas negara			992.144	80
Pembayaran perlengkapan			845.739	23
Jumlah	1.954.216	59½	1.837.884	03
Pengeluaran tiap tahun	1.837.884	03		
Jumlah sisa	116.332	56½		

Sumber: diolah dari Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, *MN V*, no arsip: 64

⁴⁴ *Arsip Mangkunegaran V* no 64 tentang "Laporan Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1882", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran

Tabel 1.2
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran keuangan
Praja Mangkunegaran Tahun 1883⁴⁵

No	Keterangan	Gulden (f)			
		Penerimaan dalam satu tahun		Pengeluaran dalam satu tahun	
1.	Penanggalan / kalender dari kantor Surakarta	53.457	42		
2.	Penjualan hasil kopi sebanyak 67.000 dacin ⁴⁶	1.675.000			
3.	Penjualan hasil gula sebanyak 62.000 dacin	840.000			
4.	Pajak tanah dari penyewa tanah (orang-orang Belanda)	147.559	43½		
5.	Penerimaan macam-macam	74.331	97½		
1.	Biaya makan Mangkunegara tiap bulan			120.000	
2.	Biaya makan ibu Mangkunegara tiap bulan			12.000	
3.	Pengeluaran kas untuk raja			480.000	
4.	Pengeluaran bagian konsumsi / koki			262.977	90
5.	Pengeluaran kas negara			240.052	92
6.	Pengeluaran untuk Kartipraja / pekerjaan umum			12.000	
7.	Pengeluaran untuk Reksowilopo / bagian surat menyurat			60.000	
8.	Pengeluaran untuk usaha-usaha negara			1.000.000	
Jumlah		2.790.348	83	2.187.030	82
Pengeluaran tiap tahun		2.187.030	82		
Sisa		603.318	01		

Sumber: diolah dari Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, *MN V*, no arsip: 63

⁴⁵ *Arsip Mangkunegaran V* no 63 tentang "Laporan Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1883", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran.

⁴⁶ 1 dacin = 62½ kg

Kedua tabel di atas memaparkan mengenai pendapatan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran selama dua tahun kekuasaan Mangkunegara V yaitu tahun 1882 dan 1883 yang merupakan tahun-tahun awal Mangkunegara V berkuasa. Dalam kedua tabel tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal pengeluaran dan pemasukannya serta terdapat persamaannya. Perbedaannya nampak pada pengeluaran tahun 1882 tidak terlalu terperinci seperti pada tahun 1883. Dimana dalam tahun 1883 pengeluaran Praja Mangkunegaran sudah terperinci sebegitu jelas sehingga mempermudah dalam pertanggungjawabannya. Berbeda laporan keuangan pada tahun 1882 pada laporan pengeluarannya yang masih belum jelas dan terperinci.

Tabel-tabel mengenai laporan keuangan Praja Mangkunegaran tersebut dalam pemasukannya masih didominasi dari penjualan hasil-hasil perkebunan terutama perkebunan kopi dan tebu. Pada tahun 1882 dan 1883 pemasukan keuangan Praja Mangkunegaran dari sektor perkebunan semuanya berjumlah f 2.815.000,- yang diperoleh dari hasil perkebunan kopi dan tebu. Pemasukan merupakan terbesar dibandingkan dengan pemasukan yang lainnya. Selain itu pemasukan antara tahun 1882 dengan 1883 mengalami kenaikan yang cukup besar terutama pada tahun 1883. Kenaikan-kenaikan tersebut selain dari sektor perkebunan juga dari pajak sewa tanah yang dibebankan kepada orang Belanda yang mencapai f 147.559,43½,-.

Berdasarkan tabel di atas terjadi penambahan pemasukan yang membuat keuangan Praja Mangkunegaran juga bertambah di bawah pemerintahan Mangkunegara V pada masa awal-awal pemerintahannya. Meskipun demikian antara pemasukan dan pengeluaran di Praja Mangkunegaran sama-sama hampir

seimbang sehingga jumlah sisanya pun tetap sedikit. Hal itu terbukti di tahun 1882 jumlah pemasukan sebesar f 1.954.216,59½, dan jumlah pengeluaran tiap tahunnya juga besar yaitu f 1.837.884,03. Akibatnya sisa uang untuk pemasukan Praja Mangkunegaran hanya f 116.332,56½, angka yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pemasukannya. Kejadian yang sama juga terjadi ditahun selanjutnya yaitu tahun 1883, pemasukan yang besar tetapi pengeluaran yang besar juga. Jumlah pemasukan di tahun 1883 sebesar f 2.790.348,83 dan jumlah pengeluaran tiap tahunnya f 2.187.030,82 sehingga di tahun tersebut sisa uang untuk keuangan Praja Mangkunegaran hanya sebesar f 603.318,01. Meskipun terjadi peningkatan jumlah sisa uang untuk keuangan Praja Mangkunegaran, tetapi jika dilihat dari jumlah pemasukan dan pengeluaran merupakan jumlah yang sangat kecil.

Meskipun Mangkunegara V meneruskan politik ayahnya di bidang perdagangan, industri, dan sistem *apanage*, tetapi ia tidak memiliki kekuatan dan keberanian sehingga ia dimusuhi oleh para anggota keluarganya. Ia tidak bisa dianggap sebagai raja yang jelek dan penyebab kemunduran di Praja Mangkunegaran karena semua itu di luar kekuasaannya. Nasib telah membuatnya berkedudukan sangat tinggi, sehingga ia harus meninggalkan lingkungan keluarganya untuk menjadi orang pertama di negaranya dengan semua akibatnya. Berkuasanya Mangkunegara V atas Praja Mangkunegaran yang akhirnya menjadikan masa tergelap atas sejarah Praja Mangkunegaran.

Melihat keadaan pemerintahan dan keuangan Praja Mangkunegaran yang seperti itu, pepatih dalem ingin mengadakan perubahan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Sifat Mangkunegara V yang kolot sehingga menolak

diadakannya perbaikan dan perubahan di dalam Praja Mangkunegaran. Sekali lagi penolakan oleh Mangkunegara V tersebut karena ia sangat menghormati dan menjunjung tinggi ayahnya yaitu Mangkunegara IV. Mangkunegara V hanya berprinsip bahwa segala sesuatu yang dibangun oleh ayahnya tidak boleh dirubah melainkan hanya melestarikannya. Akibat dari prinsip tersebut maka pembangunan dan kemajuan Praja Mangkunegaran tidak mengalami kemajuan bahkan mengalami kemunduran.

Awal pemerintahan Mangkunegara V tahun 1881 pemerintah Belanda membuat peraturan bahwa bangsa Belanda sejak saat itu diperbolehkan menyewa tanah di daerah-daerah pesisir utara pulau Jawa dan tanah-tanah di daerah Kraton Surakarta maupun Yogyakarta. Akibat dikeluarkannya peraturan tersebut maka bangsa Belanda banyak membuka perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kopi, tebu, dan nila sehingga banyak didirikan pabrik kopi, gula, dan nila. Untuk memudahkan transportasi pada tanggal 14 Maret 1882 dibuka jalan kereta api jurusan Paron – Sragen – Surakarta, sehingga hubungan antara Surakarta dengan Surabaya dan Kediri menjadi lancar.⁴⁷

Meskipun pembuatan jalur kereta api tersebut dapat lebih meningkatkan dan mempermudah peningkatan ekonomi terutama dalam bidang transportasi perkebunan, tetapi pemerintahan Mangkunegara V sudah menunjukkan suatu kemunduran menuju ke arah kehancuran Praja Mangkunegaran. Hal itu karena meskipun warisan dari Mangkunegara IV sangat besar yang diperoleh dari laba perusahaan-perusahaan perkebunan yang awalnya diatur dan diawasi dengan baik diteruskan oleh seorang raja yang baik hati tetapi lemah. Selain itu dikendalikan

⁴⁷ Suhomatmoko, tanpa tahun, *babad ringkasan Padatan Kanjeng Gusti Adipati Aria Mangkunegara I – VI*, Surakarta: Rekso Pustaka, hal 114

dari belakang oleh ibunya yang sering sekali mendapat bisikan-bisikan dari para pembesar istana dan keluarga raja. Tujuannya ingin mendapat keuntungan sendiri atas kekayaan Praja Mangkunegaran.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mangkunegara V selalu dipengaruhi oleh pihak keluarga termasuk dalam hal keuangan. Meskipun demikian pada awal pemerintahan Mangkunegara V keuangan Praja Mangkunegaran dapat memenuhi semua kebutuhan istana baik raja, keluarga raja, abdi dalem, dan pegawai-pegawai yang bekerja di Praja Mangkunegaran. Bahkan atas tercukupinya semua kebutuhan istana Mangkunegaran tersebut pemerintah Hindia Belanda bertanya kepada Residen Surakarta apakah pada awal pemerintahan Prangwedana ini diperlukan suatu perbaikan-perbaikan. Pertanyaan itu pun dijawab oleh Residen Surakarta bahwa Praja Mangkunegaran tidak memerlukan suatu perbaikan-perbaikan karena semuanya telah berjalan dengan lancar, kepolisian telah diperbaiki, urusan gaji telah diatur dengan baik, terhadap produksi kopi tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan baru, kas praja terisi penuh, dan para nara praja semuanya tercukupi kebutuhannya.⁴⁸

Namun tidak lama setelah itu keadaanya berubah karena terjadi hama daun kopi yang mengganas dan menimbulkan kerusakan. Padahal dalam harian *de Locomotif* yang terbit pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 1881 menyatakan bahwa hama daun kopi sudah diberantas.⁴⁹ Hampir bersamaan dengan itu juga terjadi hama Sereh yang menyerang tanaman tebu yang menjalar sangat cepat mulai dari Jawa Barat sampai Selat Bali. Hama tersebut hampir membinasakan industri gula di pulau Jawa termasuk perkebunan-perkebunan gula di daerah Praja

⁴⁸ Abdul Karim Pringgodigdo, 1986, *Op.Cit.*, hal 58

⁴⁹ *Ibid.*

Mangkunegaran. Usaha-usaha untuk menanggulangi hama tersebut supaya tidak menjalar gagal dilakukan. Hal itu dikarenakan selain penyebarannya yang cepat dan dalam lingkup wilayah yang luas yaitu Pulau Jawa sampai Selat Bali juga dikarenakan terbentur dengan biaya yang besar untuk menanggulangi hama-hama tersebut. Akibat dari hal itu pemasukan uang kas Praja Mangkunegaran menjadi terus berkurang bahkan menjadi defisit dan mempunyai hutang.

Tabel 1.3

Penerimaan Uang Praja Mangkunegaran dari Tahun 1881-1886⁵⁰

Tahun	Gulden (f)	Keterangan
1881	2.225.402	
1882	2.265.132	
1883	2.689.763	
1884	2.142.355	
1885	1.409.879	
1886	601.699	
Jumlah Total	11.334.232	

Sumber: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, *MN V*, no arsip: 62

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan uang kas di Praja Mangkunegaran pada awal pemerintahan Mangkunegara V mengalami kenaikan sampai tahun 1883, dan pada tahun yang sama merupakan pemasukan yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Hal itu karena dari tahun 1881 sampai tahun 1883 produksi kopi dan gula masih bagus dan harga di pasaran dunia masih tinggi. Tetapi pada tahun 1884 penerimaan uang di Praja Mangkunegaran mengalami penurunan yang mencolok sebesar f 547.308, jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 1882 terdapat pemasukan dari perkebunan bungkil

⁵⁰ *Arsip Mangkunegaran V* no 62 tentang “Laporan Penerimaan Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1881 - 1886”, Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran

di Polokarto sebesar f 300.000, sehingga yang jumlah awal pemasukannya pada tabel 1.1 sebesar f 1.954.216,59 ½ menjadi f 2.254.216,59 ½ .⁵¹

Penurunan penerimaan keuangan tersebut disebabkan karena pada tahun 1884 adanya proteksi terhadap industri gula bit di Eropa sehingga produksi gula semakin banyak yang mengakibatkan harga gula menjadi tertekan yang akhirnya hasil penjualan tidak dapat menutupi biaya penanamannya.⁵² Selain itu terjadi hama Sereh yang menyerang tanaman tebu yang merugikan produksi gula dan juga terdapat hama yang menyerang tanaman kopi. Di mana kedua tanaman tersebut merupakan komoditas ekspor terbesar bagi Praja Mangkunegaran. Akibat dari penurunan keuangan Praja Mangkunegaran yang terus menerus akhirnya menimbulkan krisis di Praja Mangkunegaran pada tahun 1884. Sedangkan pemasukan pada tahun 1885 dan 1886 cenderung mengarah pada jumlah hutang yang digunakan untuk mengisi kas Praja Mangkunegaran yang digunakan untuk keperluan istana.

Pada tabel 1.3 terdapat perbedaan jumlah pemasukan maupun pengeluaran. Sebagai contoh pemasukan Praja Mangkunegaran pada tahun 1883 pada tabel 1.2 sebesar f 2.790.348,83 sedangkan pada tabel 1.3 jumlah pemasukan sebesar f 2.689.763, terdapat selisih kurang lebih sebesar f 110.685. Selain itu juga, pemasukan pada tahun 1882 pada tabel 2.2 juga mengalami selisih jika dicocokkan dengan jumlah pemasukan pada tabel 1.3. Ada beberapa kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah tersebut. Kemungkinan yang pertama perbedaan jumlah laporan keuangan tersebut memang disengaja karena terjadi korupsi di

⁵¹ *Arsip Mangkunegaran V* no 64 tentang “Laporan Penerimaan dan Pembayaran bulan Januari sampai September 1882”, Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran.

⁵² Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko, hal 1

dalam Praja Mangkunegaran. Hal itu karena Mangkunegara V tidak begitu memperhatikan mengenai keuangan Praja, sehingga sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Kemungkinan yang kedua yaitu terdapat pengeluaran luar biasa yang dilakukan oleh pihak Praja Mangkunegaran. Pengeluaran luar biasa yaitu pengeluaran yang tidak terduga dan tidak setiap tahun terjadi. Pengeluaran tersebut antara lain untuk perbaikan pabrik, pemberantasan hama penyakit, pembelian alat-alat pabrik dan lain sebagainya.⁵³ Kemungkinan pengeluaran luar biasa tersebut tidak dimasukkan dalam pembukuan keuangan di Praja Mangkunegaran karena sifatnya hanya sementara.

Jadi kondisi perekonomian Praja Mangkunegaran pada masa awal kekuasaan Mangkunegara V masih baik meskipun telah terjadi krisis ekonomi global pada masa akhir Mangkunegara IV. Hal itu karena Praja Mangkunegara masih memiliki uang kas yang sangat besar sepeninggalan Mangkunegara IV. Gaji raja, keluarga raja, abdi dalem, pegawai kepolisian, pegawai kehakiman, prajurit, dan lainnya masih dapat dibayar dengan rutin. Seiring berjalannya waktu perekonomian dan juga keuangan di Praja Mangkunegaran pada awal masa kekuasaan Mangkunegara V mengalami devisa anggaran. Hal itu karena pengeluaran yang dilakukan sangat besar tetapi tidak diikuti dengan pengembangan perekonomian.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Mangkunegara V tidak mau mengubah kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan ayahnya pada saat berkuasa. Dia tetap teguh hanya ingin menjalankan dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah diwariskan oleh ayahnya. Akibat dari cara pandang

⁵³ Wasino, *Op.Cit.*, 2008, hal 71

Mangkunegara V tersebut maka secara tidak langsung segala pengeluaran di Praja Mangkunegaran juga sangat besar. Hal itu karena pada masa Mangkunegara IV pun pengeluaran keuangan sangat besar tetapi penghasilan untuk menambah kas Praja Mangkunegaran pun juga sangat besar. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan sangat seimbang bahkan mengalami surplus kas Praja Mangkunegaran. Berbeda pada masa Mangkunegara V mengalami defisit keuangan kas Praja Mangkunegara karena pengeluaran sangat besar tetapi pemasukan sangat sedikit.

Akibat dari pengeluaran yang besar tanpa diimbangi dengan pemasukan yang besar pula maka seiring berjalannya waktu Praja Mangkunegaran mengalami defisit keuangan. Akhirnya menjadikan suatu krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran yang mengakibatkan kemunduran bahkan hampir mengalami kehancuran. Jadi masa Mangkunegara V merupakan masa terkelam dalam sejarah Praja Mangkunegaran karena mengalami kemunduran ekonomi, kehancuran perekonomian sampai titik terendah. Krisis tersebut merupakan ujian terberat bagi penguasa waktu itu yaitu Mangkunegara V. Selain itu terjadinya krisis di Praja Mangkunegaran juga disebabkan oleh faktor alam yaitu terjadinya hama yang menyerang tanaman tebu dan kopi.

Pemerintahan Mangkunegara V dalam menjalankan roda pemerintahan Praja Mangkunegaran meskipun mengalami kemunduran ekonomi di mana salah satu penyebabnya adalah sikap boros yang diterapkan oleh Mangkunegara V. Pemborosan keuangan Praja Mangkunegaran yang dilakukannya merupakan langkah perimbangan terhadap konteks sosial masyarakat pada waktu itu, yaitu bertujuan ke arah pembaruan dan kemajuan. Jadi Praja Mangkunegaran pada saat

diperintah oleh Mangkunegara V mengalami kemunduran di bidang ekonomi, namun di lain pihak juga mengalami kemajuan di bidang sosial yang berupa pembangunan sarana-sarana sosial. Bentuk-bentuk pembangunan di bidang sosial yang dilakukan oleh Mangkunegara V meliputi:

- a. Meningkatkan solidaritas kekerabatan Praja Mangkunegaran,
- b. Mendirikan pos-pos perjalanan, seperti di Banyuanyar, Jurug, Karanganyar, Bangsri, Nambangan, dan baturetno,
- c. Mendirikan balai pengobatan untuk kuda yang bertempat di Kampung Pasar Legi,
- d. Memperkenalkan lampu buatan Eropa, tromolnya terdiri atas 40 sampai 50 buah atau sering disebut *dilah sewu*, dan di pasang di Pendapa Agung.⁵⁴

⁵⁴ Sayid, tanpa tahun, *Kawentenanipun Praja Mangkunegaran ing Nalika Tahun 1870 dumugi 1915*, Surakarta: Reksopustoko, hal 1 – 9.

BAB III

KRISIS EKONOMI DI PRAJA MANGKUNEGARAN

A. Sebab-Sebab Terjadinya Krisis Ekonomi di Praja Mangkunegaran

1. Gaya hidup Mangkunegara V, korupsi dan manajemen keuangan di Praja Mangkunegaran.

Perekonomian di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV berkembang sangat pesat dan menjadikan Praja Mangkunegaran menjadi suatu daerah kadipaten yang sangat kaya meskipun masih di bawah kekuasaan Kasunanan. Setelah wafatnya Mangkunegara IV dan digantikan oleh putranya yang bernama Prangwedana yang akhirnya nantinya menjadi Mangkunegara V perekonomian Praja Mangkunegaran mulai mengalami kemunduran di awal pemerintahan Mangkunegara V. Kemunduran tersebut bahkan akhirnya menjadikan Praja Mangkunegaran mengalami krisis ekonomi dan mempunyai banyak hutang.

Naiknya Prangwedana menggantikan ayahnya sebagai Mangkunegara V sangatlah cepat dibandingkan dengan para raja pendahulunya karena pada waktu itu usia Prangwedana masih muda. Seperti diterangkan di depan bahwa seseorang diangkat menjadi Mangkunegara pada usia 40 tahun. Naiknya Prangwedana menjadi penguasa Praja Mangkunegaran pada usia muda, maka masih sering mengikuti kehendak pribadinya sehingga sifat dan gaya hidupnya masih suka bersenang-senang. Hal itu terlihat dengan kesukaannya terhadap berburu di hutan Kethu pada musim kemarau sampai menjelang musim hujan. Setiap hari Jumat

dan Minggu bermalam di pesanggrahan yang disebut pesanggrahan Seneng yang dibangun dekat dengan hutan Kethu.⁵⁵

Selain itu juga Mangkunegaran V suka dengan berkuda dan berkelana dengan kudanya tersebut serta juga menyukai anjing, bahkan banyak anjing yang dibeli dari manca negara. Bahkan anjing peliharaannya diberi makanan bestik, makanan yang mewah pada waktu itu.⁵⁶ Jenis binatang peliharaan lain yang disukai Mangkunegara V adalah burung, untuk peliharaan yang satu ini bahkan Mangkunegara V membangun sebuah gedung di sebelah timur gedung Prangwedana yang disebut Pantipurna. Bangunan ini dilengkapi dengan taman dan hiasan dengan deretan sangkar burung yang berisi bermacam-macam burung yang dibeli dari manca negara. Di belakang pura pun dibangun taman yang indah yang disebut taman Ujung Puri.⁵⁷ Taman itu diisi dengan berbagai jenis satwa hutan. Akibat dari kegemaran dan hobinya tersebut maka pengeluaran kas negara pun banyak digunakan untuk kesenangannya yang tidak bermanfaat untuk kemajuan Praja Mangkunegaran.

Awal Mangkunegara V berkuasa banyak orang-orang yang pada masa Mangkunegara IV terdesak kedudukannya ke belakang, kini tampil ke depan dan menduduki tempat yang penting dalam pemerintahan Mangkunegara V. Orang-orang tersebut antara lain yaitu ibunya sendiri yang merupakan putri tertua dari Mangkunegara III, istri kedua yang pandai dan penuh daya kerja dari Mangkunegara IV, yang memegang kendali pemerintahan atas nama putranya

⁵⁵ Suwadi Bastomi, 1996, *Karya Budaya KGPAA Mangkunegara I – VIII*, Semarang: IKP Semarang Press, hal 70

⁵⁶ Wasino, 1994, *Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran (Tesis)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 153

⁵⁷ Suwadi Bastomi, 1996, *Op.Cit.*, hal 71

dan dipegang dengan kuat. Dalam mengendalikan pemerintahan tersebut ibunya dibantu oleh patih dalem yang bernama Raden Tumenggung Joyosaroso yang selain pandai, rajin tetapi juga bersifat curang dan kikir.

Selanjutnya yaitu Pangeran Suryadiningrat putra Mangkunegara III dari selir, Pangeran Arya Hadiwijoyo, Pangeran Arya Gondosewiya, Pangeran Arya Gondoseputra serta saudara-saudara sepupu dari raja berlomba-lomba mencari keuntungan diri sendiri dengan cara seolah-olah berjasa bagi negara.⁵⁸ Cara tersebut antara lain seperti yang dilakukan oleh Pangeran Arya Gondosewiya yang merupakan kakak dari KGPAA Mangkunegara V memberikan saran kepada Mangkunegara V untuk mendirikan bangunan gedung pertemuan yang bernama gedung Kapedhak yang terletak di sebelah timur gedung induk (dalam Ageng). Selain itu juga dibangun gedung Balewarni dan gedung Pracimasana.

Gedung-gedung yang dibangun oleh Pangeran Arya Gandasewaya semuanya bertiang besi. Di sebelah timur Prangwedana dibangun lagi dua buah gedung dan sebelah selatan dibuat dari kayu berukir yang disebut Pantiwarna sedangkan bangunan di sebelah utara dibuat dari tembok dengan ubin marmer yang diberi nama Pantipurna.⁵⁹ Pembangunan tersebut menelan biaya yang sangat banyak serta sangat memungkinkan terjadinya korupsi di kalangan Praja Mangkunegaran. Hal itu karena tidak adanya arsip atau keterangan yang

⁵⁸ Nama Gondo merupakan trah dari keturunan Mangkunegara IV dengan nama kecil RM. Gondokusumo. Dalam hierarki pemerintahan Praja Mangkunegaran pemegang kekuasaan tertinggi adalah Mangkunegara dengan jabatan dalam kemiliteran tertinggi yaitu Letnan Kolonel Komandan. Dalam tradisi Praja Mangkunegaran pangkat Letnan Kolonel hanya diperuntukkan bagi Pangeran Prangwedana sebutan untuk Putra Mahkota. Pada masa Mangkunegara V jabatan di bawah Mangkunegara V adalah KPH. Gondosuputro yang berpangkat Letnan Kolonel Wakil Komandan. Pada waktu Mangkunegara V wafat secara tidak langsung kekuasaan dipimpin sementara oleh KPH. Gondosuputro sampai diangkatnya Mangkunegara IV.

⁵⁹ Suwadi Bastomi, 1996, *Log. Cit.*,

menjelaskan mengenai jumlah biaya pembangunan tersebut secara transparan dalam bentuk pembukuan.

Mangkunegara V tidak begitu memikirkan mengenai urusan istananya karena semua yang berhubungan dengan urusan istananya diserahkan kepada kepala urusan istana yang dijabat oleh Pangeran Gondoatmojo. Akibat dari itu urusan-urusan keuangan, perusahaan ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap dan serta pengawasan terhadap keuangan hanya dilakukan secara pura-pura sehingga banyak pejabat istana yang melakukan korupsi dan yang paling berperan besar dalam hal ini adalah Pangeran Gondoatmojo. Selain itu pepatih dalem pun tidak menerima bantuan dari Mangkunegara V sehingga keadaannya semakin parah yang akhirnya Mangkunegara V dijauhi oleh saudara-saudaranya, karena Mangkunegara V tidak pernah meminta nasehat kepada mereka, padahalnya ayahnya, Mangkunegara IV kadang-kadang meminta nasehat kepada mereka.

Selain itu pengeluaran yang terlanjur besar berdasarkan penghasilan yang besar pun menjadikan salah satu semakin memburuknya keuangan di Praja Mangkunegaran. Maksud dari pengeluaran yang terlanjur besar tersebut adalah pada zaman Mangkunegara IV, di mana keuangan Praja Mangkunegaran sangat erat kaitannya dengan dunia usaha dan mengalami konjungtur yang baik. Pada zaman seperti itu dapat dipahami bahwa semua pengeluaran meningkat karena Praja Mangkunegaran pada waktu itu memperoleh keuntungan yang besar dari perkebunan kopi dan pabrik gula. Penarikan tanah *apanage* sebagai gaji dan tunjangan bagi para pegawai awalnya memang memberatkan anggaran belanja negara, tetapi tidak menimbulkan kerepotan pada zaman yang makmur tersebut. Hal itu karena tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut menghasilkan

keuntungan yang berlipat ganda. Dengan diterimanya penghasilan yang besar dari kopi dan pabrik gula maka pengeluaran Praja Mangkunegaran tidak kurang dari f 1.500.000,- tiap tahun.⁶⁰

Masa Mangkunegara V tingkat pengeluaran seperti pada masa Mangkunegara IV tidak diturunkan, maka ketika perusahaan mengalami masa yang sulit sehingga terjadi devisa, bahkan sampai mempunyai beban hutang dan juga gaji para pegawai tidak dapat dibayar. Selain itu keadaan administrasi keuangan Praja Mangkunegaran juga sangat jelek karena tidak ada pemisahan antara keuangan raja dengan keuangan kerajaan dan keuangan perusahaan. Bahkan tidak ada pengawasan dan kontrol dari Mangkunegara V. Di mana pada masa Mangkunegara IV bukan merupakan suatu keharusan karena diurus secara intensif dan selalu diawasi dan dikontrol oleh Mangkunegara IV.⁶¹

2. Hama dan penyakit tanaman perkebunan

Masa Mangkunegara IV berkuasa, pendapatan Praja Mangkunegaran sangat besar yang didapat dari hasil-hasil perkebunan terutama perkebunan tebu dan kopi. Budidaya tanaman kopi di Praja Mangkunegaran sudah dilakukan sejak masa Mangkunegara I meskipun dalam lingkup yang masih kecil. Hal itu karena pada masa Mangkunegara I hingga III, tidak banyak membawa perubahan dalam bidang ekonomi karena pada awalnya orientasi pemerintah Praja terbatas dalam

⁶⁰ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 2

⁶¹ *Ibid.*, hal 3

upaya pemusatan dan pengokohan di bidang perkembangan hukum, daerah, maupun penyusunan pemerintahan.⁶²

Perkebunan kopi sudah ada sejak masa pemerintahan Mangkunegara IV yang telah melakukan penanaman kopi secara besar-besaran di daerah Bulukerta kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan daerah Ponorogo. Pada masa ini perkebunan kopi mengalami perkembangan pesat dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Praja Mangkunegaran yang paling besar. Pada waktu itu penanaman kopi selain diusahakan oleh pihak Mangkunegaran juga diusahakan oleh para pemegang *apanage* di tanahnya sendiri.⁶³ Pada tahun 1850 baru empat wilayah bagi penanaman kopi di Mangkunegaran, tetapi sejak pembebasan tanah-tanah *apanage* telah berkembang menjadi 24 wilayah. Penanaman kopi di 24 wilayah di Mangkunegaran ditangani secara serius dengan mendatangkan administratur kopi dari Eropa. Dari 24 wilayah itu, masing-masing dikepalai oleh seorang administratur yang bergelar panewu kopi atau mantri kopi. Di setiap daerah didirikan sebuah gudang untuk penampungan kopi dan sebuah “pesanggrahan” atau pos sebagai tempat tinggal.⁶⁴

Pengembangan tanaman kopi oleh Praja Mangkunegaran dilakukan karena harga tanaman kopi di dunia sangat tinggi dan juga didukung oleh wilayah Praja Mangkunegaran yang cocok untuk ditanami tanaman kopi, yaitu daerah Wonogiri dan Tawangmangu. Kedua daerah tersebut sangat cocok ditanami tanaman kopi karena tanaman kopi dipengaruhi oleh iklim, ketinggian tempat,

⁶² Abdul Karim Pringgodigdo, 1938, *Lahir Serta Timbulnya Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 22

⁶³ Soetomo Siswokartono, 2006, *Sri Mangkunegara IV sebagai Penguasa dan Pujangga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 169

⁶⁴ Soetono, 1987, *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, Kode Arsip 92, hlm 15

temperatur dan juga tipe curah hujan. Jenis kopi yang dibudidayakan pada waktu itu ada dua macam yaitu kopi Arabika dan kopi Robusta. Antara kedua jenis kopi tersebut masyarakat lebih memilih pembudidayaan jenis kopi Robusta. Hal tersebut karena tanaman kopi jenis Robusta lebih mudah pemeliharaannya dan lebih tahan terhadap penyakit karat daun.

Selain itu juga tempat penanaman kopi jenis Robusta lebih luas arealnya karena tanaman kopi Robusta dapat di tanam pada ketinggian 0 – 1000 m di atas permukaan air laut dan temperatur suhu tahunan 21°- 24°C. Sedangkan untuk penanaman kopi jenis Arabika hanya dapat di tanam pada ketinggian tempat 800 – 2.000 m di atas permukaan air laut dengan temperatur rata-rata tahunan 17° - 21° C.⁶⁵ Ketinggian tempat pada penanaman kopi sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan hasil biji, makin tinggi ketinggian tempat penanaman kopi maka makin lambat pertumbuhan kopi dan makin besar biji yang dihasilkan.

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi sangat banyak macamnya diantaranya yaitu penyakit karat daun (daun kopi) yang menyerang tanaman kopi pada bagian daun yang mengakibatkan daun menjadi gugur, menghambat proses fotosintesis.⁶⁶ Selanjutnya banyak cabang dan akar mati, sehingga tanaman tidak dapat mengambil hara dari tanah akibatnya hasil dari perkebunan kopi pun menjadi sedikit. Dari tahun 1870, penyakit karat daun (daun kopi) mulai menyebar dan produksi kopi jatuh sehingga dapat dikatakan penyakit ini menghentikan perkembangan perkebunan kopi di Hindia Belanda sampai antara tahun 1896 dan 1900 produksi kopi di wilayah Hindia Belanda merosot

⁶⁵ Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, 1991, *Kopi Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, hal, 20.

⁶⁶ *Ibid.*, hal, 30

menjadi 25% dari semula. Penyakit karat daun ini menyerang jenis kopi yang dibudidayakan pada waktu itu yaitu kopi Arabika, yang di luar negeri terkenal dengan sebutan kopi Jawa.⁶⁷ Akibat dari penyakit inilah kopi jenis Arabika yang yang awalnya di tanam di daerah Praja Mangkunegaran di ganti dengan kopi jenis Robusta yang lebih resisten terhadap penyakit karat daun.

Pada tahun 1879, *Hemilia Vestratrix* mulai berjangkit di Pulau Jawa, akan tetapi karena sebelum itu sudah pernah muncul, pemerintah kolonial mulanya tidak menganggap serius. Tetapi dalam jangka waktu dua tahun, hasil dari produksi kopi mengalami penurunan di seluruh wilayah pembudidayaan kopi dan Cirebon termasuk wilayah yang mendapat kerugian yang paling besar.⁶⁸ Para pejabat pribumi berusaha mencegah perluasan penyakit ini serta membatasi akibatnya dengan jalan mendorong para petani untuk menggarap tanah secara seksama, menggunakan pupuk buatan yang tepat serta memperbaiki sistem drainase perkebunan.⁶⁹

Timbulnya hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi di pulau Jawa bahkan sampai di selat Bali tidak terkecuali di wilayah Praja Mangkunegaran juga, menyebabkan produksi kopi di Praja Mangkunegaran menurun dan mengalami kerugian. Usaha-usaha untuk menanggulangi hama dan penyakit kopi tersebut terus dilakukan tetapi mengalami kegagalan. Produksi kopi di Praja Mangkunegaran pada tahun-tahun yang baik atau sebelum terjadi hama dan penyakit kopi dapat mencapai 80.000 sampai 90.000 pikul. Sedangkan pada

⁶⁷ Haryono Semaun, 1964, *Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 237

⁶⁸ Anne Both, 1988, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES IKAPI, hlm 255

⁶⁹ Widyasanti, 2008, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perkebunan Kopi Kerjogadungan di Karanganyar pada tahun 1916-1946", *Skripsi*, FSSR, Universitas Sebelas Maret, hlm 25

tahun pertama masa pemerintahan Mangkunegara V hanya dapat menghasilkan kopi sebanyak 14.000 pikul, di mana satu pikul mempunyai harga 25 gulden.⁷⁰

Jadi pada tahun yang baik Praja Mangkunegaran dapat memperoleh pemasukan dari perkebunan kopi sebanyak f 2.000.000, tetapi setelah hama dan penyakit menyerang perkebunan kopi, Mangkunegara mengalami penurunan hasil dari perkebunan kopi sebanyak 66.000 pikul dengan kerugian sebanyak f 1.650.000 tiap tahunnya, sehingga Praja Mangkunegaran hanya memperoleh pemasukan keuangan dari perkebunan kopi sebesar f 350.000 tiap tahunnya.

Selain penyakit perkebunan menyerang tanaman kopi juga terdapat penyakit dan hama lain yang menyerang tanaman tebu. Pada tahun 1882 hama tebu menyerang perkebunan tebu di Cirebon dan kemudian menyebar ke timur menyeberangi pulau Jawa dan mencapai ujungnya sampai tahun 1892.⁷¹ Tanaman tebu merupakan tanaman yang sangat penting dan merupakan komoditas ekspor terbesar bagi Praja Mangkunegaran bagi pasaran dunia di Eropa pada waktu itu. Menjalarnya penyakit *Sereh* yang menyerang tanaman tebu termasuk perkebunan di Praja Mangkunegaran baik di sekitar pabrik gula Colomadu maupun pabrik gula Tasikmadu mengakibatkan jumlah tebu yang dihasilkan tiap hektar menurun drastis dan kualitas yang dihasilkan tidak baik.

Penyakit *Sereh* ini mempunyai tanda-tanda di buku-buku tanaman tebu keluar semacam akar. Akar tersebut semakin lama akan semakin memanjang

⁷⁰ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 59

⁷¹ Ricklefs, M.C, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hal 270

kemudian akan tumbuh daun yang mirip dengan daun sereh.⁷² Penyakit ini sangat ditakuti karena sebenarnya keluarnya akar dan daun pada tanaman tebu tersebut adalah benalu. Adanya benalu tersebut maka dapat dipastikan bahwa makan yang lewat batang akan diserap oleh benalu sereh tersebut sehingga hasil tebu yang diperoleh sangat jelek dan bahkan mengalami kegagalan. Peristiwa ini merupakan pukulan yang berat bagi kelangsungan industri gula di Praja Mangkunegaran di masa itu.

Akibat dari hama tersebut pendapatan dari sektor industri gula menurun tajam. Harga gula turun dari f 15 per pikul menjadi 8 sampai 9 gulden per pikul, sehingga penerimaan penghasilan tiap tahun berkurang paling tidak sebesar f100.000.⁷³ Meskipun penerimaan praja dari sektor ini pada waktu itu masih bernilai sekitar 1¼ - 1½ ton emas, dan itu masih dalam perhitungan kasar.⁷⁴ Perhitungan kasar maksudnya uang sewa tidak dihitung karena rakyat yang bekerja di pabrik-pabrik gula tidak dibayar dengan uang melainkan dibayar dengan hak guna atas tanah. Dengan kata lain keuntungan pabrik gula tidak dapat menutupi biaya produksi yang sebenarnya. Bahkan pada tahun 1885 untuk keseluruhan wilayah di Jawa jumlah produksi gula hanya berjumlah 380.400 ton dan hanya meningkat sedikit pada tahun 1890 sebesar 400.000 ton.⁷⁵

⁷² Wahyu Muljana, 2001, *Cocok Tanam Tebu Dengan Segala Masalahnya*, Semarang: CV Aneka Ilmu, hal 21

⁷³ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Log.Cit.*,

⁷⁴ Wasino, 2008, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: LKiS, hal 55

⁷⁵ Ricklefs, M.C, *Op.Cit.*, hal 270

3. Krisis dunia

Terjadinya krisis dunia pada tahun 1880-an sangat berpengaruh terhadap perekonomian Praja Mangkunegaran, terutama pada hasil perkebunannya. Hal itu karena pada masa Mangkunegara IV hasil perkebunan tebu dan kopi dimasukkan ke dalam pasar dunia sehingga harga ditentukan oleh pasar dunia sehingga naik atau turunnya harga kopi dan gula tergantung oleh pasar dunia. Akibat dari krisis dunia tersebut terjadi proteksi terhadap *bit gula* di Eropa yang mengakibatkan peredaran gula dalam negeri menjadi lebih besar karena tidak dapat diserap dalam pasaran Eropa yang selama ini menjadi pasar utama produksi gula dari Jawa.⁷⁶ Oleh karena itu penawaran lebih besar dari permintaan sehingga harga gula dalam negeri menjadi lebih rendah. Akibat dari itu harga gula semakin tertekan, sehingga untuk sementara hasil penjualan gula tebu tidak dapat menutupi biaya penanamannya.

Selain itu akibat krisis ekonomi tersebut, pada tahun 1884 harga gula terpuruk dan perdagangan berhenti. Kebangkrutan yang menimpa pedagang dan pemilik perkebunan membuat banyak pengusaha jatuh ke tangan bank dan perusahaan-perusahaan dagang besar.⁷⁷ Para petani yang mata pencahariannya tergantung pada pekerjaan di industri kopi dan khususnya gula terdepak dari pekerjaannya. Dampak kepada para petani tersebut karena kopi dan gula merupakan komoditi-komoditi ekspor untuk pasaran dunia khususnya Eropa sehingga harganya pun mengikuti harga pasaran dunia.

Pukulan ekonomi terhadap industri gula Praja Mangkunegaran ini membawa dampak pada perekonomian Mangkunegaran yang ketika itu telah

⁷⁶ Wasiono, 2008, *Op.Cit.*, hal 54

⁷⁷ Ricklefs, M.C, *Log.Cit.*,

memasuki jalur kapitalisme industri. Guncangan terhadap kaum kapitalis dunia yang ketika itu berpusat di Eropa juga berpengaruh terhadap denyut nadi perekonomian Praja Mangkunegaran.⁷⁸ Kerajaan kecil yang merupakan pecahan dari Kasunanan yang mulai bangkit membangun perekonomiannya sendiri dengan mengikuti pola ekonomi kapitalisme produksi ala Eropa ini terpaksa harus mengalami ujian yang berat akibat dari krisis dunia ini.

Selain menurunnya harga gula di pasaran dunia, Praja Mangkunegaran juga mengalami penurunan hasil dari perkebunan kopi akibat dari krisis dunia tersebut. Penurunan hasil kopi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Produksi kopi di Praja Mangkunegaran tahun 1882 – 1888

Tahun	Kualitas baik (kw)	Kualitas jelek (kw)	Total (kw)
Rata-rata th 1871-1881	29.761	3.164	32.925
1882	21.284	1.948	23.232
1883	49.815	5.450	55.265
1884	11.321	525	11.846
1885	12.972	451	13.423
1886	10.237	295	10.521
1887	5.112	297	5.409
1888	7.476	419	7.894
Rata-rata th 1882-1888	16.888	1.340	18.228

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, Kode Arsip: 1144, hlm 1

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil kopi rata-rata pada masa Mangkunegara IV relatif banyak dengan jumlah keseluruhan 32.925 kuintal dibandingkan dengan pada awal pemerintahan Mangkunegara V. Sedangkan pada masa pemerintahan Mangkunegara V pada tahun 1883 hasil dari perkebunan kopi

⁷⁸ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 55

sangat tinggi dengan jumlah keseluruhan mencapai 55.265 kuintal, sehingga pada tahun tersebut mengalami kenaikan hasil kopi sebesar 32.033 kuintal, dan itu merupakan hasil dari perkebunan kopi terbesar pada masa pemerintahannya. Pada tahun 1884 hasil perkebunan kopi menurun sangat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11.846 kuintal, sehingga penurunannya mencapai 43.419 kuintal.

Penurunan hasil kopi tersebut disebabkan selain hama sereh yang menyerang tanaman kopi juga terjadinya krisis dunia yang terjadi pada tahun tersebut. Setelah tahun tersebut hampir di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hasil kopi dan sedikit kenaikan pada tahun 1885 itu pun hanya sedikit sekali. Dibandingkan dengan periode tahun 1871-1888, kemunduran hasil kopi dari tahun 1882-1888 rata-rata ada pengurangan hasil sekitar setengah juta gulden, terutama jika yang dijadikan ukuran itu kemunduran produksi dalam tiga tahun terakhir dari masa pemerintahan Mangkunegara IV, tidak kurang dari f 700.000 tiap tahunnya, dan itu merupakan suatu jumlah yang menurut perbandingan sangat besar. Berkurangnya penerimaan kopi dan gula penghasilan Praja Mangkunegaran turun kurang lebih f 1.000.000.⁷⁹

Selain itu, perlu diingat bahwa keadaan keuangan negara yang begitu jelek itu tidak hanya akibat dari hal-hal di atas, tetapi juga akibat suatu tindakan yang dipandang dari sudut kemasyarakatan suatu langkah yang sangat maju. Tindakan tersebut adalah penghapusan sistem *apanage* atau lungguh yang memberatkan negara yang dilakukan oleh Mangkunegara IV. Hal itu karena

⁷⁹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Log.Cit.*,

penghapusan sistem *apanage* atau lungguh tersebut sangat memberatkan kas negara.⁸⁰

B. Usaha-Usaha Untuk Memperbaiki Perekonomian Praja Mangkunegaran

1. Usaha-Usaha Mangkunegara V

Menurunnya serta terpuruknya keuangan dan perekonomian Praja Mangkunegaran menyebabkan penguasa Praja Mangkunegaran pada saat itu, Mangkunegara V mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah keuangan dan juga menambah penghasilan untuk keuangan Praja Mangkunegaran. Usaha-usaha ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Mangkunegara V antara lain:

a. Mendirikan Pabrik Bungkil Polokarto

Penerapan manajemen keuangan di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V yang tidak tepat membuat pengeluaran dari kas negara sangat besar karena pengeluaran didasarkan pada masa pemerintahan Mangkunegara IV. Perhatian Mangkunegara V tidak memfokuskan kepada penurunan tingkat pengeluaran Praja Mangkunegaran tetapi justru mengusahakan peningkatan penghasilan. Usaha untuk peningkatan penghasilan tersebut antara lain yaitu pendirian pabrik bungkil di polokarto. Sebenarnya rencana pendirian pabrik ini sudah direncanakan oleh Mangkunegara IV pada masa masih memerintah Praja Mangkunegaran.

Akhirnya pada masa pemerintahan Mangkunegara V pada tahun 1882 mendirikan pabrik bungkil di atas tanah seluas 500 ha. Pabrik ketiga dari Praja Mangkunegaran ini diberi nama "Polokarto". Pada masa pemerintahan Residen

⁸⁰ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*, Surakarta: Reksopustoko, hal 6

Mr. W.A. Matthes diadakan upacara peletakan batu pertama oleh Mangkunegara V. Tanah untuk mendirikan pabrik ini merupakan tanah milik perusahaan swasta dari Karangale di wilayah Honggobayan kecamatan Jatisrono yang pada tahun 1879 dikembalikan kepada Praja Mangkunegaran.⁸¹ Tanah ini sangat cocok untuk ditanami tanaman kacang cina, dan juga wilayahnya sangat berdekatan dengan kedua pabrik gula. Letaknya yang dekat dengan pabrik gula maka dalam penanamannya faktor pemupukan sangat tercukupi. Hal itu karena sisa-sisa dari penggilingan pabrik tebu dapat digunakan sebagai pupuk yaitu pupuk kompos. Selain itu juga mendapat perhatian yang cukup dalam penanaman, pemupukan dan pemeliharannya karena berdekatan dengan kedua pabrik gula tersebut.

Akibat pendirian pabrik dengan perencanaan yang kurang dan dipaksakan oleh Mangkunegara V untuk menambah penghasilan Praja Mangkunegaran, maka hasilnya pun tidak terlalu memuaskan. Dalam enam tahun pertama sejak berdirinya pabrik Bungkil Polokarto keuntungan yang diperoleh dari hasil pabrik tersebut hanya sebanyak f 15.000,-.⁸² Jumlah tersebut tidak dapat dikatakan banyak karena dalam menghitung keuntungannya tidak dikaitkan dengan sewa tanah. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran pabrik ini tidak dapat diurus lagi secara maksimal karena keterbatasan biaya akibat dari defisitnya kas Praja Mangkunegaran.

b. Membeli Pabrik Gula Kemiri

Masih memburuknya manajemen keuangan di Praja Mangkunegaran akibat dari besarnya pengeluaran tanpa adanya usaha untuk mengurangi

⁸¹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 3

⁸² *Ibid.*,

pengeluaran keuangan di Praja Mangkunegaran, maka Mangkunegara V mengambil keputusan untuk membeli pabrik gula Kemiri untuk menambah keuangan Praja Mangkunegaran. Pada awalnya pabrik Kemiri merupakan pabrik gula milik pengusaha asing yang bernama d.'Abo, dan pada tahun 1883 perusahaan gula Kemiri secara resmi dibeli oleh Mangkunegara V beserta dengan areal perkebunan tebunya.⁸³ Setelah pabrik gula Kemiri di beli oleh pihak Praja Mangkunegaran, maka pabrik tersebut diberi nama Madu Renggo oleh Mangkunegara V.

Setelah pabrik tebu Kemiri dibeli oleh Mangkunegara V, pengolahan tebunya dijadikan satu dengan pabrik gula Tasikmadu karena jaraknya yang relatif dekat. Selain itu juga, keputusan pengolahan pabrik dijadikan satu dengan pabrik gula Tasikmadu yaitu untuk menghemat biaya produksi. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun terdapat penghematan dalam hal produksinya tetapi biaya untuk pengangkutan tebu dari daerah Kemiri ke pabrik gula Tasikmadu lebih mahal karena harus dilakukan secara berkali-kali dengan menggunakan cikar dan lori.⁸⁴ Namun demikian, secara ekonomi dipandang oleh pihak manajemen pabrik gula Tasikmadu cara tersebut masih lebih menguntungkan.

Pengeluaran keuangan untuk pembelian pabrik gula Kemiri diharapkan pemasukan untuk kas Praja Mangkunegaran semakin bertambah. Pada saat pembelian tersebut ternyata pabrik Kemiri masih giling dan dalam musim giling tahun 1884 dan 1885 telah menghasilkan tebu 5.000 pikul atau 3.000 kuintal yang berasal dari 28 bau atau 20 hektar tebu tanaman sendiri dan 70 bau atau 50 hektar

⁸³ Pada pembelian pabrik gula Kemiri tidak diketemukan data arsip yang menunjukkan berapa jumlah harga untuk pembelian pabrik gula tersebut. Wasino, 2008, *Log.Cit.*,

⁸⁴ *Ibid.*, hal 56

tebu yang ditanam oleh para penyewa tanah di sekitarnya yaitu para *bekel*.⁸⁵ Akibat dari hasil perkebunan dan produksi gula yang sedikit maka kebijakan produksi tebu untuk lahan Kemiri berubah ketika jabatan *superintenden* perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran dijabat oleh Roosemier.⁸⁶

Dengan alasan sulitnya transportasi dari wilayah kebun tebu Kemiri ke pabrik gula Tasikmadu, ia memaksakan agar pabrik gula Kemiri atau Madu Rengga memproduksi tebunya sendiri dengan perhitungan biaya produksi lebih rendah. Akhirnya pada tahun 1886 pabrik gula Kemiri atau Madu Rengga yang mempunyai luas 20 hektar digabung dengan pabrik gula Tasikmadu dan pabrik gula Kemiri di tutup.⁸⁷ Penutupan tersebut karena hasil produksi sangat sedikit dan juga karena mengadakan pabrik sendiri dengan administrasi sendiri sangat tidak menguntungkan. Akhirnya usaha Mangkunegara V dalam membeli pabrik gula Kemiri beserta tanaman tebunya untuk menambah penghasilan Praja Mangkunegaran mengalami kegagalan dan keuangan Praja Mangkunegaran pun semakin sedikit.

c. Pembudidayaan Tanaman Tembakau

Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Prangwedana untuk menambah penghasilan Praja Mangkunegaran yaitu pembudidayaan tanaman tembakau. Keputusan yang diambil oleh Mangkunegara V tersebut karena tertarik akan harganya yang tinggi di pasaran dunia pada waktu itu. Tanaman tembakau

⁸⁵ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 57

⁸⁶ P Brooshoof dalam *Solosche Catechismus* mengupas khusus tentang tokoh ini (Rosemeier) sebagai tokoh yang boros dan selalu ingin menguasai semua urusan keuangan Praja Mangkunegaran. *Ibid.*, hal 64

⁸⁷ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 61

sebenarnya sudah lama ditanam oleh rakyat antara lain di Kedu, sedangkan pengusaha Belanda sejak tahun 1820-an telah membuka perkebunan tembakau di tanah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.⁸⁸ Di daerah ini perusahaan harus beroperasi dalam lingkungan feodal, sehingga amat menghambat pertumbuhan perkebunan. Setelah dihapuskannya sistem *apanage* maka ada kemajuan dalam pelaksanaan perkebunan di daerah *Vorstenlanden* karena adanya hubungan yang baik antara pemerintah, swasta dengan pihak kerajaan.

Pengusaha perkebunan dan pemerintah dapat dikatakan satu tangan dengan menggandeng raja untuk memperlancar eksploitasi lewat perkebunan. Legitimasi yang berlangsung untuk melakukan eksploitasi ditempuh melalui kolusi karena pihak-pihak yang terkait ingin memperoleh keberhasilan dalam kerjasama mereka. Raja, pemerintahan desa dan pengusaha perkebunan melakukannya agar terjalin hubungan yang harmonis diantara mereka yang menciptakan hubungan resmi dan swasta.⁸⁹

Di Jawa, perkebunan tembakau berpusat di Wonosobo, Kedu, tanah kerajaan, dan Besuki.⁹⁰ Sebenarnya di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV sudah membudidayakan tanaman tembakau karena harganya di pasaran dunia sangat tinggi. Bahkan pada tahun 1871 hasil perkebunan tembakau di Jawa harganya mencapai f 15.456.000,- untuk 129.070 bungkus.⁹¹ Jadi untuk setiap bungkus harganya sekitar f 119,75,- harga yang cukup besar pada waktu itu.

⁸⁸ Djoko Suryo dan Sartono Kartodirdjo, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, hal 89

⁸⁹ Suhartono W Pranoto, 2001, *Serpihan Budaya Feodal*, Yogyakarta: Agastya Media, hlm 100

⁹⁰ Djoko Suryo dan Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hal 91

⁹¹ *Ibid.*, hal 92

Pembudidayaan tanaman tembakau pada masa Mangkunegara IV sebenarnya sudah mengalami kegagalan karena tanaman tembakau sangat tergantung dengan iklim. Selain faktor iklim yang sangat sulit dikontrol juga faktor pemeliharaan yang masih sangat tradisional dan bibit yang mempunyai produktivitas yang sangat rendah.

Meskipun pada masa pemerintahan ayahnya pembudidayaan tanaman tembakau mengalami kegagalan, tetapi Mangkunegara V tetap melakukan pembudidayaan perkebunan tembakau tersebut. Hal itu karena Prangwedana tergiyur akan harganya yang tinggi di pasaran dunia khususnya di Eropa pada waktu itu untuk menambah keuangan Praja Mangkunegaran. Akhirnya Mangkunegara V memerintahkan masyarakat di Jatisrono daerah Keduwang untuk melaksanakan pembudidayaan tembakau tersebut. Areal tanah yang digunakan adalah daerah yang dahulunya dipakai untuk perkebunan kopi. Akibat dari tindakan Prangwedana ini maka kebun-kebun kopi tinggalkan dan ditelantarkan.

Hasil panen tembakau yang pertama pada areal 28 hektar tidak seperti yang diharapkan oleh Mangkunegara V karena kualitas tembakau yang dihasilkan rendah sehingga merupakan suatu kegagalan. Meskipun hasil panen tembakau mengalami kegagalan, tidak membuat Mangkunegara V putus asa tetapi justru memperluas areal penanaman tanaman tembakau menjadi 150 hektar pada tahun 1887, dan untuk itu diikutsertakan masyarakat Ngadirejo dalam pemeliharanya.⁹² Akibat perluasan areal perkebunan tembakau tersebut, maka pohon-pohon jati atau hutan jati yang berada disekitar daerah tersebut banyak ditebangi. Pohon-

⁹² Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 62

pohon jati yang ditebangi kayunya digunakan untuk mendirikan 16 buah gudang tembakau.

Sebenarnya wilayah Praja Mangkunegaran banyak mempunyai hutan-hutan yang lebat dan memiliki pohon-pohon yang besar. Sumber daya alam tersebut yang berupa hutan tersebut tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh Mangkunegara V. Kebanyakan hasil dari hutan yang digunakan hanya kayunya saja.⁹³ Kayu-kayu tersebut digunakan untuk membangun gedung, gudang, jembatan, perabotan rumah tangga, dll. Padahal hasil hutan sangat banyak sekali seperti rotan untuk membuat kerajinan, damar, dan lain sebagainya. Bahkan hasil hutan tersebut jika dimanfaatkan secara maksimal tidak menutup kemungkinan dapat menambah keuangan kas Praja Mangkunegaran.

Pembudidayaan tanaman tembakau di wilayah Praja Mangkunegaran dikepalai oleh I.B Vogel, yang merupakan orang Belanda sebagai penasihat raja. Akibat dari kebijakan yang diambil Vogel untuk meningkatkan pembudidayaan tanaman tembakau tersebut, rakyat menjadi sengsara karena hak atas tanah tidak dijamin. Selain itu juga rakyat diperas tenaganya dan Vogel berusaha mengambil sepertiga dari tanah bengkok.⁹⁴ Akhirnya usaha tersebut tidak berhasil seiring dengan gagalnya pembudidayaan tanaman tembakau di Praja Mangkunegaran.

d. Mencari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Belanda dan Swasta

Semua usaha-usaha Prangwedana untuk menambah pendapatan Praja Mangkunegaran tidak berjalan dengan sukses bahkan cenderung mengalami

⁹³ *Arsip Mangkunegaran* no 68 yang merupakan surat dari residen Surakarta kepada Gubernur Jenderal, bulan Mei 1887 mengenai masalah keuangan Mangkunegara V, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran

⁹⁴ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Log.Cit.*,

kegagalan. Ironisnya kegagalan-kegagalan usaha untuk menambah keuangan Praja Mangkunegaran tersebut tidak membuat Mangkunegara V mengurangi biaya pengeluaran setiap bulannya. Akhirnya yang ada cuma defisit keuangan kas Praja Mangkunegaran. Puncaknya pada tahun 1885 Mangkunegara V sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk menanggulangi masalah keuangan di Praja Mangkunegaran tersebut. Hal itu karena kas istana sangat tidak memungkinkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Praja Mangkunegaran.

Keadaan kas Praja Mangkunegaran yang begitu mengkhawatirkan, maka Mangkunegara V meminta tolong kepada residen agar mau meminjamkan uang tanpa bunga sebesar f 800.000,-. Pembayaran hutang tersebut akan diambilkan dari pemotongan hasil penjualan kopi pada tahun 1886 sebesar f 200.000,-, pada tahun 1887 sebesar f 300.000,- dan tahun 1888 sebesar f 800.000,-.⁹⁵ Mangkunegara V meminta peminjaman tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu setengah pada tanggal 30 April 1885 dan setengahnya lagi pada tanggal 10 Juli 1885.

Permintaan Mangkunegara V untuk meminjam uang kepada pemerintah Belanda tersebut kemudian dilanjutkan oleh Residen Surakarta pada waktu itu yaitu A.J. Spaan kepada pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Residen A.J Spaan mengusulkan agar permintaan Prangwedana tersebut disetujui oleh pemerintah pusat. Alasan residen Spaan mengusulkan agar permintaan tersebut dipenuhi oleh pemerintahan pusat adalah karena berpendapat bahwa keluarga raja Mangkunegaran yang kuat keuangannya sangat penting di bidang politik. Selain itu juga residen Spaan juga yakin bahwa Mangkunegara V akan memenuhi

⁹⁵ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 4

kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut melalui hasil panen kopi yang baik dan harga gula tinggi.

Selain itu residen Spaan juga mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan pinjaman asalkan Prangwedana memberikan tanggungan berupa penyewaan atau hipotik dan penguasaanya diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri atas dua orang yang dipilih Prangwedana di antara keluarga atau pegawainya dengan pertimbangan dari residen. Komisi tersebut harus membuat pertanggungjawaban yang lengkap mengenai semua penerimaan dan pengeluaran serta menyerahkannya kepada Mangkunegara V, sedangkan neraca tahunan dan anggarannya harus memperoleh persetujuan dari residen. Selanjutnya seluruh pengawasan terhadap budidaya kopi milik Praja Mangkunegaran harus diserahkan kepada Asisten Residen Wonogiri, dan pengembalian pinjamannya akan dilakukan apabila keadaan keuangan telah diperbaiki. Pemerintah harus berjanji tidak akan menjual barang-barang yang digadaikan dan tanah/rumah yang dihipotikkan, sebelum terbukti pihak Praja Mangkunegaran tidak dapat membayar angsuran-angsuran pengembalian hutangnya dengan cara apapun.

Permintaan pinjaman oleh Prangwedana dan didukung oleh residen Surakarta pada waktu itu Spaan tersebut tidak secara langsung disetujui oleh pemerintah pusat. Keputusan pemerintah pusat tersebut dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kekhawatiran mengenai cara hidup yang mewah di Praja Mangkunegaran. Pemerintah ingin memperoleh kepastian terlebih dahulu bahwa kepengurusan keuangan Praja Mangkunegaran yang dilakukan pada waktu itu telah dihentikan, sehingga pengembalian pembayaran pinjaman dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah pusat justru berpendapat bahwa Mangkunegara V dianggap sudah tidak cakap lagi menduduki jabatan sebagai raja di Praja Mangkunegaran dan ia tidak dapat dipertahankan lebih lama. Selain itu jawaban pemerintah pusat terhadap residen yaitu kalau ada keberatan-keberatan yang bersifat politik terhadap digantinya Prangwedana oleh orang lain dari keluarga Praja Mangkunegaran yang lebih pantas. Pengawasan keuangan Praja Mangkunegaran jika perlu harus diserahkan kepada komisi yang diangkat oleh residen dengan pertimbangan raja dan Asisten Residen Surakarta harus ikut mengambil bagian. Pemerintah pusat akan menyetujui permintaan pinjaman Mangkunegara V tersebut jika semua syarat yang diajukan tersebut telah diatur dan disetujui oleh Prangwedana. Selain itu juga pemerintah kolonial Belanda meminta diberitahu mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran, hutang-hutang Prangwedana, hak milik dan perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran serta pengaturan pelunasan hutang-hutangnya.

Residen Spaan tidak menyetujui usulan pemerintah kolonial Belanda untuk mengganti Prangwedana, meskipun penyebab salah satu krisis keuangan di Praja Mangkunegaran karena gaya hidup yang boros dan juga tidak ada penyesuaian pengeluaran dengan pemasukan kas Praja Mangkunegaran. Oleh karena itu ia mengusulkan dibentuknya sebuah komisi yang bertugas mengatur masalah keuangan dari tanah-tanah dan hak milik Praja Mangkunegaran. komisi tersebut diketuai oleh asisten Residen Surakarta dan anggotanya adalah dua orang Pangeran Putra dan dua orang Pangeran Sentana.⁹⁶ Selain dari keluarga Mangkunegara IV dan V, anggota komisi juga harus terdiri dari para keturunan

⁹⁶ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 65

Mangkunegara II dan III. Tujuannya untuk mengakomodasi seluruh kepentingan Praja Mangkunegaran agar dapat terwakili. Di dalam komisi tersebut juga akan dipekerjakan oleh seorang Belanda sebagai sekretaris dan merangkap sebagai pemegang buku dengan gaji 200 sampai 300 gulden.⁹⁷

Agar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, maka kas besar Praja Mangkunegaran hanya dapat dibuka dengan dengan dua kunci, salah satu kuncinya disimpan oleh Pangeran Putra, dan kas kecil untuk membiayai pengeluaran sehari-hari juga mempunyai dua kunci, yang sebuah disimpan oleh sekretaris dan yang satunya disimpan oleh seorang Komisaris bulanan. Pembayaran dalam jumlah besar dan keputusan yang penting harus dilakukan hanya oleh dewan tersebut. Komisi tersebut diberi nama *Raad van Toezicht Belastmet de Regeling van de Mangkoenegorosche Landen en Bezettingen* (Dewan Pengawas yang mengatur urusan keuangan, tanah, dan barang-barang milik Mangkunegaran).⁹⁸

Usulan dari residen Spaan untuk membentuk komisi tersebut disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda dan akan memberikan pinjaman kepada Prangwedana asalkan ia menyetujui pembentukan komisi tersebut. Mangkunegara V tidak dapat menyetujui usulan tersebut dengan alasan jika diterima usulan tersebut maka sudah tidak ada kebebasan lagi pihak Praja Mangkunegaran untuk mengelola keuangannya sendiri. Selain itu para penasehat Prangwedana juga mengusulkan agar tidak menyetujui usulan dari residen tersebut tetapi dengan alasan yang lain yaitu ingin menarik keuntungan dari pengelolaan yang tidak teratur tersebut untuk kepentingannya sendiri. Tetapi juga ada sebagian kecil

⁹⁷ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 57

⁹⁸ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 6

orang di kalangan Praja Mangkunegaran mengusulkan supaya menerima usulan dari residen dan pemerintah kolonial Belanda tersebut. Hal itu karena mereka menyadari bahwa keuangan Praja Mangkunegaran sudah tidak dapat diatur dan dikendalikan lagi pengeluarannya, maka pembentukan komisi tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dihindari.

Prangwedana melihat bahwa permintaan bantuan pinjaman kepada pemerintah Belanda tidak berhasil, maka dia mencoba dengan cara lain. Hal itu karena syarat yang diajukan oleh pemerintah Belanda pada hakikatnya merupakan pengawasan terhadap Praja Mangkunegaran dalam arti yang seluas-luasnya. Pemerintah Belanda membiarkan saja tindakan Prangwedana untuk mencari cara lain, karena pemerintah kolonial Belanda yakin bahwa pada akhirnya Prangwedana pasti terpaksa menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah Belanda.

Mangkunegara V akhirnya mencari pinjaman kepada pihak swasta di Semarang. Melalui penggadaian harta miliknya yang memiliki nilai *verpanding* sebesar f519.00.000, ia memperoleh pinjaman dari A.F.L. Huygen de Raet sebesar f400.000,-. Di samping itu, Mangkunegara V juga mendapatkan pinjaman sebesar f200.000,- dari *Factorij* dengan cara menggadaikan 290 saham *Javanche Bank* dan 100 saham dari *Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM)*, warisan ayahnya.⁹⁹ Pinjaman-pinjaman tersebut digunakan untuk memperoleh modal bagi ketiga pabriknya. Akhirnya pinjaman tersebut dapat menolong anggaran Praja Mangkunegaran pada tahun 1885. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh

⁹⁹ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 58

Prangwedana tersebut tidak menguntungkan *Effecten Fonds* atau Dana Surat-surat Berharga yang telah didirikan oleh ayahnya dan selalu diperbesar.

Alasan Mangkunegara V tidak menjual kekayaan milik Praja Mangkunegaran dan hanya menghipotikkannya karena Mangkunegara V sangat menghormati ayahnya. Hipotik ini tidak dapat ditiadakan dalam waktu empat tahun. Pembayaran bunga pinjaman diambilkan dari pembayaran dari sewa rumah-rumah dan tanah-tanah yang berada di daerah Semarang, sehingga tidak ada bahaya bahwa hipotik tersebut akan ditiadakan/dihapuskan, kecuali harga atau nilai dari rumah-rumah dan tanah-tanah tersebut menurun. Akhirnya dengan bantuan dari pihak swasta tersebut keuangan Praja Mangkunegaran masih dapat terselamatkan meskipun hanya untuk tahun 1885.

Berikut ini tabel mengenai keterangan pengeluaran di Praja Mangkunegaran yang sudah berjalan sampai tahun 1885.

Tabel 2.2

Pemasukan dan Pengeluaran Praja Mangkunegaran Sampai Tahun 1885¹⁰⁰

Keterangan	Gulden (f)	
	Penerimaan	Pembayaran
Penanggalan dari Kanjeng Surakarta	53.459,42	
Sisa kepunyaan Praja Mangkunegaran sebesar 15.000 dacin dengan jumlah f375.000 dan diambil untuk biaya kesemuanya f 6 sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan f 90.000 sehingga untung	285.000	
Keuntungan dari kepemilikan pabrik gula di Tasikmadu dan Colomadu	200.000	
Pemasukan dari Polokarto	7.000	
Pajak dari tuan-tuan tanah	131.482	
Pajak dari transportasi	1.800	
Pajak Pangulunkrapa	3.833	
Pendapatan tanah yang terdapat di Griyapatikena	1.275	
Pendapatan tanah dari perumahan Cina yang baru dan lama	697	
Pajak kampung yang terdapat di Nagari	2.476,63	
Pajak tanah yang terdapat di Liraman	200	
Gaji yang harus dibayar dari tanah kosong	103,26	
Pengeluaran bulanan Mangkunegaran		120.000
Pengeluaran untuk Atmocasoso		203.556
Pengeluaran untuk Keprabon		240.000
Pengeluaran untuk Nagari		208.339,92
Pengeluaran untuk Karti Praja		12.000
Pengeluaran untuk Reksowibawa		100.000
Jumlah	687.424,31	883.895,92
Jumlah dari penerimaan dan pengeluaran	-196.471,61	

Sumber: diolah dari Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, *MN V*, no arsip: 64

Berdasarkan tabel keuangan Praja Mangkunegaran pada tahun 1885 di atas sudah jelas bahwa terjadi defisit keuangan Praja. Padahal jika dilihat dari jumlah

¹⁰⁰ *Arsip Mangkunegaran V* no 64 tentang "Penerimaan dan Pengeluaran di Praja Mangkunegaran sampai Tahun 1885", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran.

pemasukan sangat besar dengan adanya penambahan-penambahan dari sektor baru seperti hasil dari pabrik Bungkil Polokarto, penyewaan rumah-rumah di daerah Semarang, dan juga pajak-pajak yang dibebankan kepada seluruh masyarakat serta orang-orang yang menggunakan tanah-tanah yang berada di daerah Praja Mangkunegaran.

Meskipun keadaan keuangan Praja Mangkunegaran semakin terpuruk tetapi jumlah pengeluaran tidak dikurangi bahkan cenderung meningkat. Hal ini terlihat antara jumlah pengeluaran pada tahun 1883, di mana pada saat itu jumlah pengeluaran masih relatif stabil. Hampir semua pengeluaran pada tahun 1885 mengalami peningkatan lima puluh persen bahkan ada yang lebih. Pada tahun 1883 jumlah pengeluaran bulanan Praja Mangkunegaran hanya sebesar f60.000 sedangkan pada tahun 1885 meningkat menjadi f120.000,-. Pengeluaran untuk Negara naik sekitar f88.311,46 di mana pada tahun 1883 berjumlah 120.028,46 sedangkan tahun 1885 berjumlah f208.339,92,-. Pengeluaran untuk Atmabagasana naik dari f131.488,95 menjadi f203.556,- dan kenaikan pengeluaran juga terjadi untuk Reksowibowo yang naik pada tahun 1883 dari f30.000,- di tahun 1885 menjadi f100.000,-. Bahkan pengeluaran untuk Karti Praja mengalami kenaikan lima kali lipat yaitu dari f12.000,- menjadi f60.000,-.

Semua kenaikan-kenaikan pengeluaran tersebut nampaknya tidak begitu diperhatikan oleh Mangkunegara V karena merasa keuangan Praja Mangkunegaran akan membaik dengan mendapat bantuan dari pihak swasta dan menggadaikan barang-barang milik Praja Mangkunegaran serta penjualan saham. Akhirnya jumlah antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang sehingga Praja Mangkunegaran mengalami defisit keuangan mencapai f196.471,61. Hal itu

karena pada tahun 1885 tersebut jumlah pemasukan hanya berjumlah f 687.424,31 sedangkan jumlah pengeluaran mencapai f 883.895,92,-. Akibat dari minusnya keuangan Praja Mangkunegaran tersebut maka akhirnya Mangkunegara V mencari pinjaman seperti yang diterangkan di atas.

Kenyataan yang diperkirakan oleh Mangkunegara V ternyata tidak sesuai dengan harapan. Semua pinjaman dan juga penggadaian barang-barang kekayaan Praja Mangkunegaran serta saham-sahamnya ternyata hanya mampu untuk membiayai keuangan Praja Mangkunegaran pada tahun 1885 saja. Hal itu seperti yang diprediksikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Keputusan yang di ambil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk tidak memberikan pinjaman kepada Prangwedana sebelum adanya perbaikan keuangan di Praja Mangkunegaran sangat tepat. Akhirnya yang diramalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan kenyataan, di mana Prangwedana meminta bantuan pinjaman kepada pemerintah kolonial Belanda dengan persyaratan yang diajukan pada awalnya, yaitu pembentukan sebuah komisi dengan nama *Raad van Toezicht Belastmet de Regeling van de Mangkoenegorosche Landen en Bezettingen* (Dewan Pengawas yang mengatur urusan keuangan, tanah, dan barang-barang milik Mangkunegaran).

2. Campur Tangan Pemerintah Kolonial Belanda

Semakin memburuknya keuangan Praja Mangkunegaran membuat pemerintah Belanda mengambil tindakan untuk dapat menanggulangnya. Buruknya keuangan Praja Mangkunegaran dapat dilihat dari laporan yang di sampaikan oleh Residen Spaan pada bulan Desember 1886 mengenai keuangan

Praja Mangkunegaran. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa banyaknya hutang yang dipunyai oleh Praja Mangkunegaran mencapai sebesar f 1 juta, termasuk f600.000,- karena menggadaikan tanah dan rumah-rumah di Semarang, pinjaman dari *Nederlandsche Handel Maatscappij*, dan tunggakan gaji para pegawai polisi dan pengadilan yang sejak tanggal 1 April 1886 tidak menerima gaji sebanyak f79.830,-.¹⁰¹

Akhirnya yang diperkirakan oleh pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan kenyataannya. Prangwedana V akhirnya meminta bantuan pinjaman keuangan kepada pihak Pemerintah Belanda. Pinjaman keuangan tersebut akhirnya disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda dengan syarat dibentuk suatu Badan Pengawas. Dengan disetujuinya persyaratan yang diajukan oleh pemerintah kolonial tersebut, maka dimulailah campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap keuangan Praja Mangkunegaran. Secara tidak langsung maka keuangan Praja Mangkunegaran di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda.

Pembentukan komisi keuangan tersebut untuk mengurus keuangan dan perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran. Komisi keuangan tersebut diketuai oleh Residen Spaan, sedangkan Prangwedana V (Mangkunegara V), Pangeran Haryo Hadiwijoyo, Pangeran Haryo Suryodiningrat, dan Raden Mas Haryo Brodjonoto sebagai anggotanya, serta Sekretaris Daerah (*Gewestelijke Secretaris*) WF Engelbert van Bevervoorde sebagai sekretarisnya.¹⁰² Pangeran Haryo Hadiwijoyo adalah putra sulung dari perkawinan Mangkunegara IV, yang merupakan seorang ipar Raja dan menjabat sebagai mayor pada Legiun. Adapun Pangeran Haryo Suryodiningrat adalah putra dari Mangkunegara III, sedangkan

¹⁰¹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 7

¹⁰² *Ibid.*, hal 9

Raden Mas Haryo Brodjonoto adalah kepala trah Mangkunegara I dan II, dan bekas Mayor Kavaleri dari Legiun.

Jadi keanggotaan komisi keuangan tersebut terdiri dari keluarga istana Praja Mangkunegaran dan diwakili oleh keturunan dari Mangkunegara I sampai IV sehingga seluruh kepentingan Praja Mangkunegaran dapat terwakili. Melalui pembentukan komisi tersebut, berarti Pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan campur tangan terhadap urusan keuangan Praja Mangkunegaran, meskipun dengan dalih untuk menyetatkan atau memulihkan keuangan Praja. Hal itu terlihat bahwa jabatan utama yaitu ketua dan sekretarisnya dipegang oleh pejabat Belanda. Di lain pihak, juga terdapat orang-orang di kalangan Praja yang menyetujui ikut campurnya pihak Kolonial Belanda terhadap keuangan Praja Mangkunegaran.

Langkah yang dilakukan oleh Mangkunegara V dan juga pihak pemerintah Belanda untuk menangani masalah keuangan tersebut sangat tepat. Hal itu karena seperti yang disampaikan oleh Residen Spaan dalam laporannya pada bulan Desember 1886 tentang keuangan Praja Mangkunegaran disebutkan bahwa tingkat pengeluaran umum Praja Mangkunegaran sudah tidak sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan anggaran dicapai melalui hutang. Hutang Praja Mangkunegaran tersebut membengkak hingga mencapai satu juta gulden.¹⁰³ Selain hutang, Praja Mangkunegaran juga mempunyai banyak pinjaman-pinjaman antara lain pinjaman dari Kasunanan.

¹⁰³ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 59

Praja Mangkunegaran mempunyai pinjaman sebesar f100.000,- kepada Kasunanan. Akan tetapi pinjaman tersebut dapat dikembalikan dengan apa yang dinamakan tanah kalitan. Tanah kalitan adalah tanah panandon yang oleh Pakubuwono II yang diberikan kepada putrinya Ratu Alit ketika kawin dengan Pangeran Arya Prabu Wijaya, ayah dari Mangkunegara II.¹⁰⁴ Setelah pihak Belanda ikut campur mengenai keuangan Praja Mangkunegaran, Residen Surakarta memperkenankan tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Kasunanan Surakarta. Sebagai gantinya Praja Mangkunegaran mendapat pembebasan atas pinjamannya sebesar f100.000,- dan di samping itu juga mendapatkan hak seperti perusahaan-perusahaan Eropa seperti menyewa tanah dari Sunan untuk keperluan pabrik gula Colomadu. Dengan kejadian ini Susuhunan meninggalkan hak perwakilannya pada setiap pengangkatan kepala trah Mangkunegara.

Setelah dibentuknya komisi keuangan untuk mengurus keuangan dan perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran, komisi tersebut mengadakan rapat pertama kali pada tanggal 18 Juli 1887, yaitu sebelas hari setelah dibentuk oleh Gubernur Jenderal Van Rees. Pelaksanaan kerja atau tugas komisi tersebut dalam memperbaiki keuangan dan perekonomian di Praja Mangkunegaran sangat berat. Tugas-tugas dari komisi tersebut antara lain:

- a. Komisi harus mengetahui segala hal yang diurus oleh Praja Mangkunegaran agar dapat memperbaiki keadaan keuangannya.
- b. Tidak boleh ada lagi keterlambatan dalam penggajian para pegawai Praja Mangkunegaran.

¹⁰⁴ Muhammad Dalyono, 1939, *Ketataprajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustaka, hal 16

- c. Kalau dimungkinkan dikeluarnya gaji para pegawai itu, maka pemerintah harus memberi pinjaman dengan syarat-syarat tertentu dan dengan jaminan yang cukup.
- d. Untuk pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Tasikmadu harus dicari modal kerja yang diinginkan.
- e. Gulanya harus dijual dengan keuntungan yang lebih banyak.
- f. Urusan Factorij dengan Prangwedana harus diselesaikan.
- g. Hak milik di daerah Semarang harus di bawah pimpinan yang lebih baik.
- h. Pengelolaan hutan Praja Mangkunegaran harus lebih teratur dan ditinjau kembali.
- i. Administrasi dari budidaya kopi dan lain-lain dari raja harus dijalankan dengan baik.¹⁰⁵

Komisi keuangan yang baru dibentuk tersebut tidak mengira akan menghadapi tugas yang sangat berat, sehingga di awal-awal pelaksanaan kerja komisi tersebut sedikit mengalami kesulitan meskipun sudah bekerja dengan giat.

Meskipun telah terjadi kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan Praja Mangkunegaran mengenai pembentukan komisi keuangan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang menjadi kesepakatan bersama. Hal itu terlihat sesudah komisi tersebut melakukan rapat pertama dan ternyata secara diam-diam komisi tersebut dihalang-halangi oleh lingkungan terdekat dari Raja yang masih tetap tidak mau menyetujui dilakukannya pengawasan terhadap keuangan Praja Mangkunegaran. Selain itu juga sikap Mangkunegara V yang tidak kooperatif terhadap komisi sehingga mempersulit pekerjaan komisi.

¹⁰⁵ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 73

Penghematan yang dilakukan komisi untuk Praja Mangkunegaran pada bulan pertama hanya sebatas pengurangan pengeluaran bagi para pegawai budidaya kopi. Penghematan tersebut yaitu pengurangan inspektur budidaya kopi yang pada mulanya dijabat oleh dua orang kemudian dirubah menjadi hanya satu orang. Atas keputusan komisi tersebut, maka terjadi penghematan sebesar f 1.200,- untuk tiap tahunnya.¹⁰⁶

Selain itu, komisi tersebut juga mengatur agar bunga pinjaman kepada *Factorij* dan ahli waris dari AFL Huygen de Raet dapat terus dibayar secara teratur. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tersebut, maka diangkat J. Jeanty sebagai pemegang buku yang sudah lama bekerja di swapraja dan merupakan satu-satunya orang yang dapat dipercaya karena tidak terlibat dan ikut dalam korupsi. Kas Praja Mangkunegaran juga mendapat pengawasan dari J. Jeanty dan Pangeran Aryo Handayaniingrat yang merupakan adik Prangwedana dan juga menjabat Mayor di Legiun.

Kebijaksanaan mengangkat J. Jeanty dan Pangeran Aryo Handayaniingrat untuk memegang buku dan pengawasan keuangan Praja Mangkunegaran ternyata tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut karena J. Jeanty tidak diberi kesempatan untuk memegang pembukuan keuangan Praja Mangkunegaran secara baik. Hal itu karena Mangkunegara V masih bersikap seperti biasanya yaitu mengambil dari kas Praja Mangkunegaran semauanya sendiri. Tindakan Mangkunegara V tersebut seolah-olah tidak mengakui adanya kekuasaan komisi yang telah disepakati bersama untuk mengatasi masalah keuangan di Praja Mangkunegaran. Akan tetapi

¹⁰⁶ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 10

pihak komisi tidak dapat bertindak keras dan tegas karena sikap Prangwedana serta keadaan Praja Mangkunegaran yang memprihatinkan.

Berikut ini laporan keuangan tahun 1888 mengenai pemasukan dan pengeluaran di Praja Mangkunegaran:

Tabel 2.3

Laporan Pendapatan Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1888¹⁰⁷

No	Keterangan	Jumlah (gulden)
1.	Penerimaan pada tahun sebelumnya	f 16.213,50
2.	Sewa tanah dari orang-orang Eropa	f 50.180,56
3.	Sewa tanah dari orang-orang Jawa	f 30.356,10
4.	Pajak dari kampung	f 1.391,89
5.	Pajak dari pernikahan	f 4.848,59
6.	Sewa dari orang-orang Cina	f 819,24
7.	Penyewaan lahan untuk penjualan opium	f 841,40
8.	Kompensasi dari pemerintah	f 44.174,91
9.	Pemasukan dari perkebunan kopi	f 311.064,125
10.	Pemasukan dari pabrik bungkil	f 4.002,55
11.	Pendapatan dari kayu hutan	f 5.026,60
12.	Pembayaran dari pemerintah yang tak berbunga	f 250.000
13.	Keuntungan-keuntungan yang lainnya	f 984,075
14.	Wesel dari penerimaan pabrik gula	f 25.000
	Jumlah	f 744.903,54

Sumber: diolah dari Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, *MN V*, no arsip:76

Dari tabel di atas sudah jelas mengenai pemasukan Praja Mangkunegaran pada tahun 1888. Pada bulan Maret 1888 dibentuk administrasi keuangan di bawah Kepala Badan Pengelola Daerah dan C.A. Rosemeier ditunjuk oleh residen untuk menjadi sekretarisnya. Pada bulan Maret berdasarkan keputusan tanggal 25 Maret 1888 No. 1/c yang bersifat rahasia, pemerintah memberikan bantuan pinjaman uang tanpa bunga kepada Praja Mangkunegaran

¹⁰⁷ *Arsip Mangkunegaran V* no 76 tentang "Laporan tahunan keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1888", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 7.

sebesar f 250.000 untuk kebutuhan pada tahun 1888.¹⁰⁸ Untuk melunasi bantuan tersebut pihak Praja Mangkunegaran dilakukan dengan cara mencicil.

Pendapatan juga diperoleh dari sewah tanah baik untuk sewa tanah bagi orang-orang Eropa maupun orang-orang pribumi sendiri. Penyewaan tanah tersebut kebanyakan digunakan untuk areal perkebunan. Selain itu pemasukan juga diperoleh dari pajak kampung di wilayah Praja Mangkunegaran. Tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal karena masih dilakukan secara tidak teratur sehingga justru mengalami kerugian. Pemasukan untuk Praja Mangkunegaran juga diperoleh dari pernikahan (penghulu/naib). Pemasukan dari pernikahan pada tahun 1888 sebesar f 4.624 dan ditambahkan dengan jaminan simpanan pada tahun 1887 sebesar f 224,59, sehingga total semuanya berjumlah f 4.848,59.¹⁰⁹

Pengairan dan penyeberangan juga menghasilkan pendapatan masing-masing f 100 dan f 1000 setiap tahunnya. Penyewaan tanah untuk orang-orang Cina sebenarnya diharapkan dapat menambah pemasukan keuangan Praja Mangkunegaran sebesar f 1.099,20 setahun, tetapi kenyataannya hanya dapat memperoleh pemasukan sebesar f 819,24. Hal itu karena orang-orang Cina sangat perhitungan sekali dengan usahanya. Pemasukan dari perkebunan kopi merupakan yang terbesar dari pemasukan-pemasukan keuangan yang lainnya. Pemasukan tersebut diperoleh dari hasil penjualan kopi yang telah dibedakan jenis kualitasnya. Hasil kopi yang diperoleh untuk kualitas nomor satu sebanyak 12103,61 pikul dengan harga per pikulnya sebesar f 25 sehingga jumlah hasilnya sebesar f 302.590,25. Sedangkan untuk jenis kopi kualitas nomor dua hanya

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal 1

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal 4

menghasilkan kopi sebesar 677,91 pikul dengan harga per pikulnya sebesar f 12,50 sehingga menghasilkan uang sebesar f 8.473,875.¹¹⁰ Sehingga dari perkebunan kopi menghasilkan pemasukan seluruhnya sebesar f 311.064,125.

Pada laporan pemasukan keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1888 ini keganjilan karena salah satu hasil pemasukan dari sektor perkebunan yaitu perkebunan tebu sekaligus pabrik gulanya tidak tercantum dalam daftar pemasukan keuangan di atas. Dalam daftar di atas hanya mencantumkan jumlah wesel yang diterima dari Prabrik gula yang jumlahnya tidak terlalu besar. Selain itu pendapatan dari hutan kayu yang dipanen untuk keperluan pabrik gula milik Praja Mangkunegaran juga tidak terlalu besar yaitu hanya f 5.026,60.

Tabel 2.4

Laporan Pengeluaran Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1888¹¹¹

No	Keterangan	Jumlah (gulden)
1.	Gaji, tunjangan, dll	f 353.600,28
2.	Perkebunan kopi	f 62.567,01
3.	Pabrik bungkil	f 500
4.	Pengeluaran untuk hutan kayu	f 202,22
5.	Reksowibowo	f 26.990,415
6.	Perairan	f 8.789,475
7.	Pemeliharaan binatang peliharaan	f 5.331,36
8.	Upacara ritual keagamaan	f 1.623,06
9.	Pengeluaran untuk kepolisian	f 1.706,15
10.	Pemberian makan tahanan	f 7.016,86
11.	Pasoembang (sumbangan)	f 4.065,435
12.	Hewan-hewan di kebun binatang	f 1.652,45
13.	Penyewaan mobil dan perjalanan	f 6.831,255
14.	Pengeluaran untuk alat-alat tulis	f 1.115,99
15.	Pengeluaran luar biasa	f 42.507,02
16.	Lain-lain	f 406,395
17.	Pengeluaran untuk pangeran	f 15.522,63
18.	Pembayaran bunga hutang	f 12.458
19.	Pelunasan dan pengangsuran untuk pensiunan	f 42.507,02
	Jumlah	f 595.303,025

Sumber: diolah dari Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, *MN V*, no arsip:76

¹¹⁰ *Ibid.*, hal 6

¹¹¹ *Ibid.*, hal 16

Dari tabel pengeluaran keuangan di Praja Mangkunegaran di atas menunjukkan bahwa pengeluaran yang paling besar berasal dari gaji dan tunjangan dari para pangeran dan keluarganya beserta para pegawai. Untuk mengurangi pengeluaran para pangeran dan pegawainya, maka dilakukan pengurangan gaji. Bagi para pegawai pengurangan gaji sebesar f 21.040 perbulannya dan untuk para pangeran sebesar f 5.000 setiap bulannya.¹¹² Jadi pengeluaran pertahunnya hanya sebesar f 312.480, sehingga pengeluaran tunjangan dan lain-lain untuk semua pengeluaran sebesar f 119.339,6. Jumlah total anggaran sebelumnya yang disediakan sebesar f 546.740,60 setahun, sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar f 193.140,4 setahun.

Pengeluaran untuk perkebunan kopi digunakan untuk pemeliharaan dan juga membayar orang-orang yang mengurus perkebunan tersebut. Gaji untuk inspektur sebesar f 300, sedangkan untuk administrator dari Eropa sebesar f 100.¹¹³ padahal untuk perkebunan kopi terdapat dua inspektur dan juga tujuh administrator Eropa yang bekerja dan mengurus di perkebunan. Selain itu gaji untuk van Gessel sebesar f 500 perbulan.¹¹⁴ Pemanggilan van Gessel untuk mengurus perkebunan kopi di Praja Mangkunegaran diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan jumlah penghasilan perkebunan kopi.

Pabrik bungkil dan juga hutan kayu, pengeluarannya dalam hal transportasi. Sedangkan untuk *Reksowibowo* selain untuk membayar gaji pegawai juga digunakan untuk membeli minuman, cerutu, minyak bumi, beras dan perlengkapan lainnya untuk persediaan. Untuk pengairan yang pada waktu itu

¹¹² *Ibid.*, hal 8

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Van Gessel adalah orang Belanda yang ahli dalam penanaman kopi. *Ibid.*, hal 9

yang memegang kendali adalah saudara tiri dari Mangkunegara V yaitu Pangeran Ario Gondosiwoyo. Pengeluaran digunakan untuk memperbaiki dan memelihara bangunan-bangunan yang berkaitan dengan pengairan. Kebanyakan pengeluaran pada bidang-bidang yang sifatnya diperkantoran untuk gaji, peralatan dan juga pemeliharaan alat-alat perkantoran. Khusus untuk kepolisian, pengeluaran juga digunakan untuk memberi makan bagi para tahanan.

Pengeluaran juga untuk binatang-binatang peliharaan di Praja Mangkunegaran antara lain untuk kuda, anjing, burung dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Pengeluaran biasanya untuk pemeliharaan kandang, kesehatan dan juga pemberian makan. Selain itu pengeluaran juga digunakan untuk pembayaran bunga hutang barang-barang atau kekayaan Praja Mangkunegaran yang dihipotikkan atau digadaikan terutama perumahan-perumahan di daerah Semarang. Pembayaran bunga tersebut sebesar 9 % pertahunnya.¹¹⁵ Pada tahun 1888 jumlah pemasukan keseluruhan yang mencapai f 744.903,54 dan pengeluaran keseluruhannya mencapai f 595.303,025. Jadi pada akhir bulan Desember 1888 jumlah uang kas yang Praja Mangkunegaran dalam bentuk tunai sebesar f 149.600,515.

Meskipun pada tahun 1888 Praja Mangkunegaran mempunyai kas yang masih tersisa, tetapi keadaan keuangan Praja Mangkunegaran semakin memburuk karena ternyata residen mengetahui bahwa Patih Mangkunegaran Raden Mas Tumenggung Djojoso yang sudah dua puluh tahun menjabat di bawah dua orang raja sebagai patih secara diam-diam melakukan perlawanan. Komisi mengetahui bahwa ternyata akibat kalah dari bermain judi Raden Mas

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 15

Tumenggung Djojosoarjo telah menghabiskan uang sewa Suryoamijayan (tanah Suryoamijayan adalah tanah Kasunanan, tetapi dikuasai oleh Mangkunegaran). Walaupun patih Djojosoarjo tidak mau mengakuinya, tetapi ia mengizinkan gajinya yang belum dibayar dipotong dengan *dhuwit gantungan*.¹¹⁶

Akhirnya patih Djojosoarjo dipecat oleh Mangkunegara V atas perintah dari residen Spaan, meskipun dilakukan secara segan. Pemecatan tersebut tercantum dalam harian *de Locomotief* tanggal 21 Desember 1888, dengan surat keputusan pemerintah tanggal 31 Maret 1888, dan akhirnya dibuang ke Padang.¹¹⁷ Pemecatan patih Djojosoarjo tersebut hanyalah kamufase yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyingkirkannya dari Praja Mangkunegaran dengan cara mencari kesalahannya.¹¹⁸ Hal itu karena patih Djojosoarjo merupakan salah satu orang yang menentang kehadiran komisi keuangan di Praja Mangkunegaran. Dipecatnya patih Djojosoarjo maka Mangkunegara V mengangkat Raden Tumenggung Ariasebrata sebagai patihnya.¹¹⁹

Pemecatan patih Djojosoarjo oleh Mangkunegara V atas perintah Belanda tersebut menjadikan pemerintah kolonial dalam hal ini residen Surakarta berkuasa penuh atas kehidupan di Praja Mangkunegaran terutama di bidang keuangan dan perekonomian. Semasa Mangkunegara V berkuasa, banyak terjadi beberapa pergantian residen untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di Praja

¹¹⁶ *Dhuwit gantungan* adalah sewa tanah lungguh yang karena kematian, kembali kepada raja. Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 75

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Raden Tumenggung Djojosoarjo sesungguhnya seorang pejabat kerajaan yang cakap. Ia telah menjadi patih sejak Mangkunegara IV berkuasa dan telah mengantarkan sukses ekonomi Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV. Wasino, 2008, *Op.Cit.*,

¹¹⁹ Muhammad Dalyono, *Op.Cit.*, hal 23

Mangkunegaran. Residen-residen itu antara lain Residen Spaan (1888 – 1889), Residen Burnaby Lautier (1890 – 1893), Residen Hora Siccama (1894 – 1896):

a. Masa Pemerintahan Residen Spaan

Dipecatnya patih Djojosoaroso oleh Prangwedana V atas perintah Belanda, menyebabkan hubungan antara Mangkunegara V dengan pihak pemerintah kolonial Belanda terutama residen Surakarta menjadi tidak baik. Prangwedana tidak dapat dihubungi oleh pihak pemerintah Belanda setelah peristiwa pemecatan tersebut. Ia berpura-pura sakit dan tidak mau mendengarkan semua nasehat yang diberikan oleh residen Spaan mengenai masalah keuangan dan perekonomian Praja Mangkunegaran. Bahkan Mangkunegara V tidak mau menerima dan menemui residen Spaan saat berkunjung ke Praja Mangkunegaran.

Sikap Mangkunegara V yang tidak kooperatif terhadap keputusan pemerintah kolonial, menyebabkan Praja Mangkunegaran secara tidak langsung diambil alih oleh residen dalam masalah perekonomiannya. Sebagai residen yang mengurus perekonomian dan keuangan Praja Mangkunegaran yang Spaan melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan di Praja Mangkunegaran. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang menjadi kebijakan residen Spaan, maka diangkatlah seorang *superintenden*. Pejabat ini bertanggung jawab langsung kepada residen. Untuk pertama kalinya diangkat menjadi *superintenden* adalah C.A. Rosemeier, mantan komisi keuangan Mangkunegaran.¹²⁰ Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh residen Spaan antara lain:

¹²⁰ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 6.

1. Melakukan Penghematan

Penghematan yang dilakukan oleh Residen Spaan terhadap Praja Mangkunegaran tidak hanya berupa pengurangan jumlah pegawai dan penurunan gaji serta tunjangan. Para keturunan raja dan pegawai-pegawai tertentu tidak lagi diberikan gaji berupa uang tetapi tanah lungguh (*apanage*) sehingga kembali lagi pada jaman Mangkunegara IV sebelum menarik tanah lungguh. Akibat dari tindakan ini maka anggaran gaji dan tunjangan yang sebelumnya berjumlah f 550.000,- berkurang menjadi f 250.000,- setahun.¹²¹

Tunjangan untuk para pangeran dan keturunan dekat dari Praja Mangkunegaran ditabung. Pengeluaran semula berjumlah f 239.556,341 dikurangi menjadi f 182.017,17 tiap tahunnya. Selain itu gaji untuk Prangwedana sendiri hanya mengambil setengah dari gaji semuanya yaitu dari f 10.000 menjadi f 5.000 tiap bulannya. Pengeluaran untuk para pegawai juga dilakukan, yang awalnya pengeluaran tersebut mencapai f 95.168,40 menjadi f 51.657,40 per tahun.¹²² Jumlah pengeluaran untuk pegawai dapat dikurangi karena banyak pegawai yang dilepas karena tidak diperlukan lagi.

Selain itu pimpinan yang mengurus perkebunan kopi disederhanakan menjadi hanya satu orang inspektur yang dulunya ada dua inspektur. Bagian *Reksowibowo* yang menangani masalah makan istana juga diadakan penghematan dan perubahan. Makanan untuk raja dan keluarganya tidak dapat semewah seperti sebelumnya, begitu juga makanan untuk binatang-binatang peliharaannya juga tidak diberi makanan yang mewah seperti bistik. Akibat dari penghematan dan

¹²¹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 11

¹²² Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 79

perubahan-perubahan tersebut maka pengeluaran Praja Mangkunegaran dapat ditekan sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran.

2. Menjalankan kembali Pabrik Gula Kemiri

Semakin memburuknya keuangan Praja Mangkunegaran membuat Residen Spaan berinisiatif untuk menjalankan kembali pabrik gula Kemiri yang sejak bulan April 1886 ditutup dan tanahnya digunakan oleh pabrik gula Tasikmadu. Pembukaan kembali pabrik gula Kemiri pada tahun 1888 tersebut karena menurut residen Spaan letak dan syarat-syaratnya begitu baik sehingga diharapkan mampu untuk mengeksploitasinya dengan baik. Letaknya yang hanya 2 km dari stasiun Kemiri sehingga mempermudah pengangkutannya. Selain itu pemilik perusahaan di dekatnya bersedia untuk menanam tebu dan menjualnya dengan harga f 0,25 per pikul. Sedangkan harga sesudah sampai di pabrik menjadi f 0,275 tiap pikul.¹²³

Menurut perhitungan yang dilakukan oleh residen Spaan, pabrik gula Kemiri diharapkan akan menghasilkan produksi tebu minimal 8.000 pikul dengan keuntungan per pikulnya sebesar f 2,50,-, sehingga keuntungannya dapat mencapai sebesar f 20.000,-.¹²⁴ Rencana perhitungan tersebut dilakukan karena alat-alat di pabrik gula Kemiri mengalami perbaikan dan pembaharuan. Pabrik gula Kemiri menggunakan alat penggilingan tri ganda dari pabrik gula Colomadu dan penggilingan molen dari pabrik gula Tasikmadu. Perbaikan dan penambahan peralatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan produksi gula yang banyak. Tetapi setelah pabrik gula Kemiri berjalan selama satu tahun hanya menghasilkan

¹²³ *Ibid.*, hal 15

¹²⁴ *Ibid.*,

gula kurang lebih 3.000 pikul, sehingga melenceng dari perhitungan awal.¹²⁵ Akhirnya eksploitasi di pabrik gula Kemiri dihentikan dan hanya menghasilkan keuntungan yang kecil bahkan kerugian.

3. Mendirikan Pabrik Nila

Di Jawa tanaman Nila disebut *tom*, sedangkan di Sunda disebut *tarum*, yang banyak di tanam di pulau Jawa.¹²⁶ Tanaman Nila pohonnya tumbuh setinggi 3 ½ kaki, dan biasanya tanaman ini ditanam di satu bidang tanah yang lebih tinggi dari sawah. Tanaman ini tumbuh baik di daerah pegunungan tetapi juga dapat hidup di daerah dataran rendah. Jenis tanaman Nila yang baik biasanya di tanam di tegal, di atas tanah yang subur dan tidak terganggu oleh tanaman lain, dengan ketinggian mencapai lebih dari 5 kali, dan buahnya lebih lebat.

Pada tahun 1888 residen Spaan memutuskan untuk mendirikan pabrik Nila Moyoretno. Pabrik ini didirikan di sebelah selatan jalan Karangpandang – Matesih di kaki gunung Lawu. Penanaman tanaman Nila pertama dilakukan di lahan seluas 213 hektar.¹²⁷ Residen Spaan memberikan alasan mengenai pembudidayaan tanaman Nila serta pendirian pabrik Nila Moyoretno. Alasan tersebut yaitu desa-desa yang dulunya digunakan untuk keperluan pembudidayaan tanaman kopi, tetapi akibat adanya hama daun yang menyerang tanaman kopi maka mengalami kegagalan dan menderita kerugian. Kalau disewakan kepada orang Jawa, maka tanah-tanah tersebut akan menghasilkan f 9.000 tiap tahunnya, sedangkan jika disewakan kepada orang Belanda akan menghasilkan kurang lebih

¹²⁵ *Ibid.*, hal 16

¹²⁶ Thomas Stamford Raffles, 2008, *The History of Java*, Jakarta: PT. Buku Kita, hal 86

¹²⁷ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 17

f 13.000 tiap tahunnya. Laba dari pabrik Nila itu dalam tahun pertama setelah dikurangi biaya pembangunan, upah administrasi dan lain-lain, diperkirakan sebanyak f 10.000,- dan dalam tahun-tahun berikutnya dapat mencapai f 40.000,- tiap tahunnya.¹²⁸

Setelah berjalannya pembudidayaan tanaman Nila tersebut baru terbukti bahwa Residen Spaan terlalu optimis dalam memperhitungkan mengenai hasil dari tanaman nila tersebut. Pembudidayaan tanaman Nila mengalami kegagalan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tanaman nila tersebut. Selain itu juga sulit untuk memperkirakan harga di pasaran Eropa berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, karena sistem pengadaan bahan bakunya yang penuh paksaan, serta karena para bupati yang bertanggung jawab mengawasi produksi itu seringkali bertindak ceroboh yang menyebabkan kegagalan panen.¹²⁹

4. Pembudidayaan Kopi

Kopi merupakan salah satu sumber pemasukan untuk keuangan Praja Mangkunegaran. Pada waktu Residen Spaan mulai ikut campur mengenai masalah keuangan Paraja Mangkunegaran, ia melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan perkebunan kopi guna memperbaiki keuangan Praja Mangkunegaran. Pada bulan Agustus 1889 Residen Spaan memohon izin kepada pemerintah untuk menjual kopi di pasaran bebas, sehingga hasil keuntungannya lebih banyak. Tidakan Residen Spaan tersebut pada hakikatnya supaya pemerintah kolonial Belanda mau melepaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Thomas Stamford Raffles, 2008, *Op.Cit.*,

penjualan kopi supaya dapat di ambil untuk keperluan Praja Mangkunegaran. Pelaksanaan tersebut tidak berhasil karena dari pihak pemerintah kolonial tetap menginginkan keuntungan yang besar dan tidak mau rugi.

Pada saat perkebunan kopi mengalami masa-masa yang sulit justru perusahaan-perusahaan swasta diringankan beban dalam hal penyewaan tanah. Selain itu kebijakan dari residen Spaan yaitu menggantikan administratur-administratur Jawa dengan administratur-administratur dari Belanda. Hal itu karena administratur-administratur Jawa dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya, tetapi di lain pihak penggantian administratur tersebut supaya dalam pelaksanaan dan pengawasannya lebih mudah. Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Residen Spaan adalah mengurangi jumlah daerah penanaman kopi menjadi 16 daerah. Pengurangan daerah penanaman kopi tersebut tidak termasuk pada tanah-tanah kopi yang asli yaitu Tirtomoyo dan Ngadirojo. Hal itu karena kedua daerah tersebut menghasilkan kopi yang cukup banyak. Selain itu daerah-daerah kopi yang lain yang dulunya diwajibkan bagi setiap keluarga menanam 1000 pohon kopi dikurangi menjadi 750 pohon kopi, tetapi harus membayar pajak.¹³⁰

Pada tahun 1850 baru empat wilayah bagi penanaman kopi di Mangkunegaran, tetapi sejak pembebasan tanah-tanah *apanage* telah berkembang menjadi 24 wilayah. Penanaman kopi di 24 wilayah di Mangkunegaran ditangani secara serius dengan mendatangkan administratur kopi dari Eropa. Dari 24 wilayah itu, masing-masing dikepalai oleh seorang administratur yang bergelar panewu kopi atau mantri kopi. Di setiap daerah didirikan sebuah gudang untuk

¹³⁰ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 18.

penampungan kopi dan sebuah “pesanggrahan” atau pos sebagai tempat tinggal.¹³¹ Ke-24 daerah Administratur itu berada dibawah dua orang *Penilik* atau *Ispektur* yaitu Inspektur J.B. Vogel, berkedudukan di Tawangmangu dan Inspektur L.J. Jeanty, berkedudukan di Betal daerah Nguntaranadi. Setiap Inspektur membawahi 12 bagian. Setiap bagian memiliki pesanggrahan, tempat tinggal pengurus dan gudang. Di bawah Inspektur J.B. Vogel yaitu cabang Karang pandan, Tawangmangu, Jumopolo, Jumopuro, Jatipuro, Ngadiharjo, Sidoharjo, Girimarto, Jatisrono, Slogohimo, Bulukerto dan Purwantoro (dengan 9 pengurus Eropa dan 3 panewu kopi). Inspektur L. J. Jeanty harus mengawasi Nguntoronadi, Wuryantoro, Ngeromoko, Pracimantoro, Giritantro, Baturetno, Batuwarno, Seogiri, Singosari, Gubug dan Ngawen (dengan 7 pangurus Eropa, 2 panewu, dan 3 mantri kopi).¹³²

Tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Residen Spaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selama dua tahun menjabat sebagai Residen (1888-1889) yang mengurus keuangan Praja Mangkunegaran, bukanya mengalami kenaikan saldo tetapi justru mengalami penurunan saldo keuangan Praja Mangkunegaran. Meskipun Residen Spaan dalam pengambilan kebijakannya menitik beratkan pada sektor perusahaan-perusahaan perkebunan, tetapi kenyataannya pemasukan keuangan Praja Mangkunegaran pada tahun 1889 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 1888. Di bawah ini daftar penerimaan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran dan perusahaan-perusahaan perkebunan:

¹³¹ Soetono, 1987, *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, Kode Arsip 92, hlm 15.

¹³² *Ibid*

Tabel 2.5

**Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Praja Mangkunegaran dan
Perusahaan-perusahaan Perkebunan (dalam gulden)**

Tahun	Praja		Perusahaan-perusahaan		Saldo		
	Pemasukan	Pengeluaran	Pemasukan	Pengeluaran	Praja	Perush.	Total
1888	132.755	320.510	675.211	428.098	-187.755	247.113	59.358
1889	171.813	375.794	542.148	470.774	-203.982	71.374	-132.608

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 18

Dari daftar di atas dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan keseimbangan keuangan Praja Mangkunegaran bergantung pada penghasilan dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Meskipun demikian perusahaan-perusahaan perkebunan masih belum dapat menghasilkan keuntungan untuk mengatasi masalah krisis keuangan praja Mangkunegaran. Penyebab berkurangnya keuntungan dari semua perusahaan dari tabel di atas adalah keuntungan dari perkebunan kopi yang hanya setengah dari anggaran sarananya. Pada tahun 1888 keuntungan dari kopi dapat mencapai f 248.497 sedangkan pada tahun 1889 menurun menjadi f 129.503. Selanjutnya budi daya Nila yang diharapkan berhasil baik, justru menderita kerugian yang besar yaitu f 42.188 pada tahun 1888 dan f 37.852 pada tahun 1889.¹³³

Produksi dari ketiga pabrik gula yaitu pabrik gula Colomadu, Tasikmadu dan Kemiri hanya dapat menghasilkan gula sebanyak 33.689 pikul dengan nilai uang sebesar f 315.936,08 pada tahun 1889.¹³⁴ Pada tahun 1889 pabrik gula merupakan sumber pengeluaran yang paling besar yang mencapai f 388.034,28.

¹³³ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 19

¹³⁴ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 62

Pengeluaran tersebut antara lain untuk penanggulangan penyakit *Sereh* yang menyerang tanaman tebu. Selain itu untuk membayar gaji para pegawai yang mencapai f 48.629,76. Pembelian bibit dan pemeliharaan mencapai angka sebesar f 65.125,31, sedangkan pengeluaran untuk pemupukan sebesar f 12.913,10 yang kebanyakan didapat dari pabrik bungkil.¹³⁵ Untuk tunggakan gaji tidak ada karena pada tahun 1888 laporan keuangan tahunan tidak terdapat pengeluaran untuk pabrik gula. Akhirnya pada tahun 1889 keuangan Praja Mangkunegaran mengalami defisit sebesar f 123.608.

Akibat dari kegagalan-kegagalan kebijakan tersebut yang tidak dapat mengatasi masalah krisis ekonomi dan keuangan Praja Mangkunegaran maka Residen Spaan mempunyai gagasan untuk menjual kelima perusahaan yaitu pabrik gula Colomadu, Tasikmadu dan Kemiri, pabrik Nila di Moyoretno serta pabrik Bungkil di Polokarto. Untuk pabrik gula Colomadu dengan tanaman sedikitnya 400 bau (284 ha) ditetapkan harga f 350.000 dan sewa tanah sebanyak f 32.000 setiap tahunnya. Pabrik gula Tasikmadu dengan luas tanam 300 bau (213 ha) dijual dengan harga 300.000 dan sewa tanah f 30.000 setiap tahunnya. Pabrik gula Kemiri dengan areal tanam sedikitnya 120 bau (85 ha) berharga f 80.000 dengan sewa tanah f 10.000 setahunnya. Sedangkan untuk pabrik Nila Moyoretno dengan luas areal tanamnya 400 bau (284 ha) dengan harga f 100.000 dan sewa tanah f 15.000 setahunnya. Untuk pabrik Bungkil di Polokarto dengan areal tanaman 300 bau (213 ha) harganya f 70.000 dan sewa tanah pertahunnya f

¹³⁵ *Arsip Mangkunegaran V* no 80 tentang "Laporan tahunan keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1889", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 8

15.000. Jumlah seluruhnya sebesar f 900.000 dan sewa tanah tahunan seluruhnya f 100.000.¹³⁶

Sudah ada sejumlah penawaran yang dilakukan oleh beberapa pihak, tetapi harganya terlalu rendah. Penawaran yang paling tinggi berasal dari *Internationale Credit en Handels Vereneeging Rotterdam* secara pribadi dan beberapa hari setelah berhentinya Residen Spaan dari *Internatio* sendiri. Agen ini menawarkan ketiga pabrik gula tersebut sebesar f 600.000 dan sewa tanah f 50.000 tiap tahun. Sementara itu *Internatio* sendiri menawarkan lebih tinggi yakni f 650.000 untuk ketiga pabrik gula tersebut dan sewa tanahnya f 55.000 pertahunnya dengan beberapa upaya permintaan untuk mencoba mesin-mesin pabrik terlebih dahulu untuk beberapa waktu.¹³⁷ Semua penawaran itu ditolak karena hasil penjualan masih terlampau rendah untuk menutupi hutang-hutang Praja Mangkunegaran.

Pengeluaran-pengeluaran Praja Mangkunegaran pada tahun 1889 cenderung meningkat karena semakin banyaknya usaha-usaha untuk mengatasi masalah keuangan. Semakin banyak kegiatan untuk dapat menambah penghasilan, maka semakin banyak pula pengeluaran untuk pada awal pelaksanaannya. Pengeluaran pada tahun 1889 melebihi pendapatan Praja Mangkunegaran sehingga mengalami devisa keuangan. Akibat dari itu menambah berat Praja Magkunegaran untuk keluar dari krisis yang melandanya. Usaha-usaha dari residen Spaan untuk dapat memperbaiki keuangan dan perekonomian Praja Mangkunegaran tidak mempunyai gambaran untuk menyelesaikan masalah agar dapat keluar dari krisis tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 April 1890, Reseiden Spaan mengundurkan diri karena sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi krisis

¹³⁶ *Ibid.*, hal 20

¹³⁷ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 65

ekonomi di Praja Mangkunegaran dan sebagai penggantinya adalah O.A. Burnaby Lautier. Penguasa ini merasa mampu untuk menyelesaikan masalah keuangan di Praja Mangkunegaran terutama untuk pabrik gulanya. Akhirnya rencana penjualan pabrik tidak dilanjutkan.

b. Masa Pemerintahan Residen Burnaby Lautier

Residen baru ini berharap dapat mengembangkan perusahaan-perusahaan di Praja Mangkunegaran menjadi lebih baik. Ia merupakan orang yang mempunyai kemampuan yang baik, tetapi suka akan kekuasaan dan tidak mau mendengarkan nasehat. Ia terlalu mementingkan keluarga, dan sangat peka terhadap bujukan dari orang-orang di sekitarnya. Sikapnya yang suka akan kekuasaan menjadikan ia tidak disenangi oleh penguasa-penguasa pabrik di daerah Kasunanan. Mereka beranggapan bahwa Burnaby Lautier lebih memihak kepada Praja Mangkunegaran. Hal itu karena pada pada waktu itu penguasa mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai residen Surakarta dan juga pengusaha.¹³⁸

Langkah awal yang dilakukan Burnaby Lautier setelah diangkat menjadi residen adalah memberhentikan J.L. Bulb sebagai *superintenden* yang merupakan pengganti dari Rosemeier. Selain itu ia juga menginstruksikan kepada para administratur pabrik untuk tidak memberhentikan atau mengganti para staf personil dari orang-orang Belanda tanpa sepengetahuan residen. Pada pemerintahannya yang menjabat residen di Surakarta, tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian Praja

¹³⁸ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Op.Cit.*, hal 77

Mangkunegaran sama dengan residen Spaan pada waktu itu. Tindakan-tindakan tersebut difokuskan pada sektor perkebunan tebu dan kopi serta pabrik gulanya.

1. Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula

Tindakan pertama yang dilakukan oleh residen Burnaby Lautier dalam hal perkebunan tebu dan pabrik gula adalah mengangkat sebuah komisi atau panitia yang beranggotakan dua orang Belanda. Dua orang tersebut adalah J van Soest dan C van Heel. J van Soest adalah mantan pemilik pabrik Kali Bagor sedangkan C van Heel adalah seorang administratur pabrik gula Kartasura.¹³⁹ Komisi atau panitia tersebut bertugas melakukan penyelidikan mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan penanaman, fabrikasi, dan pengawasan pabrik-pabrik gula Mangkunegaran. Selain itu untuk mempercepat kinerja industri gula, residen Lautier mengadakan reorganisasi dalam pengelolaan dan administrasi pabrik gula Praja Mangkunegaran sejak tanggal 1 Desember 1890.

Komisi tersebut mengadakan pengamatan mengenai kedua pabrik gula yaitu pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Tasikmadu. Dari pengamatan tersebut alat-alat yang digunakan pada pabrik gula Tasikmadu lebih canggih dan modern dibandingkan pabrik gula Colomadu yang sepuluh tahun lebih tua. Untuk dapat meningkatkan hasil dan kualitas gula maka komisi tersebut mengadakan perbaikan-perbaikan di kedua pabrik gula tersebut terutama untuk pabrik gula Colomadu. Komisi tersebut juga melaporkan bahwa budidaya tebu ini setelah diadakan beberapa perbaikan mampu membuat keuntungan bersih sebesar

¹³⁹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 21

f110.000 tiap tahunnya.¹⁴⁰ Berdasarkan laporan tersebut dan supaya dapat terealisasi maka residen Burnaby Lautier mengangkat C van Heel sebagai *Superintenden* menggantikan JL Bulb.

Selain itu, residen membeli tanah Kutuan yang bertujuan supaya pabrik gula Tasikmadu memperoleh penyediaan air yang baik. Pembelian tersebut sebesar f 44.000, yang akan dibayar secara berangsur sebesar f 4.400 selama 10 tahun dengan bunga 6%.¹⁴¹ Pembelian tersebut tidak sesuai dengan harapan karena ternyata air untuk pabrik gula Tasikmadu tidak dapat dialirkan ke pabrik. Lebih parahnya lagi pembayaran uang sewa tanah Kutuan dibebankan kepada pabrik Nila Moyoretno sebanyak f 2.577 tiap tahunnya dengan cara memperluas areal tanamnya. Sejak dari sistem tanam paksa pengembangan gula dan perkebunan Nila selalu merugikan masyarakat setempat. Hal ini karena kedua perkebunan tersebut telah mengambil lahan, tenaga kerja, dan air dari penanaman beras.¹⁴²

Meskipun pembelian tanah Kutuan mengalami kegagalan fungsi, tetapi residen Burnaby Lautier tidak mengoreksi diri, justru memperpanjang sewa tanah Tawang dan Klodran. Penyewaan tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan pabrik gula Colomadu. Tanah-tanah tersebut digunakan sebagai areal penanaman tebu untuk pabrik gula Colomadu. Sewa yang harus dibayar untuk kedua tanah tersebut adalah masing-masing sebesar f 6.200 dan f 12.983 tiap tahunnya. Meskipun areal penanaman tebu diperluas tetapi pertumbuhan produksi berasal dari kemajuan teknologi bukan dari luas areal tanam. Hal itu terbukti pada

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal 22.

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² Ricklefs, M.C, *Op.Cit.*, hal 265.

kenaikan hasil gula dari tahun 1885 sampai tahun 1900. Pada tahun 1885 produksi gula di Jawa berjumlah 380.400 metrik ton dan hanya sedikit di bawah 400.000 metrik ton pada tahun 1895 dan 744.300 metrik ton pada tahun 1900.¹⁴³

2. Pembudidayaan Perkebunan Kopi

Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas ekspor yang dibawa ke Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke-18, dan menjadi satu tanaman yang dimonopoli oleh pemerintah Belanda. Di Praja Mangkunegaran penanaman kopi sudah dilakukan sejak pemerintahan Mangkunegara I dan berkembang pesat pada masa Mangkunegara IV. Secara keseluruhan tanaman kopi mencapai puncak produksinya pada abad XIX sekitar tahun 1880-1884 yang mencapai 94.400 ton. Dan pada waktu itu tanaman kopi jauh lebih penting dibandingkan dengan tanaman tebu. Kalau nilai ekspor kopi rata-rata antara tahun 1865-1870 mencapai 25.965.000 gulden , maka periode yang sama nilai ekspor rata-rata gula tebu hanya mencapai 8.416.000 gulden.¹⁴⁴

Kemunduran produksi kopi juga terjadi di Praja Mangkunegaran bahkan pada periode tahun 1888 rata-rata produksinya hanya mencapai 18.228 kuintal pertahunnya. Agar dapat meningkatkan produksi kopi maka residen Burnaby Lautier mengangkat H.W. Camphuys sebagai kepala budidaya kopi dengan gelar inspektur.¹⁴⁵ Pengangkatan seorang inspektur pada perkebunan kopi, maka jumlah pengeluaran pun juga mengalami peningkatan karena seorang ispektur mendapat

¹⁴³ *Ibid.*, hal 271

¹⁴⁴ Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, 1991, *Kopi Kajian Sosial Ekonomi*, Yokyakarta: Aditya Media, hal, 15.

¹⁴⁵ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 23

kenaikan gaji dan tunjangan. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan Praja Mangkunegaran dalam sektor perkebunan kopi, maka residen Burnaby Lautier meminta permohonan kepada Gubernur Jenderal di Batavia yang intinya supaya penjualan kopi dijual di pasar bebas. Hal itu karena selama ini sejak masa Mangkunegara IV penjualan kopi hanya kepada pemerintah kolonial Belanda saja dalam bentuk penyerahan. Akibat dari itu maka harga kopi pun ditentukan oleh pemerintah kolonial sehingga sangat merugikan pihak Praja Mangkunegaran. Permohonan dari residen tersebut oleh Gubernur Jendral memberikan kebebasan untuk melaksanakannya, tetapi mendapat penolakan oleh Menteri Jajahan. Hal itu karena peraturan mengenai penjualan kopi tersebut sudah berlangsung selama 60 tahun dan merupakan penghasilan untuk pemerintah kolonial.

Penolakan atas usulan dan permohonan dari residen Burnaby Lautier kepada pemerintah kolonial pusat tidak membuat Residen putus asa. Pada bulan Agustus 1892 Residen kembali mendesak kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan kebebasan atau menaikkan harga penyerahan kopi. Desakan tersebut akhirnya disetujui untuk panen tahun 1893 dengan rincian untuk kopi kualitas nomor satu harganya f 30 tiap pikulnya, sedangkan f 15 per pikul bagi kualitas kopi nomor dua.¹⁴⁶ Persetujuan tersebut dilakukan karena Gubernur Jenderal takut jika Praja Mangkunegaran menanam tanaman lainnya yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman kopi, sehingga jika itu sampai terjadi maka sama sekali tidak menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Akibat dari kenaikan harga penyerahan, maka bertambah pula pemasukan untuk kas Praja Mangkunegaran.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal 24

Di bawah ini laporan keuangan selama Burnaby Lautier menjabat residen sekaligus yang menangani masalah keuangan di Praja Mangkunegaran. Hasil di bidang keuangan Praja Mangkunegaran ini berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh residen Burnaby Lautier yang menjabat selama empat tahun. Laporan keuangan ini hanya menitik beratkan pada pemasukan dan pengeluaran yang berasal dari Praja dan sektor perkebunan atau perusahaan.

Tabel 2.6

Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Praja Mangkunegaran

(dalam gulden)

Tahun	Praja		Perusahaan		Saldo		
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Praja	Perush.	Total
1890	211.584	248.937	572.759	437.129	-37.353	135.630	98.277
1891	325.547	288.074	846.432	638.329	37.473	208.103	245.576
1892	369.036	304.783	682.759	705.783	64.253	-23.024	41.230
1893	336.416	349.188	756.079	763.378	-12.772	-7.299	-20.071

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 25

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemasukan dari sektor ketataprajaan tidak begitu menonjol dibandingkan dari sektor perusahaan yang relatif nampak perbedaannya. Kenaikan pemasukan praja terlihat mencolok pada tahun 1890 dan 1891. Hal itu karena disebabkan oleh bertambahnya sewa tanah Jawa terutama sewa tanah dari perusahaan-perusahaan perkebunan, baik perusahaan perkebunan dari pihak asing maupun dari pihak sendiri. Pemasukan dari sektor perkebunan masih didominasi oleh perkebunan tebu/gula dan perkebunan kopi. Meskipun dari pemasukan praja mengalami peningkatan dari tahun 1891, tetapi dalam jumlah pengeluaran tahun 1890 mengalami defisit.

Defisit keuangan dari sektor praja tersebut kemungkinan akibat dari gaji dan tunjangan pegawai-pegawai di Praja Mangkunegaran. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi sebab defisitnya keuangan praja. Hal itu karena sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam ketataprajaan. Pada tahun 1890 gaji para pegawai tidak dapat dibayarkan semuanya sehingga tunggakan-tunggakan yang lama tidak ada yang diangsur. Selain itu pengeluaran dalam rangka pernikahan adaik dari Mangkunegara V juga dimasukkan dalam pengeluaran praja. Meskipun pengeluaran dalam sektor praja membengkak yang mengakibatkan defisit, tetapi masih dapat ditutup dengan pemasukan dari sektor perusahaan perkebunan.

Pada tahun 1891 pemasukan untuk Praja Mangkunegaran sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain selama masa residen Burnaby Lautier. Pemasukan keuangan tersebut didapat dari perkebunan kopi dan pabrik gula. Produksi kopi pada tahun 1891 dapat mencapai 10.000,15 pikul untuk kualitas pertama dan 2.612,01 pikul untuk kualitas kedua. Untuk setiap pikulnya kopi kualitas pertama sebesar f 26,66 sedangkan untuk kualitas kedua dihargai f 13,33.¹⁴⁷ Penerimaan dari perkebunan kopi pada tahun 1891 mencapai f 305.109 meninggakat tajam dibandingkan pada tahun 1890 yang hanya sebesar f 65.098.¹⁴⁸ Sementara itu untuk pemasukan dari pabrik gula justru lebih tinggi tahun 1890 dibandingkan tahun 1891. Pada tahun 1890 pemasukan dari pabrik gula mencapai f 519.963 sedangkan pada tahun 1891 hanya sebesar f 467.570.¹⁴⁹ Berkurangnya

¹⁴⁷ *Arsip Mangkunegaran V* no 88 tentang "Laporan tahunan Mengenai Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1891", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 5

¹⁴⁸ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 26

¹⁴⁹ *Ibid.*,

pemasukan tersebut karena digunakan untuk memperbaiki dan mengganti mesin-mesin pabrik gula yang sudah usang. Untuk perbaikan-perbaikan tersebut menghabiskan biaya f 41.879,76.¹⁵⁰

Pada tahun 1892 pemasukan untuk Praja Mangkunegaran turun sangat drastis sekali hingga mencapai nominal f 41.230 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai f 245.576. Hal ini terjadi karena pemasukan dari sektor pekebunan hanya difokuskan pada perkebunan tebu/gula sedangkan untuk perkebunan kopi tidak begitu mendapat perhatian khusus lagi. Meningkatnya hasil dari produksi pabrik gula, menjadikan perkebunan kopi tidak lagi menjadi sumber pemasukan terbesar bagi Praja Mangkunegaran. Produksi kopi pada tahun 1892 hanya mencapai f 78.458 sedangkan produksi dari pabrik gula mencapai f 531.644 naik f 64.074 dari tahun 1891.¹⁵¹ Meskipun dari sektor perusahaan dan perkebunan mengalami defisit keuangan, tetapi masih bisa ditutupi oleh pemasukan dari ketataprajaan.

Saldo Praja Mangkunegaran dari tahun ke tahun semakin sedikit, akibatnya pada tahun 1893 mengalami minus pemasukan. Meskipun pemasukan dari perusahaan gula merupakan pemasukan yang paling tinggi pada saat Burnaby menjabat sebagai residen Surakarta, tetapi tidak dapat menutupi jumlah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan ketataprajaan dan juga pemeliharaan, pelaksanaan perkebunan. Selain itu pengeluaran untuk tunggakan-tunggakan gaji serta utang masih harus dibayar karena masih belum dapat melunasinya. Tahun 1893 penghasilan kopi hanya sebesar 2665,50 pikul untuk

¹⁵⁰ *Arsip Mangkunegaran V* no 88, *Op.cit.*, hal 7

¹⁵¹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Log.Cit.*,

kualitas pertama dan 486,30 pikul untuk kualitas kopi kedua. Dari hasil perkebunan kopi tersebut hanya menghasilkan pendapatan sebesar f 77.544,61.¹⁵²

Penghasilan dari kedua pabrik gula Praja Mangkunegaran yaitu PG Tasikmadu dan PG Colomadu berturut-turut sebesar 37.729,75 dan 34.056,36 pikul. Dari jumlah produksi tersebut menghasilkan pendapatan sebesar f 683.038,45.¹⁵³ Meskipun perusahaan-perusahaan gula menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi jumlah pengeluaran untuk perusahaan dan perkebunan tersebut juga besar bahkan melebihi dari pemasukannya. Pemasukan dari perkebunan kopi hanya sebesar f 77.544,61 tetapi pengeluarannya mencapai f 110.640,31.¹⁵⁴ Tidak beda halnya untuk perusahaan gula yang jumlah pengeluarannya mencapai f 640.215,07, sehingga pendapatan bersihnya hanya sebesar f 42.823,38.¹⁵⁵ Jumlah yang sangat kecil jika dilihat dari jumlah yang dihasilkannya.

Eksistensi tanaman kopi sebagai tanaman yang memberikan pendapatan terbesar untuk Praja Mangkunegaran mulai tergantikan dengan perkebunan tebu/gula. Perkebunan tebu mendapatkan perhatian lebih pada masa residen Burnaby Lautier karena mulai berkembang lagi meskipun pada tahun 1885 mengalami krisis gula. Bahkan residen membuat hubungan kerja yang jelas antara *superintendenten* dengan para administrator yang dituangkan dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan tahun 1892 oleh *superintendenten* dengan persetujuan Mangkunegara V. Dalam aturan tersebut ditentukan tugas dari para administrator hanya pelaksana teknis di pabriknya masing-masing dan peningkat penghasilan

¹⁵² *Arsip Mangkunegaran V* no 92 tentang “Laporan tahunan Mengenai Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1893”, Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 4

¹⁵³ *Ibid.*, hal 5

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal 9

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal 11

dari pabrik yang dipimpinnya. Semua pekerjaan yang memerlukan kekuasaan wajib berkonsultasi dengan *superintenden* karena *superintenden* merupakan wakil dari pemilik pabrik.

Selain itu peraturan tersebut juga memuat mengenai penjualan gula melalui para perkumpulan dagang di Semarang dan juga harus berkonsultasi dengan *superintenden*. Para administrator juga memiliki wewenang kepegawaian dalam pabrik, tetapi penentuan terakhir tetap harus berkonsultasi dengan *superintenden*, termasuk menentukan jumlah gaji yang harus diterima oleh para pekerja. Akan tetapi persoalan mengenai pemecatan terhadap seorang pegawai pabrik harus mendapat pertimbangan dari *superintenden* dan Mangkunegara.¹⁵⁶ Kontrol *superintenden* terhadap administrator cukup ketat. Para administrator diwajibkan membuat surat laporan kepada *superintenden* setiap sepuluh hari sekali mengenai pelaksanaan tugasnya, atau paling tidak setiap tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya.¹⁵⁷ Aturan ketat terhadap administrator tersebut dilakukan supaya wabah hama penyakit khususnya *sereh* segera dapat ditanggulangi sehingga kualitas tebu semakin membaik.

Selama kepengurusan Residen Burnaby Lautier indikasi membaiknya pabrik gula sudah tampak. Indikatornya terlihat dari meningkatnya luas tanam dan produksi gula, serta pendapatan penjualan gula. Selain karena kualitas menejemen, membaiknya kinerja pabrik gula juga dipengaruhi oleh naiknya harga di pasaran dunia sejak tahun 1894. Meskipun dalam perusahaan gula mengalami perkembangan yang relatif baik, tetapi hal tersebut belum dapat membuat Praja

¹⁵⁶ *Serat Pranatan Cecepeganipun Para Administratur ing Pabrik Gendis Bawahing Mangkunegaran tahun 1892*, dalam *Arsip Reksa Pustaka MN V 197*

¹⁵⁷ Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 69

Mangkunegaran keluar dari krisis ekonomi. Akhirnya setelah residen Burnaby Lautier berhenti digantikan oleh Hora Siccama.

c. Masa Pemerintahan Residen Hora Siccama

Meninggalnya residen Burnaby Lautier pada tahun 1894, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran diserahkan kepada penggantinya yaitu Jonkheer Louis Thomas Hora Siccama. Residen baru ini mempunyai pandangan yang berbeda dibandingkan dengan residen pendahulunya dalam mengatasi masalah krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran. Hal itu karena residen Hora Siccama berpegang pada hasil laporan J. Mullemeister.¹⁵⁸ Setelah diangkat menjadi Residen Surakarta, ia mengusulkan agar Jan Adriaan Carel de Kock van Leeuwen¹⁵⁹ diangkat sebagai *superintenden* yang mengawasi perusahaan gula Colomadu dan Tasikmadu, pabrik nila di Mojoretno serta pabrik bungkil di Polokarto. Hal itu karena administratur Colomadu yaitu E. Bedier de Prairie yang menjabat sebagai *superintenden* setelah menjadi pegawai tetap ternyata kurang baik hasil pekerjaannya.¹⁶⁰

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh residen Hora Siccama masih difokuskan pada sektor perkebunan tebu termasuk perusahaan-perusahaan gulanya dan juga perkebunan kopi.

¹⁵⁸ J. Mullemeister adalah salah seorang anggota Dewan Belanda yang pada tahun 1889-1891 menjabat sebagai Residen Yogyakarta dan pada tahun 1893 diberi tugas melakukan penyelidikan mengenai keadaan perusahaan-perusahaan Belanda. Selain itu juga mempunyai tugas sampingan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Mangkunegaran dengan cara melakukan pengawasan di Praja Mangkunegaran. A.K Pringgogidgo, 1988, *Op.Cit.*, hal 27

¹⁵⁹ J.A.C. De Kockvan Leeuwen adalah mantan administrator pabrik gula di Jepara. Wasino, 2008, *Op.Cit.*, hal 72

¹⁶⁰ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1986, *Op.cit.*, hal 118.

1. Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula

Tindakan dalam perkebunan tebu pada masa residen Hora Siccama tidak seperti para pendahulunya. Melalui *superintendennya* peningkatan produksi gula tidak ditekankan pada ekspansi untuk memperoleh keuntungan perusahaan seperti pendahulunya tetapi menekankan pada efisiensi dan peningkatan kualitas gula. Akibat dari kebijakan tersebut, pada tahun 1895 industri gula Praja Mangkunegaran masih memperoleh keuntungan yang lebih besar, meskipun harga gula pada waktu itu mengalami penurunan.

Efisiensi terjadi pada proses pemanenan dan pabrikasi. Proses pemanenan dikerjakan dengan cepat dan pengolahan gula dengan penerapan cara kerja baru sehingga pemakaian *beenzwart* tidak diperlukan lagi sehingga biaya produksi dapat dihemat sebesar f 0,30 tiap pikul (f 0,49 tiap kuintal), serta penampilan gulanya kelihatan lebih baik. Pabrik gula Colomadu yang semula menerima no. 13 gula SS, ketika itu meningkat menjadi no. 16 yang harganya lebih tinggi f 0,75 per pikul atau f 0,21 per kuintalnya. Pabrik gula Tasikmadu untuk gula HS-nya mendapat nomor satu tingkat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sehingga mendapat harga lebih tinggi f 0,25 per pikul atau f 0,40 per kuintalnya. Sementara itu untuk gula SS-nya menerima tiga nomor lebih tinggi.¹⁶¹ Efisiensi juga terlihat dengan dilarangnya pemberian gula secara gratis kepada orang-orang yang sama sekali tidak berhak.¹⁶²

Pengangkatan J.A.C. de Kock van leeuwen sebagai *superintenden* oleh residen Hora Siccama sangat tepat. hal itu terlihat dalam laporan tahunan pada

¹⁶¹ Gula HS singkatan dari *Hoofd Suiker* atau gula murni, SS singkatan dari *Stroop Suiker* atau gula sirup. Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 32

¹⁶² Wasino, 2008, *Log.Cit.*

tahun 1894 yang menyebutkan sebagai berikut: ”*Dengan senang hati dapat saya katakan, bahwa Superintenden yaitu J.A.C. de Kock van Leeuwen telah memenuhi segala harapan kami, karena itu saya dengan dukungan Mangkunegara dapat berharap semoga Mangkunegara beberapa tahu lagi sudah dapat dibebaskan dari beban hutang yang sangat berat*”.¹⁶³

Pada tahun 1895 tepatnya pada tanggal 30 April 1895, atas permintaan residen Hora Siccama, maka Mangkunegara V menentukan bahwa *Superintenden* harus berkedudukan di Surakarta. Permintaan tersebut dilakukan karena keberhasilan *superintenden* de Kock van Leeuwen dalam mengurangi beban hutang Praja Mangkunegaran. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1895 J.A.C. de Kock van Leeuwen tinggal di Solo. Selain mengurus masalah perusahaan gula, ia juga dipercaya untuk mengawasi urusan di Semarang, dan apabila masih ada waktu ia juga diberikan kebebasan untuk tetap mengurus usahanya di Jepara. Penambahan pekerjaan de Kock van Leeuwen untuk pengawas di Semarang, maka gajinya pun dinaikkan dari f 250 menjadi f 500 tiap bulannya mulai bulan Juni 1895.¹⁶⁴ Pembayaran gaji tersebut dibebankan kepada perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran. Untuk pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu dibebani sebesar 4/5 yang masing-masing setengahnya dan 1/5 bagian dibebankan kepada pabrik nila Mojoretno.¹⁶⁵ Akhirnya pada masa residen Hora Siccama dan *superintenden* J.A.C. de Kock van Leeuwen produksi gula dari perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran mulai sehat lagi.

¹⁶³ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1986, *Op.Cit.*, hal 119

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal 120

¹⁶⁵ *Ibid.*,

2. Pembudidayaan Perkebunan Kopi

Pembudidayaan tanaman kopi lebih difokuskan pada penghematan terhadap pengeluaran untuk pegawainya. Hal itu karena areal penanaman kopi sudah cukup luas dan juga untuk setiap warga diwajibkan untuk menanam tanaman kopi. Residen Hora Siccama memerintahkan kepada inspektur Camphuys untuk mengeksploitasi perkebunan kopi dengan cara mengurangi gaji dan menaikkan tunjangan-tunjangan (*Cultuurprosenten*) untuk pegawai Eropa. Pegawai bumiputra dibayar dengan sewa tanah dan memecat personil yang berlebihan. Akibat dari kebijakan tersebut maka dapat menghemat anggaran sebesar f 12.000 tiap tahunnya.¹⁶⁶

Selain itu residen Hora Siccama memerintahkan kepada asisten residen Wonogiri P.J.F van Heutsz untuk menyusun sebuah nota catatan mengenai budidaya kopi dan sebab-sebab kemundurannya. Laporan tersebut menyatakan bahwa organisasi untuk perkebunan kopi tidak ilmiah dan tidak sistematis serta kurang ada pimpinan. Budidaya kopi seperti yang dilakukan itu tidak disukai oleh rakyat. Akibatnya masyarakat kurang memperhatikan pemeliharaannya serta cara yang dilakukan sangat jelek, misalnya di Batuwarno untuk 1 kati (0,6 kg) kopi diperoleh dari 55 pohon.¹⁶⁷ Persoalan-persoalan dari perkebunan kopi berat sekali, diantaranya letak kebun penanamannya jauh dengan tempat tinggal penduduk. Selain itu pihak kolonial juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja, dan seandainya diperoleh, mereka memetik kopi secara sembrono dengan mematahkan dahan-dahannya sehingga mengurangi nilai hasil kopi tersebut.

¹⁶⁶ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Op.Cit.*, hal 32

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal 33

Selain itu desa-desa yang melantarkan kebun kopi biasanya menebang pohon-pohon itu dan mengalihkannya menjadi areal persawahan.¹⁶⁸

Selain itu akibat letak penanaman kopi berjauhan dengan rumah warga yang bekerja di perkebunan kopi, mereka mempunyai inisiatif untuk menanam tanaman kopi di pekarangan rumahnya, tetapi usulan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah Belanda. Larangan untuk menanam kopi di pekarangan rumah warga tersebut merupakan salah satu sebab dari kemunduran budidaya kopi di Praja Mangkunegaran. Residen Hora Siccama tidak dapat melakukan penghematan keuangan lagi karena permasalahannya bukan pada penggunaan pengeluaran tetapi pada pengurusan kebun-kebun kopi.

Di depan sudah dijelaskan bahwa penjualan kopi merupakan politik dari pemerintah kolonial karena penjualan kopi tidak langsung dapat dijual ke pasar bebas melainkan hanya berupa penyerahan kepada pemerintah kolonial. Akibat dari itu residen Hora Siccama berpandangan bahwa "pengaturan pembayaran kopi Mangkunegaran tidaklah ditentukan oleh pertanyaan berapa banyaknya uang yang harus dibayar kepada Raja untuk setiap pikul kopi yang diserahkan agar dia tidak menderita kerugian, melainkan apakah pembayaran tersebut perlu dipertahankan, yang pada hakekatnya hanya berdasarkan kebiasaan terhadap kewajiban Raja untuk menyerahkan kopinya kepada pemerintah, karena penyerahan kopi ini merupakan bagian dari politik Pemerintah mengenai kopi".¹⁶⁹

Akibat dari pernyataan tersebut memungkinkan raja dalam hal ini Mangkunegara V untuk menjual kopi secara bebas, tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi kenaikan harga penyerahan. Hal itu karena kopi merupakan

¹⁶⁸ Robert van Niel, 2003, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES, hal 170-171

¹⁶⁹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Log. Cit.*,

politik pemerintah kolonial yang menjadi salah satu pendapatan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dipandang tidak adil untuk Praja Mangkunegaran sehingga akhirnya residen Hora Siccama mengusulkan agar harga penyerahan dinaikkan lagi, meskipun pada masa residen Burnaby Lautier sudah dinaikkan. Akhirnya berdasarkan telegram pada tanggal 3 Agustus 1895 Menteri memberikan perintah supaya harga penyerahan kopi kepada pemerintah dinaikkan. Kenaikan tersebut menjadi f 35 tiap pikul (f 56,67 per kuintal) untuk 1000 pikul (618 kuintal) yang kualitas pertama, dan f 30 per pikul (f 48,57 per kuintal) untuk kualitas yang kedua, sedangkan sisanya sebesar f 26,66 per pikul (f 43,17 per kuintal).¹⁷⁰

Kenaikan harga penyerahan kopi tersebut sangat menguntungkan pihak Praja Mangkunegaran sehingga pendapatan dari sektor perkebunan kopi meningkat. Hutang dari Praja Mangkunegaran pun sedikit-demi sedikit dapat berkurang. Masa pemerintahan residen Hora Siccama ditandai dengan saldo untung yang semakin banyak, baik dari Praja Mangkunegaran maupun dari perusahaan-perusahaan. Berikut daftar penerimaan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran pada masa residen Hora Siccama:

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal 34

Tabel 2.7

Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Praja Mangkunegaran (dalam gulden)

Tahun	Praja		Perusahaan		Saldo		
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Praja	Perush.	Total
1894	336.753	326.419	1.074.574	944.277	10.334	130.298	140.632
1895	333.054	314.418	917.325	810.237	18.638	107.088	125.724
1896	390.267	345.650	1.083.568	777.724	44.617	305.843	350.460

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 34

Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya pengeluaran dan pemasukan Praja Mangkunegaran dari sektor ketataprajaan relatif stabil dengan kenaikan dan penurunan yang tidak begitu besar. Penerimaan dan pengeluaran sangat mencolok pada sektor perusahaan yaitu terutama kopi dan gula. Pada tahun 1894 pemasukan dari tanaman sebesar f 121.605,855.¹⁷¹ Sedangkan untuk pendapatan dari perusahaan gula baik Tasikmadu maupun Coloadu semuanya berjumlah f 860,723,27 dengan jumlah produksi 77.000 pikul gula utama dengan f 9,35 per pikulnya. Jumlah gula dengan kualitas kedua berjumlah 2.800 pikul dengan harga f 5 per pikul.¹⁷² Selain kedua pabrik perkebunan tersebut juga masih ada pabrik amupun perkebunan yang lain seperti pabrik indigo, kina, nila, dll. Meskipun dari kedua perusahaan perkebunan kopi dan gula menghasilkan pemasukan yang besar, tetapi jumlah pengeluarannya pun juga relatif besar. Untuk kopi sendiri jumlah pengeluarannya sebesar f 108.074,83 sedangkan perusahaan gula sendiri sebesar f 747.738,72.¹⁷³

¹⁷¹ *Arsip Mangkunegaran V* no 97 tentang "Laporan tahunan Mengenai Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1894", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 4

¹⁷² *Ibid.*, 5

¹⁷³ *Ibid.*, hal 14

Pada tahun 1895 produksi dan pemasukan dari perusahaan-perusahaan perkebunan turun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini bukan karena harga kopi dan gula di pasaran menurun melainkan karena hasil dari perkebunan-perkebunan tersebut menurun. Sebagai hasil perbandingan pemasukan dari kopi pada tahun 1894 sebesar f 123.803,355 sedangkan pada tahun 1895 menurun relatif banyak yaitu menjadi f 98.865,75. Bahkan untuk produksi gula penghasilannya menurun hingga lebih dari f 100.000, yaitu pada tahun 1894 sebesar f 806.723,17 turun menjadi f 699.452,83.¹⁷⁴

Meskipun mengalami penurunan, pada tahun 1896 produksi dari perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran kembali membaik dan mendapat pemasukan yang lebih besar dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 1896 pemerintah menaikkan harga kopi sehingga akan menaikkan harga beli rakyat. Kenaikan harga kopi yang sudah lama dinantikan tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 1896. Akibat dari kenaikan tersebut maka *superintenden* de Kock van Leeuwen diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan budidaya kopi, sedangkan Camphuys bertanggung jawab terhadap pengelolaan penanamannya.¹⁷⁵ Dari kebijakan tersebut maka pada tahun 1895 penghasilan dari budidaya kopi sebesar f 94.266,96 dan pada tahun berikutnya sebesar f 127.608,41.¹⁷⁶

Pada masa residen Hora Siccama ini Praja Mangkunegaran mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama pada bidang perkebunan dan

¹⁷⁴ *Arsip Mangkunegaran V* no 98 tentang "Laporan tahunan Mengenai Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1895", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 11

¹⁷⁵ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1986, *Op.Cit.*, hal 132

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal 133

perusahaannya. Hutang-hutang Praja Mangkunegaran juga mulai dapat terbayarkan dan semakin sedikit. Masa residen Hora Siccama ini merupakan masa yang paling berhasil dibandingkan dengan kedua residen sebelumnya yang mengurus Praja Mangkunegaran. Disaat Praja Mangkunegaran mengalami kemajuan yang pesat, Mangkunegara V meninggal pada tanggal 1 Oktober 1896. Meskipun pada masa Mangkunegara V Praja Mangkunegaran belum terbebas sepenuhnya dari hutang-hutangnya, tetapi dua tahun terakhir merupakan hasil terbaik dari bidang perekonomian semasa Mangkunegara V.

BAB IV
DAMPAK KRISIS EKONOMI
PADA MASA MANGKUNEGARA V

Krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V membuat keuangan Praja mengalami devisa dan mengarah menuju kehancuran Praja Mangkunegaran. Dampak krisis ekonomi tersebut tidak hanya terjadi di dalam Praja saja tetapi juga masyarakat serta pemerintah kolonial Belanda. Akibat dari krisis ekonomi tersebut banyak pegawai-pegawai Praja Mangkunegaran tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Masyarakat juga diharuskan bekerja lebih pada perkebunan-perkebunan milik Praja Mangkunegaran. Pihak pemerintah kolonial sendiri pun juga mengalami penurunan pemasukan dari Praja Mangkunegaran akibat hasil dari perkebunan kopi menurun.

Dampak krisis ekonomi Praja Mangkunegaran dapat diklasifikasikan menurut waktu serta penanganannya, yaitu dampak krisis ekonomi sebelum pemerintah kolonial yaitu pada kepengurusan Mangkunegara V dan sesudah pemerintah kolonial Belanda ikut campur.

A. Dampak Krisis Ekonomi pada Masa Mangkunegara V serta Kebijakan-kebijakannya.

Pada masa awal pemerintahan Mangkunegara V, keuangan Praja Mangkunegaran masih stabil bahkan melimpah. Hal itu karena pada masa Mangkunegara IV Praja Mangkunegaran mencapai masa keemasannya. Sayangnya keuangan Praja yang melimpah tersebut tidak digunakan secara hemat

dan tidak dilakukan pembukuan, dan hanya meneruskan apa yang telah dilakukan pada masa Mangkunegara IV. Pada masa Mangkunegara IV pengeluaran yang dilakukan sangat besar, tetapi hal itu sepadan dengan pemasukan yang besar pula dari pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu serta perkebunan kopi. Berbeda pada masa Mangkunegara V tidak terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan karena digunakan untuk bersenang-senang, dan juga banyak terjadi korupsi di kalangan keluarga Praja Mangkunegaran.

Mangkunegara V sangat menjunjung tinggi dan menghormati ayahnya yaitu Mangkunegara IV, sehingga ia tidak mau merubah segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Mangkunegara IV. Akibat dari pemikiran yang seperti itu pada saat Praja Mangkunegaran mengalami krisis ekonomi, Mangkunegara V tetap tidak mau merubah atau mengurangi jumlah pengeluaran Praja. Sudah dapat dipastikan hal tersebut akan membawa Praja Mangkunegaran semakin terpuruk perekonomiannya. Akibat dari krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran tersebut, membawa dampak bagi masyarakat wilayah kekuasaan Praja. Dampak-dampak tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mangkunegara V untuk mengatasi masalah krisis ekonomi dan keuangan Praja Mangkunegaran.

Akibat krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran, Prangwedana mengambil tindakan atau kebijakan yang justru membawa dampak negatif bagi Praja Mangkunegaran maupun masyarakat. Sebagai contoh dari tindakannya yaitu pembudidayaan tanaman tembakau di daerah Keduwang

dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat Jatisrono.¹⁷⁷ Daerah tersebut awalnya merupakan areal penanaman pembudidayaan kopi sehingga akibat dari tindakan ini kebun-kebun kopi yang dulunya dikerjakan oleh masyarakat Jatisrono ditinggalkan dan menjadi terlantar. Selain itu masyarakat pun menjadi lebih sengsara karena tidak dapat menggarap tanah pertaniannya sendiri secara maksimal. Padahal hampir kebanyakan masyarakat di daerah *Vorstenlanden* berprofesi sebagai petani.

Dampak krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran sangat dirasakan terutama di kalangan masyarakat rendahan, terutama para petani. Hal ini karena para petani merupakan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan serta tanah pertaniannya sendiri. Selain itu para petani masyarakat pedesaan masih diberlakukan kerja wajib. Kerja wajib dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. *Kerigan (desa diensten)* untuk perbaikan jalan, pematang, jembatan, dll. *Kerigan* dilakukan lima hari sekali selama lima jam, sedangkan *dines kemit* yaitu menjaga rumah penyewa tanah yang dilakukan dua minggu sekali.
2. *Gugur gunung* yaitu berupa perbaikan infrastruktur desa karena banjir dan gangguan alam. *Gugur gunung* tidak dapat dipastikan kapan dilakukan, tetapi sekurang-kurangnya dilakukan sebulan sekali.
3. *Kerigaji (heerendiensten)* yaitu kerja wajib untuk raja dan *patuh*.
4. Kerja wajib di perkebunan atau *interen (cultuurdiensten)*. Kerja wajib ini biasanya dilakukan pada perkebunan tebu dan kopi. Sebagai contoh kerja

¹⁷⁷ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 62

wajib di pabrik gula yaitu jaga malam di gudang, jaga di kebun-kebun tebu, dll.¹⁷⁸

Akibat dari kerja wajib tersebut maka banyak tanah garapan sendiri terlantar, apalagi setelah terjadi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran banyak masyarakat dipekerjakan di daerah-daerah perkebunan. Hal itu karena sektor perkebunan adalah pemasukan terbesar untuk kas Praja Mangkunegaran. Masyarakat Praja Mangkunegaran semakin diberatkan lagi dengan penambahan-penambahan perkebunan baru yang dilakukan oleh Mangkunegara V untuk meningkatkan keuangan Praja. Diperparah lagi dengan terjangkitnya penyakit tanaman tebu dan kopi di pulau Jawa termasuk perkebunan-perkebunan di Praja Mangkunegaran. Masyarakat semakin diberatkan lagi karena harus bekerja lebih ekstra pada perkebunan-perkebunan yang terkena hama penyakit.

Selain itu akibat dari krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran dan juga terserangnya hama penyakit tanaman perkebunan yang utama yaitu tebu dan kopi, membuat upah yang diterima petani berkurang. Harga gula di pasar dunia mulai merosot karena bersaing dengan gula bit. Akibatnya para pengusaha perkebunan terpaksa memangkas upah pekerja dan mengurangi dana-dana yang dipersiapkan untuk membayar sewa tanah.¹⁷⁹ Secara umum penghasilan petani di daerah *Vorstenlanden* pada tahun 1888, setiap hari 1 *cacah* memerlukan 3 *cangkir* beras (1 *cangkir* = 150 gr) 1,5 sen, trasi 2 sen, gula aren 2,5 sen, gambir 1,5 sen, oncom 1,5 sen, tembakau 5 sen, cabai 1 sen, dan untuk

¹⁷⁸ Suhartono, 1991, *Apanage dan Bekel Perubahan Sosial Pedesaan Surakarta 1930-1920*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal 41-42

¹⁷⁹ Robert van Niel, 2003, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, Jakarta: LP3ES, hal 274

pakaian dihitung 20 sen. Jadi seluruhnya berjumlah 34 sen. Jika upah yang diterimanya berkisar antara 30 – 40 sen sehari, maka dapat dipastikan bahwa penghasilannya tidak pernah ada sisa.¹⁸⁰ Selain itu seorang petani tidak setiap hari mendapat upah sebesar itu.

Kesengsaraan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat di wilayah Praja Mangkunegaran saja, tetapi juga di dalam istana. Akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran, Prangwedana sampai menggadaikan 290 saham *Javasche Bank* dan 100 saham *Nederlandsche Handelmaatschappij* sehingga memperoleh pinjaman sebesar f 200.000 dari *Factorij*.¹⁸¹ Pinjaman tersebut akhirnya membawa masalah bagi Mangkunegara V karena ternyata nilai kurs surat-surat berharga tersebut mengalami penurunan. Akhirnya *Factorij* menghentikan pinjamannya karena selain kursnya menurun, Mangkunegara V tidak mau menambah jaminannya berupa 40 saham *Javasche Bank* dan 25 saham *Nederlandsche Handelmaatschappij* yang masih ada di tangan Prangwedana.¹⁸²

Lebih menyedihkan lagi ternyata surat-surat berharga yang digadaikan oleh Mangkunegara V ternyata sebagian besar berupa warisan Mangkunegara IV yang belum dibagi-bagikan. Perekonomian Praja Mangkunegaran semakin memburuk meskipun Mangkunegara V sudah banyak melakukan pinjaman. Akhirnya Praja Mangkunegaran banyak terlilit hutang yang tidak sedikit. Bahkan hutang dari Mangkunegara V diperkirakan mencapai satu juta gulden, termasuk f

¹⁸⁰ Secara umum *Cacah* adalah jumlah orang atau juga bisa berarti satuan tanah atau satuan pajak. *Op.Cit.*, hal 46

¹⁸¹ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 6

¹⁸² *Ibid.*, hal 8

600.000 karena menggadaikan tanah dan rumah-rumah di Semarang, pinjaman dari *Nederlandsche Handelmaatschappij* dan tunggakan gaji para pegawai.¹⁸³

Tunggakan gaji tersebut terutama pada pegawai kepolisian dan pengadilan yang sejak tanggal 1 April 1886 tidak menerima gaji sampai sebesar f 79.830 dan itu berlangsung selama sembilan bulan.¹⁸⁴ Akibat tidak menerima gaji lagi akhirnya kebanyakan dari pegawai telah menjual hak miliknya atau menggadaikannya serta hidupnya sangat sengsara. Meskipun tidak di gaji, para pegawai tetap bekerja, hanya untuk tetap dapat menyanggah gelar dan jabatan yang sangat dihargai oleh orang Jawa. Banyak masyarakat menjadi sengsara dan menderita kerugian. Hal itu karena banyak pekerjaan yang dulu dibayar pakai uang, kini dianggap sebagai kerja rodi.¹⁸⁵ Kerja rodi tersebut antara lain transport kopi dari pedalaman ke gudang di kota Surakarta. Selain itu karena kekurangan uang, maka tanaman tebu dikurangi, serta pekerjaan yang semula dibayar dengan uang kini diganti dengan kerja rodi yang sangat menyengsarakan masyarakat.

Dampak krisis ekonomi yang dialami oleh Praja Mangkunegaran pada awal kepemimpinan Mangkunegara V pada dasarnya dibedakan pada dua golongan sosial masyarakat. Golongan tersebut adalah yaitu golongan yang hidup di dalam istana dan di luar istana. Berdasarkan kedudukan dalam masyarakat, masyarakat Mangkunegaran terdiri atas dua golongan:

¹⁸³ Muhammad Husodo Pringgokusumo, 1987, *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 70

¹⁸⁴ *Op.Cit.*, hal 7

¹⁸⁵ *Kerja Rodi* pada dasarnya adalah kewajiban untuk melakukan pekerjaan tanpa diberi upah selama beberapa hari untuk raja, untuk negara/praja, untuk pembesar, sampai untuk kepala desa. Pekerjaan itu terdiri atas membuat dan memelihara jalan, jembatan, kanal/terusan dan bangunan-bangunan perairan, melakukan ronda, menebang pohon dan pekerjaan-pekerjaan di sawah atau perkebunan. Metz, Th. M, 1987, *Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*, Surakarta: Reksapustaka Mangkunegaran, hal: 39

1. Para Sentana dan Nara praja, terdiri atas para anggota keluarga Mangkunegara, para sentana dan para pegawai yang mengabdikan pada raja.
2. Golongan *Kawulo* yang terdiri atas para anggota masyarakat lain yang tidak termasuk golongan para sentana dan nara praja.¹⁸⁶

Adanya perbedaan golongan tersebut, mengakibatkan dampak dari krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran yang merasakan juga berbeda berdasarkan golongan tersebut. Golongan sentana dan nara praja yang bekerja dan hidup di dalam istana tidak begitu merasakan dampak dari krisis ekonomi. Hal itu karena mereka masih mendapatkan kehidupan dan mencukupi terutama para anggota keluarga raja. Dampak dari krisis keuangan Praja mulai dirasakan para pegawai yang bekerja di Praja Mangkunegaran. Seperti dijelaskan di atas bahwa para pegawai sudah tidak mendapat gaji lagi selama sembilan bulan.

Masyarakat yang paling merasakan dampak dari krisis ekonomi Praja Mangkunegaran adalah golongan bawah di luar istana. Mereka kebanyakan bermata pencaharian sebagai seorang petani. Dalam konteks lokal di Praja Mangkunegaran, kehidupan sosial ekonomi penduduk terutama golongan petani tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di *Vorstenlanden*. Pada tahun 1888 di Surakarta pendapatan petani kelas I f 64, petani kelas II f 48, petani kelas III f 24, dan masing-masing terkena beban pajak tanah sebesar f 12 (8,75%), f 10 (20,80%), f 8 (33,50%).¹⁸⁷ Selain itu, para buruh pabrik perkebunan juga merasakan dampak atas krisis keuangan yang terjadi di Praja Mangkunegaran.

¹⁸⁶ *kawulo* menurut ketentuan ini adalah seseorang yang dikuasai oleh praja, mempunyai tempat tinggal tetap dalam praja dan tidak mengabdikan pada pemerintah lain. Sugiartanto, 1976, "Administrasi Pemerintahan Praja Mangkunegaran sebagai Studi Perbandingan untuk Memecahkan Masalah Administrasi Pemerintah Indonesia", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Jakarta, hlm 43-44

¹⁸⁷ Suhartono, *Op.Cit.*, hal 46

Para buruh perkebunan tebu rata-rata memperoleh penghasilan antara 20-35 sen per hari, dan bila kerja lembur diperoleh 22-40 sen, serta pekerja berat sebesar 50 sen. Kuli perkebunan rata-rata mendapat upah antara 25-35 sen per hari dan kuli tebang tebu memperoleh 8 sen.¹⁸⁸ Besarnya upah lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 1880 sebelum terjadinya krisis. Penurunan upah masing-masing sebesar f 0,05.¹⁸⁹

Penunggakan gaji pegawai Praja Mangkunegaran, penurunan upah petani maupun kerja rodi merupakan dampak dari krisis keuangan yang terjadi di Praja Mangkunegaran. Penurunan upah dan kerja rodi yang dilakukan oleh masyarakat Praja Mangkunegaran umumnya dan khususnya bagi para petani tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Praja. Hal itu karena krisis ekonomi juga melanda perusahaan-perusahaan perkebunan swasta akibat dari hama penyakit tanaman tebu dan kopi serta penggunaan gula bit di pasar Eropa. Akhirnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta mengalami kerugian sehingga berdampak pula pada pengurangan upah buruh dan bahkan pemecatan buruh. Akibat kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan swasta tersebut banyak para petani kehilangan mata pencahariannya.

Selain itu juga, Mangkunegara V juga melakukan kebijakan menanam tanaman perkebunan yang baru seperti tanaman tembakau. Hal itu karena pada masa Mangkunegara IV hanya berupa pemikiran yang belum terlaksanakan. Dan pada masa pemerintahannya dianggap perlu untuk membudidayakan tanaman ini untuk menambah pendapatan keuangan Praja Mangkunegaran. Pembudidayaan

¹⁸⁸ Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih, 1993, "Perkebunan Tebu dan Petani di Mangkunegaran pada Masa Belanda", *Laporan Penelitian*, IKIP Veteran Sukoharjo, hal 41

¹⁸⁹ *Ibid.*,

tanaman tembakau sangat merugikan para petani. Hal itu karena para petani harus merelakan lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman tembakau serta bekerja rodi dalam pembudidayaannya. Para petani menelantarkan tanaman kopi dan padinya yang akhirnya semakin menyengsarakan kehidupan para petani.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mangkunegara V untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran mengalami kegagalan. Akibatnya keuangan Praja yang digunakan menjadi kurang bermanfaat dan tidak menghasilkan keuntungan melainkan kerugian. Hutang Praja Mangkunegaran semakin banyak dan tidak dapat membayarnya. Bahkan barang-barang kekayaan Praja Mangkunegaran banyak yang dihipotikkan atau digadaikan. Menegemen keuangan Praja menjadi semakin buruk, terbukti dengan mulai tidak dibayarnya gaji para pegawai istana. Pada intinya krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran semasa pemerintahan Mangkunegara V diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Prangwedana untuk mengatasinya yang akhirnya hanya menyengsarakan kehidupan rakyatnya. Hal itu karena kebijakan-kebijakan yang diambil tidak diperhitungkan dengan keadaan keuangan Praja serta waktunya pun sudah terlambat bagi Mangkunegara V.

B. Dampak Krisis Ekonomi Praja Mangkunegaran Setelah Campur Tangan Pemerintah Kolonial.

Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap Praja Mangkunegaran dilakukan karena pihak kolonial merasa perlu ikut campur dalam mengatasi masalah krisis yang terjadi di Praja Mangkunegaran. Hal itu karena jika dibiarkan saja dan berlarut-larut dapat mengancam keamanan di kota Surakarta.

Selain itu juga, pihak kolonial Belanda menganggap Mangkunegara V sudah tidak dapat lagi mengatasi krisis keuangan yang terjadi di Praja Mangkunegaran dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kehancuran Praja. Di lain sisi ikut campurnya pihak kolonial dalam pemerintahan Praja Mangkunegaran membawa dampak positif dan juga dampak negatifnya bagi Praja. Ikut campur pihak pemerintah kolonial di sini adalah semasa dipimpin oleh residen.

1. Dampak Positif

Campur tangan pemerintah kolonial dalam hal ini residen untuk memperbaiki keuangan Praja Mangkunegaran dilakukan dengan berbagai cara. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para residen yang telah dipaparkan di depan telah membawa dampak dalam peningkatan keuangan Praja Magkunegaran. Mulai dengan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran serta penghematan keuangan Praja Mangkunegaran secara ketat. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut diutamakan dalam sektor perusahaan dan perkebunan. Hal itu karena sektor tersebut merupakan yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan Praja Mangkunegaran.

Selain itu juga diadakan perbaikan mengenai laporan-laporan tahunan mengenai keuangan Praja Mangkunegaran. Kualitas laporan keuangan sebelum campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap Praja Mangkunegaran tidak begitu tinggi. Terlihat pada saat *superintenden* De Kock van Leeuwen sebelum menduduki jabatannya mengeluh "benar-benar keterlalaan, bahwa dahulu orang kurang perhatian terhadap laporan-laporan tahunan, karena data-datanya kini tidak

cocok”.¹⁹⁰ Usaha-usaha untuk memperbaiki keuangan Praja Mangkunegaran agar keluar dari krisis ekonomi difokuskan pada sektor pekebunan.

Berikut ini keadaan perusahaan-perusahaan pekebunan serta sektor lain yang dapat menambah pemasukan keuangan Praja Mangkunegaran pada masa diawasi atau diurus oleh Pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini residen. Laporan di bawah ini hanya di fokuskan pada tanaman tebu dan perusahaan gula serta tanaman kopi kerana kedua komoditas tersebut merupakan tanaman utama yang dibudidayakan di Praja Mangkunegaran.

a. Budidaya Tanaman Tebu

Tebu merupakan pekebunan yang sangat penting bagi pemasukan keuangan Praja Mangkunegaran. Perkebunan tebu sudah dikembangkan pada saat kepemimpinan Mangkunegara IV dengan dibuatnya dua buah pabrik gula yaitu pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu. Pada masa Mangkunegara V produksi tanaman tebu menurun karena terjangkit penyakit sereh dan juga kalah bersaing dengan gula bit di pasar Eropa. Akibatnya pemasukan dari kedua perusahaan gula berkurang bahkan mengalami kerugian. Masuknya campur tangan residen dalam pengembangan budidaya tanaman tebu dan juga perusahaan gula sedikit demi sedikit dapat meningkatkan produksi gula untuk Praja Mangkunegaran.

Berikut ini laporan hasil produksi tanaman tebu serta luas areal tanam dari penanaman tebu kedua pabrik gula milik Praja Mangkunegaran pada masa campur tangan pemerintah kolonial Belanda atau ditangani oleh residen.

¹⁹⁰ Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 38

Tabel 3.1**Luas Areal Tanam dan Produksi Gula Praja Mangkunegaran 1890-1898**

Tahun	Luas Areal (ha)			Produksi gula (kuintal)		
	Tasikmadu	Colomadu	Jumlah	Tasikmadu	Colomadu	Jumlah
1890	331	248	615	14.853	14.825	29.678
1891	365	283	648	20.613	18.809	39.422
1892	355	283	638	24.154	14.347	38.501
1893	390	319	709	23.169	20.649	34.818
1894	390	355	745	30.731	22.451	53.182
1895	373	319	692	32.142	23.925	56.067
1896	355	319	674	32.185	23.987	56.172
1897	355	319	674	32.917	22.202	55.119
1898	Ttd	Ttd	Ttd	37.038	28.014	65.052

Catatan: Ttd = tidak tersedia data

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 39

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa luas lahan yang digunakan untuk penanaman tebu dan produksi gula industri gula Praja Mangkunegan selama di urus oleh residen Burnaby Lautier terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1890 luas lahan tanaman tebu di kedua pabrik gula Praja Mangkunegaran hanya 615 hektar. Pada tahun 1894 luas lahan meningkat menjadi 745 hektar atau mengalami peningkatan 12 %. Produksi gula pada tahun 1890 sebesar 29.678 kuintal dan pada tahun 1894 meningkat menjadi 53.182 kuintal, atau mengalami peningkatan 23,5 %. Tingkat produksi gula per hektar tahun 1890 sebesar 48,26 kuintal. Pada tahun 1894 meningkat menjadi 71,40 kuintal per hektarnya.

Rata-rata luas lahan perkebunan tebu Praja Mangkunegaran selama tahun 1895-1898 seluas 680 hektar per tahun. Luas lahan ini masih lebih besar dibandingkan dengan rata-rata luas lahan selama tahun 1890-1894 hanya sebesar 671 hektar per tahun. Akan tetapi, perkembangan luas lahan selama tiga tahun (1895-1897) cenderung mengalami penurunan. Penurunan luas lahan hanya terjadi

diperkebunan tebu Tasikmadu saja. Selain itu pada tabel di atas kelihatan bahwa selama pengurusan dari residen, terdapat penambahan produksi. Untuk kedua pabrik gula Praja Mangkunegaran pada tahun 1898 mengalami penambahan dua kali lipat jika dibandingkan pada tahun 1890. Penurunan luas lahan tidak selalu diikuti dengan penurunan produksi gula. Pada tahun 1895 jumlah produksi 56.076 kuintal dari lahan seluas 692 hektar yang berarti rata-rata produksi per hektar 81 kuintal. Sementara itu pada tahun 1896, ketika luas lahan hanya 647 hektar, produksi gula meningkat menjadi 56.172 kuintal atau 83,3 kuintal per hektarnya.

Berikut ini laporan penerimaan dan pengeluaran dari pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu berdasarkan laporan tahunan.

Tabel 3.2

Penerimaan dan Pengeluaran Industri Gula Praja Mangkunegaran

Tahun 1890-1898

Tahun	Penerimaan (f)	Pengeluaran (f)	Saldo (f)
1890	419.962,54	360.654,83	59.307,71
1891	527.569,97	455.280,27	72.289,7
1892	591.644,06	542.520,73	49.123,33
1893	631.351,99	640.215,07	-7.863,08
1894	860.723,17	747.738,72	112.984,45
1895	699.452,83	622.800,32	76.652,51
1896	851.593,30	621.014,33	230.578,97
1897	715.149,18	531.961,29	183.187,89
1898	877.889,24	547.813	330.079,24

Sumber: Wasino, 2008, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: LKiS, hal 71.

Tabel di atas menunjukkan penerimaan pabrik gula Praja Mangkunegaran dari tahun 1890-1894 menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 1890 penerimaan hanya sebesar f 419.962,54, tetapi pada tahun 1894 telah menjadi f 860.723,17 atau naik sebesar f 440.760,63 (51%). Akan tetapi pengeluaran untuk proses produksi pabrik gula juga besar, dan cenderung naik turun, akibatnya saldo

atau keuntungan bersih tidak selalu sepadan dengan penerimaan atau keuntungan kotor. Bahkan pada tahun 1893, pabrik gula Praja Mangkunegaran mengalami kerugian sebesar f 7.863,08. Pengeluaran terdiri dari pengeluaran biasa yang digunakan untuk biaya produksi, seperti upah komisi, upah buruh, biaya angkutan, dan pembayaran pialang. Sementara itu pengeluaran paling besar digunakan untuk perbaikan dan pembaharuan mesin-mesin pabrik. Pengeluaran tersebut sebesar f 62.714,88 yang digunakan untuk pembelian mesin-mesin baru.¹⁹¹

Meningkatnya produksi gula dalam hektar mengakibatkan tingkat keuntungan pabrik gula semakin meningkat pula. Pada tabel di atas menunjukkan perolehan perolehan keuntungan kotor atau penerimaan pabrik gula Praja Mangkunegaran secara umum meningkat, meskipun terjadi penurunan pada tahun 1897 akibat menurunnya jumlah produksi gula dalam kuintal. Sementara keuntungan bersih atau saldo juga mengalami kenaikan meskipun pada tahun 1897 saldo turun drastis yang kemudian meningkat kembali pada tahun 1898. Penurunan saldo pada tahun 1897 disebabkan oleh penurunan penerimaan dan tingginya pengeluaran pabrik untuk biaya produksi kedua pabrik gula tersebut.

Pengeluaran pada tahun 1897 tersebut berjumlah sebesar f 477.293,3, dengan rincian sebagai berikut: ongkos produksi gula Colomadu sebesar f 216.399,09 dan ongkos produksi pada pabrik gula Tasikmadu sebesar f 260.894,24.¹⁹² Selain itu, juga digunakan untuk kepentingan pengeluaran masing-masing pabrik gula, yaitu membayar upah komisi pemberi pinjaman f 7.058, upah komisi peminjam uang f 7.058,83, dan biaya persenan f 2.880 untuk pabrik gula

¹⁹¹ Wasino, 2008, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: LKiS, hal 71.

¹⁹² *Ibid.*, hal 75.

Colomadu. Sedangkan untuk pabrik gula Tasikmadu pengeluaran digunakan untuk pembayaran kebun bibit f 25.466,61, dan upah komisi peminjam uang f 9.512,52, serta biaya persenan f 9.750.¹⁹³ Dari tabel-tabel di atas terbukti bahwa campur tangan pemerintah kolonial atau pada masa pemerintahan Praja Mangkunegaran di pegang residen terutama dalam bidang perkebunan tebu mengalami peningkatan. Perusahaan-perusahaan gula milik Praja Mangkunegara pun juga menghasilkan pemasukan yang besar untuk keuangan Praja.

b. Budidaya Tanaman Kopi

Tanaman kopi merupakan salah satu sektor perkebunan yang menjadi sumber pemasukan bagi keuangan Praja Mangkunegaran. Tetapi pada masa pemerintahan Mangkunegara V tanaman kopi terserang hama daun kopi *Hemilea* sehingga mengakibatkan hasil dari penanaman kopi menjadi menurun dan berkualitas rendah. Hama tersebut juga menyebabkan pengusaha-pengusaha Belanda menghentikan budidaya tanaman kopinya. Misalnya tanah Paros yang biasanya menghasilkan 124 kuintal dan tanah Gendulan hasilnya menjadi nihil dan dikembalikan. Tanah Plumbon juga dikembalikan karena sewanya terlalu tinggi, padahal pada tahun 1886 masih dapat menghasilkan 124 kuintal kopi dan 198 kg nila, tetapi pada tahun 1890 hasilnya nihil.¹⁹⁴

Pekanya kopi Jawa terhadap hama daun menyebabkan beralihnya ke kopi Liberia yang tahan terhadap hama tersebut dan harganya pun murah. Kopi Liberia nama lengkapnya *liberica Bull ex Hiern*, nama kopi ini berdasarkan nama orang yang pertama kali mengidentifikasi dan mendiskripsikannya yaitu Bull pada

¹⁹³ *Ibid.*,

¹⁹⁴ Abdul Karim Pringgodigdo, *Op.Cit.*, hal 42

tahun 1874 dan Hiern pada tahun 1880.¹⁹⁵ Jenis kopi ini lebih mempunyai keunggulan dibandingkan dengan kopi Arabica. Kelebihan tersebut antara lain jenis kopi Liberia lebih tahan terhadap hama daun *Hemilea*. Selain itu jenis kopi ini juga sangat toleransi terhadap kekeringan, mampu tumbuh di daerah gersang, pohonnya yang kuat dan apabila dibiarkan begitu saja dapat tumbuh dengan tinggin mencapai 18 sampai 36 kaki.¹⁹⁶

Berikut ini laporan penerimaan dan pengeluaran budidaya kopi di Praja Mangkunegaran selama kepengurusan residen.

Tabel 3.3

**Penerimaan dan Pengeluaran Budidaya Kopi di Praja Mangkunegaran
Tahun 1888-1898**

Tahun	Penerimaan (f)	Pengeluaran (f)	Saldo (f)
1888	331.064	62.567	248.497
1889	200.438	70.934	129.503
1890	65.098	15.979	49.120
1891	305.109	165.635	139.474
1892	78.458	103.800	-25.342
1893	77.545	110.640	-33.096
1894	123.803	108.075	15.729
1895	98.866	80.473	18.393
1896	127.608	83.202	44.407
1897	65.313	51.428	13.885
1898	50.436	49.611	825

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 43

Berdasarkan tabel di atas pada masa residen Spaan produksi kopi Praja Mangkunegaran masih cukup besar dengan saldo yang cukup besar pula terutama pada masa awal jabatannya. Tetapi pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh hama daun kopi. Pada masa Burnaby Lautier

¹⁹⁵ Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, 1991, *Kopi Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, hal, 13

¹⁹⁶ *Ibid.*,

tahun 1890-1894 produksi kopi mengalami penurunan yang drastis dan bahkan mengalami defisit. Hal itu karena residen Burnaby lebih memfokuskan pada perkebunan tebu dan pabrik gula Praja Mangkunegaran. Selain itu jumlah pengeluaran pada tahun 1893 sangat besar yaitu untuk penanaman, panen, dan transportasi sebesar f 29.763,15.¹⁹⁷ Perbaikan dan pembelian gedung-gedung serta upah pekerja pengeluarannya sebesar f 13.448,315 dan masih terdapat pengeluaran-pengeluaran yang lain yang kesemuanya itu mencapai jumlah sebesar f 110.640.¹⁹⁸

Pada masa residen Spaan dan Burnaby Lauiter rata-rata pemasukan sebesar f 176.285, sedangkan pengeluaran dan saldo masing masing sebesar f 88.259 dan f 84.693. Jadi meskipun pada tahun 1892 dan 1893 mengalami defisit pemasukan, tetapi secara keseluruhan masih memperoleh saldo sebesar f 84.693. Pada tahun-tahun berikutnya produksi kopi tetap belum menghasilkan pemasukan yang besar pada waktu sebelum terserang hama. Bahkan cenderung mengalami penurunan, pada tahun 1894 pemasukan dapat mencapai f 123.803 sedangkan pada tahun 1898 hanya sebesar f 50.436, dengan rata-rata pemasukan antara tahun 1894 sampai 1898 sebesar f 93.205. Antara pemasukan dan pengeluaran cenderung relatif seimbang sehingga saldonya pun hanya sedikit. Rata-rata saldo dari tahun 1894 sampai 1898 hanya sebesar f 18.648. Jumlah yang sangat sedikit dan mengalami penurunan yang drastis jika dibandingkan pada rata-rata saldo tahun 1888-1893 yang dapat mencapai f 84.693.

¹⁹⁷ *Arsip Mangkunegaran V* no 92 tentang "Laporan tahunan Mengenai Keuangan Praja Mangkunegaran tahun 1893", Surakarta: Arsip Reksopustoko Mangkunegaran, hal 2

¹⁹⁸ *Ibid.*,

Dari tabel-tabel di atas kelihatan jelas sekali bahwa perkebunan tebu atau industri gula telah mendesak perkebunan kopi sebagai hasil utama dari kas Praja Mangkunegaran. Jika saldo dari perusahaan-perusahaan itu dari periode 1888-1898 dijumlah, maka akan memperoleh angka besar yang tidak hanya cukup untuk menutup saldo-saldo kurang dari Praja Mangkunegaran dan membayar semua hutang, tetapi juga saldo untuk kas sangat besar. Berikut ini tinjauan umum keuangan Praja Mangkunegaran pada tahun 1888-1898:

Tabel 3.4

Keuangan Praja Mangkunegaran Tahun 1888-1898

Periode	Saldo perusahaan (f)	Saldo kas Praja (f)	Saldo hutang (f)	Saldo kas pada akhir periode (f)	Tambahan saldo kas (f)
1	2	3	4	5	6
1888-1893	631.897	-340.136	-108.058	-	-
1894-1898	1.100.341	250.834	-899.380	656.272	-
1888-1898	1.732.238	-89.302	-1.007.438	656.272	640.056

Sumber: Abdul Karim Pringgodigdo, 1988, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Surakarta: Reksopustoko Mangkunegaran, hal 48

Tabel di atas sudah jelas bahwa pada periode tahun 1888 sampai 1893 saldo perusahaan hanya mencapai f 631.897, sedangkan pada periode tahun 1894-1898 saldo perusahaan dapat mencapai f 1.100.341. Terjadi peningkatan saldo perusahaan sebesar f 468.444, selain itu saldo dari Praja juga mengalami kenaikan sebesar f 89.302. Selain itu juga selama campur tangan pemerintah kolonial terhadap pemulihan keuangan Praja Mangkunegaran hutang-hutang dari Praja juga mengalami penurunan. Pada tahun 1891 hutang Praja Mangkunegaran mencapai f 1.574.713, tahun 1892 sebesar f 1.384.783, tahun 1893 sebesar f 1.395.694, dan f 1.440.665 pada tahun 1894.¹⁹⁹ Tetapi pada tahun 1897 hutang

¹⁹⁹ Abdul Karim Pringgodigdo, *Op.Cit.*, hal 26

Praja Mangkunegaran hanya tinggal sebesar f 861.300 terhitung sejak 1 Januari 1897.²⁰⁰

Keseluruhan data-data di atas sudah jelas menunjukkan bahwa masa kepengurusan oleh residen atau ikut campurnya pemerintah kolonial terhadap Praja Mangkunegaran secara keseluruhan telah mengakibatkan penyehatan dari keuangan. Keseimbangan diperoleh diantara penerimaan dan pengeluaran Praja, dengan melakukan penghematan dan perbaikan terhadap aset-aset dari Praja Mangkunegaran yang dapat menjadi pemasukan bagi praja. Akibat dari itu, saldo keuangan Praja Mangkunegaran semakin bertambah sehingga beban hutang yang hampir mencapai satu setengah juta gulden dapat hampir terlunasi.

2. Dampak Negatif

Meskipun pada masa kepengurusan residen Praja Mangkunegaran mengalami peningkatan dan pemulihan perekonomian, tetapi juga mempunyai dampak yang negatif bagi Praja Mangkunegaran. Di awal sudah dijelaskan bahwa persetujuan dibentuknya komisi keuangan yang diberi nama *Raad van Toezicht Belast met de Regeling van de Mangkoenegorosche Landen en Bezettingen* (Dewan Pengawas yang mengatur urusan keuangan, tanah dan barang-barang milik Mangkunegaran) tidak disetujui oleh Mangkunegara V. Hal itu karena jika disetujui maka Praja Mangkunegaran dapat diawasi secara bebas oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pada akhirnya Mangkunegara V menyetujui dibentuknya komisi tersebut meskipun secara pribadi tidak menyetujuinya. Akibatnya sudah dapat ditebak,

²⁰⁰ *Ibid.*, hal 35

Mangkunegara V tidak mau bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda terutama residen yang mengurus Praja Mangkunegaran. Mengetahui Prangwedana tidak mau bersikap kooperatif terhadap residen maka residen yang pertama yaitu residen Spaan akhirnya mengambil tindakan sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Mangkunegara V. Dampak dari keputusan tersebut adalah kekuasaan dan martabat raja menjadi sama dengan seorang residen bahkan mungkin lebih rendah secara tidak langsung. Selain itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh residen Spaan kebanyakan justru merugikan Praja Mangkunegaran karena terlalu percaya dengan perhitungan yang dibesar-besarkan yang akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan laporan dari J. Mullemeister, kerugian dari kepengurusan residen terutama kepengurusan residen Burnaby Lautier adalah:

- a. Apabila timbul persoalan mengenai air antara pemilik perusahaan-perusahaan di daerah kasunanan dengan Burnaby Lautier sebagai pengurus perusahaan Praja Mangkunegaran, dan jika residen Lautier dimintai pengadilan, padahal dia sendiri berada di salah satu pihak, maka menurut pernyataan orang-orang Belanda pemilik perusahaan-perusahaan itu tanpa ragu memberi keputusan yang menguntungkan pihak Praja Mangkunegaran.
- b. Residen lupa bahwa penyerahan kepengurusan terhadap Praja Mangkunegaran hanya bersifat sementara. Residen yang merangkap sebagai pengurus harus mempersilakan raja (Mangkunegara V) memegang lagi kepengurusan, sehingga raja tidak hanya disuruh mengetahui saja, tetapi disuruh ikut serta dalam kepengurusan itu. Akan tetapi hal itu

berlawanan dengan sifat dari residen Burnaby Lautier yang hanya meminta Mangkunegara V menaruh tanda tangannya pada surat-surat perjanjian dan surat-surat keputusan. Jika Mangkunegara V tidak bersedia, ia menandatangani sendiri surat-surat itu dan memberi tahu bahwa semuanya sudah beres.²⁰¹

Kerugian-kerugian tersebut dikarenakan akibat dari ditetapkannya residen sebagai satu-satunya pengurus dari urusan Praja Mangkunegaran. Selain itu pengangkatan orang-orang untuk mengurus masalah keuangan dan juga perkebunan tidak cakap sesuai yang diharapkan yang akhirnya hanya kegagalan yang didapat.

Dampak dari kepengurusan residen di Praja Mangkunegaran juga dirasakan oleh masyarakat di luar istana. Kesejahteraan masyarakat semakin terabaikan karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh residen cenderung mengalami kegagalan yang semakin menyengsarakan rakyat. Kemakmuran rakyat terancam, dan keamanan pun akan terganggu juga akibat adanya perampokan, pembunuhan bahkan pemberontakan. Kesemuanya tersebut akhirnya dapat menjadikan suatu gerakan sosial dalam masyarakat. Gerakan sosial tersebut akibat dari kesengsaraan rakyat yang semakin memprihatinkan atau dapat juga karena ketidakpuasan terhadap suatu pemerintahan yang akhirnya memicu adanya pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan.

Munculnya gerakan-gerakan sosial dalam wujud nyata sering berpangkal pada mitos-mitos tertentu. Dalam masyarakat Jawa mitos-mitos ini berpangkal pada ideologi Ratu Adil atau mesias, juru selamat di masa kekacauan yang sering juga dinamakan Imam Mahdi. Gerakan sosial muncul sebagai akibat struktur

²⁰¹ Abdul Karim Pringgodigdo, *Op.Cit.*, hal 28

politik, ekonomi, sosial, budaya yang tidak sesuai dengan pemikiran petani. Keadaan yang buruk dari setiap struktur kehidupan dan saling berkaitan menjadi faktor timbulnya gerakan sosial. Berbagai beban pajak, persewaan tanah, ikatan feodal, penetrasi budaya asing, dan lain-lain merupakan unsur-unsur penyebab gerakan sosial.²⁰²

Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, kasus-kasus gerakan sosial juga timbul di wilayah Praja Mangkunegaran. Gerakan tersebut adalah gerakan mesianisme Srikaton pada tahun 1888 di Girilayu, Karanganyar, di bawah pimpinan imam Rejo dan terjadi pada tanggal 11-12 Oktober 1888.²⁰³ Pendukung utama dari gerakan ini adalah dari pihak keluarga Imam Rejo sendiri dan juga melibatkan elit desa yaitu para bekel, dan pejabat rendahan, bahkan dari kalangan priyayi atau birokrat Praja Mangkunegaran. Pengikut gerakan ini terdiri atas juru kunci makan Girilayu, kuli perkebunan tebu dan indigo, serta penebas uang yang kesemuanya berjumlah kurang lebih 47 orang.²⁰⁴

Secara singkat, gerakan Srikaton tersebut berlangsung mula-mula pada tanggal 11 Oktober 1888. Sekitar 70 orang telah berkumpul di rumah Imam Rejo, dan kemudian menuju ke pasanggrahan Srikaton. Di sini Imam Rejo bertindak sebagai layaknya seorang raja, duduk di hadapan para pengikutnya, dan malam harinya mereka berzikir bersama. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Telaga pasir di puncak gunung Lawu. Tetapi beberapa orang pengikutnya melapor kepada *Mantri Gunung Tawangmangu*, dan kebetulan seorang administrator

²⁰² Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih, *Op.Cit.*, hal 43

²⁰³ *Rapport Omtrent het Gebourde te Srikaton op den 11 den en 12 den Oktober 1888* (Laporan mengenai peristiwa Pendudukan Pasenggrahan Srikaton pada Tanggal 11 dan 12 Oktober 1888), Surakarta: Reksopustaka, Kode Arsip: 538, hal 1

²⁰⁴ *Op.Cit.*, hal 44

perkebunan kopi di Tawangmangu, Ede van der Pals mengetahui rombongan Iman Rejo tersebut. Akhirnya dilaporkan kepada kepala distrik Karangpandang, dan seterusnya sampai di karesidenan Surakarta dan Mangkunegara V.

Pada tanggal 12 Oktober 1888 dikirim 30 Legiun Mangkunegaran menuju pasenggrahan Srikaton. Diadakan pengepungan dari segala arah pada pasenggrahan Srikaton sehingga tidak satu pun pengikut dari Iman Rejo dapat lolos melarikan diri. Pengepungan tersebut berlangsung tidak lebih dari dua jam, dan akhirnya dapat menewaskan Imam Rejo beserta dengan anak dan istrinya. Selain itu Margodikromo, Towongso, dan mbok Kartomenggolo ditemukan sudah tewas tidak bernyawa lagi karena tertembak pada waktu mau melarikan diri.²⁰⁵ Para pengikut yang masih hidup kemudian diadili oleh pengadilan *Reksapraja* Praja Mangkunegaran.

Latar belakang timbulnya gerakan tersebut jika disimak, jelas akibat dari tekanan ekonomi yang berat, berupa pajak dan wajib kerja. Gerakan ini terjadi pada waktu krisis pertanian sedang berlangsung. Selain itu faktor kesulitan dan ketidakpuasan mendasari gerakan ini. Mereka berusaha membebaskan diri dari tekanan ekonomi dengan mendirikan gerakan mesianistik-milenaristik.²⁰⁶ Faktor ini bercampur dengan unsur keagamaan dan keratuadilan, karena tokoh gerakan dalam mempersiapkan dirinya, melalui saluran religius dan mistis. Dukungan terhadap gerakan ini berasal dari kalangan bangsawan yang tidak puas terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, sedangkan Panewu Joyomaharjo dijadikan

²⁰⁵ Suhartono, *Op.Cit.*, hal 148

²⁰⁶ *Mesianisme* adalah ideologi yang menggambarkan harapan datangnya jaman adil dan makmur, sedangkan *milenarisme* adalah ideologi yang menggambarkan suatu masyarakat yang mengalami jaman keemasan dengan penuh kesejahteraan. Mesianisme dan milenarisme ingin merealisasikan harapannya sehingga tidak sekedar sebagai mitos tetapi dilaksanakan dengan cara magis. *Ibid.*, hal 141

perantara untuk mendapatkan pengikut. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa gerakan Srikaton merupakan perwujudan revivalisme agama yang bercampur dengan milenarisme Jawa sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang tengah berlangsung.²⁰⁷

Selain itu juga munculnya gerakan keagamaan di Surakarta adalah gerakan yang bercorak nativisme. Timbulnya gerakan ini tidak dapat dipisahkan dari besarnya kekuasaan asing sehingga menciptakan reaksi kuat untuk melenyapkannya. Hal itu jelas terjadi di Praja Mangkunegaran yang selama krisis ekonomi hampir segala kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi berasal dari pemerintah kolonial Belanda. Meluasnya kekuasaan asing berarti merosotnya ketertiban diberbagai kehidupan. Selain gerakan Srikaton juga terdapat gerakan Samin, gerakan Alisuwongso di desa Jatinom pada tahun 1881, *titisan* Prabu Anom atau Pangeran Kadilangu yang terjadi di desa Ketitang, Kartosuro pada tahun 1885.²⁰⁸ Jadi jelas bahwa campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap Praja Mangkunegaran berdampak pada wibawa dan kekuasaan Mangkunegara V yang sudah tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara bebas. Selain itu juga campur tangan tersebut juga menimbulkan kesengsaraan di kehidupan masyarakat yang berdampak terjadinya gerakan sosial di masyarakat.

²⁰⁷ *Ibid.*, hal 149

²⁰⁸ *Ibid.*, hal 150

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Kondisi perekonomian Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V sangat buruk. Naiknya Prangwedana menjadi penguasa Praja Mangkunegaran pada usia muda mengakibatkan bergaya hidup yang suka berfoya-foya dan boros. Pada awal pemerintahan Mangkunegara V terjadi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran. Semua kekayaan yang diwariskan oleh ayahnya yaitu Mangkunegara IV tidak cukup lagi untuk membiayai keperluan Praja Mangkunegaran. Krisis yang melanda Praja Mangkunegaran tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari Mangkunegara V. Hal itu karena pada masa pemerintahan Mangkunegara V juga terjadi hama penyakit yang menyerang tanaman tebu dan kopi yang merupakan sumber pemasukan terbesar bagi Praja Mangkunegaran. Selain itu akibat dari krisis dunia tersebut terjadi proteksi terhadap *bit gula* di Eropa yang mengakibatkan peredaran gula dalam negeri menjadi lebih besar karena tidak dapat diserap dalam paaran Eropa yang selama ini menjadi pasar utama produksi gula dari Jawa.

Usaha-usaha Mangkunegara V untuk mengatasi krisis keuangan yang melanda Praja Mangkunegaran tidak berhasil, justru semakin memperburuk keuangan Praja. Usaha-usaha tersebut antara mendirikan pabrik bungkil di Polokarto, membeli pabrik gula Kemiri dan mengadakan pembudidayaan tanaman tembakau. Kegagalan usaha tersebut karena pelaksanaannya tidak pada waktu

yang tepat di saat Praja Mangkunegaran sedang mengalami Krisis ekonomi dan keuangan. Akhirnya Mangkunegara V melakukan tindakan yaitu berbentuk pinjaman kepada pihak swasta dan juga pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran. Akibat dari pinjaman-pinjaman tersebut akhirnya menimbulkan hutang yang besar bagi Praja Mangkunegaran.

2. Campur tangan Belanda dalam kebijakan-kebijakan ekonomi di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V dianggap perlu bagi pemerintah kolonial. Hal itu karena jika rakyat sudah tidak sejahtera dan terjadi kemiskinan serta kesengsaraan maka akan menimbulkan kejahatan yang mengganggu keamanan di wilayah Surakarta umumnya. Dengan alasan keamanan tersebut maka pemerintah kolonial Belanda mulai ikut campur di dalam pemerintahan dan juga perekonomian Praja Mangkunegaran. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda dilakukan langsung oleh residen Surakarta yang dibantu oleh seorang *Superintenden*. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda terutama dilakukan dalam sektor-sektor perkebunan yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Praja Mangkunegaran.

Jadi seorang residen Surakarta merangkap dua jabatan yaitu sebagai residen dan juga sebagai pembantu Mangkunegara V untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran. Kenyataan yang terjadi di lapangan, residen tidak sebagai pembantu dan penasehat raja tetapi justru yang memegang kendali mengenai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi. Mangkunegara V hanya bersikap pasif dan tidak mendapatkan kebebasan yang mutlak dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu dikarenakan

dari awal Mangkunegara V tidak bersikap kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Selain itu juga ketidakpercayaan pemerintah kolonial Belanda terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mangkunegara V dalam menangani krisis yang melanda Praja Mangkunegaran. Tetapi setelah mendapat kritik dari J. Mullemeister maka Mangkunegara V diajak ikut campur dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk menangani krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran. Selain itu diberi kebebasan kembali untuk mengatur keuangan Praja meskipun masih tetap dalam pengawasan oleh residen. Hal itu dilakukan untuk mengontrol jangan sampai terjadi pengeluaran yang boros dan tidak efektif.

3. Dampak dari kemunduran perekonomian Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V dibagi menjadi dua yaitu dampak sebelum dan sesudah campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Sebelum masuknya campur tangan pemerintah kolonial Belanda, krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Banyak pegawai istana tidak menerima gaji lagi akibat dari devisitnya keuangan Praja Mangkunegaran. Selain itu, masyarakat juga semakin dibebani dengan kerja rodi untuk kepentingan Praja. Tanah-tanah pertanian rakyat banyak digunakan untuk memperluas areal perkebunan. Akibatnya hasil dari pertanian terutama tanaman pokok mengalami penurunan dan masyarakat terancam kelaparan.

Dampak dari campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap Praja Mangkunegaran secara umum mengalami perbaikan dalam bidang perekonomian. Hutang-hutang Praja Mangkunegaran mulai dapat dibayar dan jumlahnya semakin berkurang. Keuangan praja pun mulai dipisahkan antara keuangan Praja dan

keuangan raja, karena pada masa pemerintahan Mangkunegara IV dan Mangkunegara V keuangan Praja masih tercampur dengan keuangan raja. Selain dampak yang positif yang ditimbulkan oleh campur tangan pemerintah kolonial Belanda juga berdampak pada hal yang negatif. Dampak negatif dari campur tangan Belanda yaitu kekuasaan raja tidak absolut lagi dibandingkan sebelum kolonial ikut campur. Selain itu timbul pemberontakan dan kerusuhan akibat dari kekuasaan pemerintah kolonial Belanda terhadap Praja Mangkunegaran.

Secara umum perekonomian Praja Mangkunegaran sebelum dan sesudah campur tangan pemerintah kolonial Belanda terdapat perbedaan yang mencolok. Pada masa Mangkunegara V perekonomian cenderung semakin buruk, terbukti dengan banyaknya hutang yang ditanggung oleh Praja Mangkunegaran. Sedangkan setelah pemerintah kolonial Belanda campur tangan, perekonomian Praja Mangkunegaran semakin membaik. Jadi dapat dikatakan bahwa campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap pemerintahan Praja Mangkunegaran khususnya dalam bidang perekonomian merupakan keputusan yang baik. Hal itu karena pada pemerintahan Mangkunegara V keuangan praja Mangkunegaran semakin defisit dan terjadi krisis yang mengarah pada kehancuran Praja. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap Praja Mangkunegaran karena Mangkunegara V dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip Mangkunegaran

Daftar tahun 1882 mengenai penerimaan dan pembayaran pada bulan Januari sampai September 1882, Koleksi Arsip Reksopustaka. Kode M.N. No. 64

Daftar tahun 1883-1886 mengenai anggaran belanja Mangkunegaran, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran. Kode M.N V No. 64.

Daftar tahun 1883 mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam tahun 1883, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran. Kode M.N V No. 63.

Daftar tanggal 1 Januari 1889 - Januari 1894 mengenai hutang-hutang Mangkunegara V, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran. Kode M.N V No. 91.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1888, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 76.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1889, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 80.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1890, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 85.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1891, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 88.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1892, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 89.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1893, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 92.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1894, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 97.

Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1895, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No 98.

Laporan tahun 1885 mengenai hutang Mangkunegara V yang belum dibayar, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No. 66.

Laporan tahun 1896 mengenai pemasukan dan pengeluaran pabrik Tasikmadu, Malangjiwan, Mojoretno, dan Polokarto, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran kode M.N V No. 113.

Rapport Omtrent het Gebourde te Srikaton op den 11 den en 12 den Oktober 1888 (Laporan mengenai peristiwa Pendudukan Pasenggrahan Srikaton pada Tanggal 11 dan 12 Oktober 1888), Surakarta: Reksopustaka, Kode Arsip: 538.

Serat Pranatan Cecepeganipun Para Administratur ing Pabrik Gendis Bawahing Mangkunegaran tahun 1892, Koleksi Arsip Reksapustaka Mangkunegaran Kode M.N V No.197.

Staatsblad 1857 No. 116, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1874: 209, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran

Surat dari residen Surakarta kepada Gubernur Genderal, bulan Mei 1887 mengenai masalah keuangan Mangkunegara V, Koleksi Arsip Reksopustaka Mangkunegaran. Kode M.N V No. 68.

2. Buku – Buku

Abdul Karim Pringgodigdo. 1938. *Lahir Serta Timbulnya Kerajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran

_____. 1939. *Doemadosipoen saha Ngrembakanipun Pradja Mangkoenegaran*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.

_____. 1987. *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Mangkunegaran*. Surakarta: Perpustakaan Reksopustaka.

_____. 2000. *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.

Anonim. tanpa tahun. *Lelampahanipun Mangkunegara IV*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.

Anonim. tanpa tahun. *Serat Pemutan Lelampahan Dalem KGPAA Mangkunegara V*, Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.

Booth, Anne. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES IKAPI.

Burger D.H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bhratara.

- Gunawan Wiradi & Sediono Tjondronegoro. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah* (Penerjemah: Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Haryono Semaun. 1964. *Penyakit-penyakit Tanaman Perkebunan Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Husein Djajadiningrat diterjemahkan oleh Sarwanta Wiriasuputra. 1978. *Nama-nama Prangwedana dan Mangkunegara*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Hilmiyah Darmawan Pontjowolo. 1996. *Peringatan 100 Tahun Wafatnya KGPAA Mangkunegara V*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Metz, Th, M. 1987. *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Perpustakaan Reksopustaka Mangkunegaran.
- Mubyarto, dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sejarah Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Muhammad Dalyono. 1977. *Ketataprajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Muhammad Husodo Pringgokusumo. 1983. *Swapraja*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- _____. 1987. *Sejarah Milik Praja Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- _____. 1987. *Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Raffles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Retnandari & Moeljarto Tjokrowinoto. 1991. *Kopi : Kajian Sosial – Ekonomi*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Robert van Niel. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

- Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Sayid. tanpa tahun. *Kawentenanipun Praja Mangkunegaran ing Nalika Tahun 1870 dumugi 1915*, Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Sigit Wahyudi. 2000. *Dampak Agro Industri di Daerah Persawahan di Jawa*. Semarang: Mimbar.
- Soetomo Siswokartono. W. E. 2006. *Sri Mangkunegoro IV sebagai Penguasa dan Pujangga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetono. 1987. *Timbulnya Kepentingan Tanam Perkebunan di Daerah Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Suhartono. 1991. "Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900". Yogyakarta: *Prisma*.
- _____. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Suhartono W Pranoto. 2001. *Serpihan Budaya Feodal*. Yogyakarta: Agastya Media.
- Suhamatmoko. tanpa tahun. *Babad Ringkasan Padatan Kanjeng Gusti Adipati Aria Mangkunegara I – VI*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suwadi Bastomi. 1996. *Karya Budaya KGPAA Mangkunegara I – VIII*. Semarang: IKP Semarang Press.
- Wahju Muljana. 2001. *Cocok Tanam Tebu Dengan Segala Masalahnya*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

3. Skripsi

Bandung Gunadi, 1992, "Mangkunegara V 1881-1896, Seniman Besar Penampil Peran Penari, Wanita dalam Teater Tradisional Wayang Orang", *Skripsi*, FSSR Universitas Sebelas Maret

Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih, 1993, “Perkebunan Tebu dan Petani di Mangkunegaran pada Masa Belanda”, *Laporan Penelitian*, IKIP Veteran Sukoharjo

Sugiatmanto, 1976, “Administrasi Pemerintahan Praja Mangkunegaran sebagai Studi Perbandingan untuk Memecahkan Masalah Administrasi Pemerintah Indonesia”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Jakarta

Wasino. 1994. “Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran”. *Tesis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widyasanti, 2008, “Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perkebunan Kopi Kerjogadungan di Karanganyar pada tahun 1916-1946”, *Skripsi*, FSSR, Universitas Sebelas Maret.